

Dr. Lue Sudyono, MM

MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN



*Karya ini dipersembahkan kepada
Alm. Ayahanda Andel Fmon dan Alm
Ibunda Jimur Martin Batu yang telah
Membesarkan dengan kasih sayang yang tak
terhingga serta suami tersayang Drs.
Sudiyono, SU dan anak - anakku : Istiqomah
Jitien Rahmawati, Ismail Agus Dwi
Admadja, Ismadi Jripasca Admadja,
Issaidah Jitien Jakaningsih dan Ismalik
Perwira Admadja. Mereka telah menerangi
hidupku dan memberikan inspirasi dalam
berkarya untuk negeri dan bangsa*

PRAKATA

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (*Nation Character Building*) untuk itu maka pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Partisipasi merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pembangunan, karena dengan partisipasi masyarakat, bisa menjadi parameter sejauh mana proses keberhasilan pembangunan bisa diwujudkan. Partisipasi dibagi menjadi tiga tahapan : 1). Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, 2) Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, 3). Keterlibatan dalam memetik manfaat secara berkeadilan/ pengawasan dan evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan/ sekolah sangat dibutuhkan, baik dalam perencanaan pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Dengan pendekatan kultural khas Indonesia yang dapat dimasukkan dalam proses eksplorasi kebutuhan dan identifikasi masalah, merupakan bentuk sarana untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki atas keputusan dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan. Oleh karenanya musyawarah dilakukan antara pengurus sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang terkait, dewan sekolah dan sebagian orangtua/wali murid atau tokoh masyarakat.

Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan pendidikan yang bertumpu pada tri pusat pendidikan yaitu pemerintah, masyarakat dan keluarga. Secara sinergitas atau perpaduan dalam kerja sama tersebut sejalan dengan teori tindakan sosial Parsons dan teori tindakan rasional Weber, bahwa tindakan yang dilakukan masyarakat adalah cara-cara (means) yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tindakan sosial dan tindakan rasional berwujud partisipasi masyarakat akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat itu, karena nilai-nilai dan norma itu yang membentuk pola tindakan

masyarakat. Agar kemampuan untuk berpartisipasi dimiliki oleh masyarakat dalam pendidikan tinggi maka sekolah perlu menjadikan masyarakat sebagai patnernya.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis dan terima kasih kepada semua pihak yang telah secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam menyelesaikan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, khususnya bagi pembangunan pendidikan kedepan, tentunya buku ini masih mengalami kekurangan, akan diperbaiki jika ada perkembangan informasi yang lebih otentik lagi.

Yogyakarta, Agustus 2016
Penulis

*Education is the foundation upon which
we build our future.*

Christine Gregoire

*Before any great things are
accomplished, a memorable change must
be made in the system of education. . . to
raise the lower ranks of society nearer to
the higher.*

John Adams

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
PRAKARTA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Partisipasi	4
B. Tujuan Partisipasi	6
C. Upaya Peningkatan Partisipasi	7
D. Tahap-tahap Dan Tingkat Partisipasi	8
E. Indikator Keberhasilan Partisipasi	11
F. Masyarakat	14
G. Ciri- Ciri Masyarakat dan prinsip pembangunan pendidikan	15
H. Konsep Dan Model Pembangunan Masyarakat	17
BAB III PENDIDIKAN	
A. Pengertian, Hakekat, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan	21
B. Sistem Pendidikan Nasional	22
C. Pengembangan Sistem Pelaksanaan	25
D. Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Dalam Pembangunan	27
E. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	33
F. Sarana dan prasarana pendidikan	34
BAB IV PARTISIPASI DAN PEMBANGUNANPENDIDIKAN	
A. Partisipasi Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah	36
B. Partisipasi dan keberhasilan Pembangunan Pendidikan	37
C. Sosiologi Sebagai Pendekatan Studi Pendidikan	39
D. Fenomenologi	42
BAB V PERUBAHAN SOSIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
A. Perubahan Sosial	44
B. Konsep Perubahan Sosial	45
C. Teori Interaksi Sosial Simbolik	49
D. Teori Konflik	50

E. Model Agresor –Defender	50
F. Model Spiral-Konflik	52
G. Model Perubahan Struktur	55
H. Teori Tindakan Sosial	56
I. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pendidikan	56
 BAB. VI . PENDIDIKAN INKLUSIF	
A. Pengertian Pendidikan Inklusif	60
B. Manfaat Pendidikan inklusif	63
C. Landasan Pendidikan inklusif	64
 BAB. VII STANDAR PROSES PENDIDIKAN	
A. Perlunya standar proses pendidikan	69
B. Fungsi Standar Proses pendidikan	70
C. Tujuan Dan Standar Kompetensi	71
 BAB VIII MODEL PARTISIPASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN JETIS BANTUL YOGYAKARTA	
A. Partipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Sekolah	75
B. Faktor Pendukung Partisipasi	112
C. Faktor Penghambata	122
D. Model Partisipasi Dalam Pembangunan Fisik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kecamatan Jetis Bantul Yogyakarta	137
 BAB IX KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Kesimpulan	144
B. Implikasi	146
C. Saran	149
 DAFTAR PUSTAKA	 151

BAB I PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya dorongan demokratisasi dibelahan dunia, maka partisipasi merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pembangunan, karena dengan partisipasi masyarakat, bisa menjadi parameter sejauh mana proses keberhasilan pembangunan bisa diwujudkan. Demokrasi dalam pembangun dan penyelenggaraan pemerintahan diseluruh penjuru dunia dewasa ini mendapat perhatian sangat luas dan luar biasa dikalangan akademisi maupun pratisi, partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan bukan fenomena kesadaran yang muncul dengan sendirinya, melainkan kesadaran yang muncul oleh struktur dan kultur yang diciptakan dalam masyarakat itu bisa benar-benar menghasilkan proses pembangunan yang dikehendaki oleh semua kalangan dan bisa dirasakan secara merata serta berkeadilan, tidak hanya oleh fihak-fihak tertentu saja.

Partisipasi adalah prasarat yang diperlukan untuk memperkuat gerakan *governance*, yakni mendorong keberadaan kerangka lokal yang legal mendorong upaya pembangunan untuk mengakui keberadaan kelompok-kelompok warga dan menndorong keterlibatan dalam proses *governance*. Hal ini sehubungan dengan pendapat Hefifah (2009:15) menyebutkan bahwa :

”Partisipasi merupakan proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi , mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dalam pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Adapun indikator keberhasilan peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diukur dengan :

- Adanya kontribusi /dedikasi dalam meningkat hal jasa (pemikiran, ketrampilan), finansial, moral, dan material/ barang
- Meningkatnya kepercayaan kepada sekolah terutama menyangkut kewibawaan dan keberhasilan.

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas kepedulian masukan (kritik dan saran) untuk peningkatan mutu pendidikan tanggung jawab, masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- Keputusan yang dibuat oleh sekolah sudah mengeksperisikan aspirasi dan pendapat masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam kenyataan selama ini sebagian besar masyarakat memberi peranya hanya dengan membayar misalnya dalam bentuk administrasi pendaftaran, heregistrasi, sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP) dan sumbangan pembangunan gedung dan sumbangan lain yang ditentukan oleh sekolah.

Persoalan nasional lain dalam menghadapi masa depan di era global, ialah masalah peningkatan kemampuan pembangunan

(Development Capability) kita perlu ditingkatkan agar dapat mengatasi masalah-masalah pembangunan yang akan datang dan tantangan-tantangan yang kita hadapi selama ini yaitu masalah ketimpangan, kemiskinan, pengangguran dikalangan masyarakat biasa dan masyarakat terdidik juga remaja, langkah dasar yang perlu di usahakan untuk pembangunan kemampuan bangsa ialah penanaman sikap dasar yang benar dan jujur terhadap usaha pembangunan dengan mampu melahirkan tindakan pembangunan yang sebenarnya (Genuine development act). Dalam hal ini salah satu sarana yang tepat adalah Peningkatan Kualitas di Bidang Pendidikan. Selanjutnya meningkatkan kemampuan pembangunan dengan memperbaiki pengetahuan pembangunan (development Knowledge) secara terus menerus (Mochtar Buchori, 1999).

Pendidikan merupakan sarana srategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Oleh karena kemajuan suatu bangsa dapat ditandai dan diukur dari kemajuan pendidikannya. Kemajuan beberapa negara di dunia ini tidak terlepas dari kemajuan yang dimulai dan dicapai dari pendidikannya (Maksum dan Ruhendi, 2004 :227), Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat

dan pemerintah yang betul-betul serius demi peningkatan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 45 menyebutkan bahwa :”masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah

Dalam pelaksanaannya pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang bermutu dan berkualitas. meliputi;

1. Produk pendidikan yang dihasilkan berupa prosentase peserta didik yang berhasil lulus dan kelulusan tersebut dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia atau membuka lapangan kerja sendiri, baik dengan cara meniru atau menciptakan yang baru
2. Proses pendidikan, menyangkut pengelolaan kelas yang sesuai dengan kondisi kelas yang relatif kecil, penggunaan metode pengajaran yang tepat serta lingkungan masyarakat yang kondusif
3. Adanya kontrol merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Oleh karena kemajuan suatu bangsa dapat ditandai dan diukur dari kemajuan pendidikannya. Kemajuan beberapa negara di dunia ini tidak terlepas dari kemajuan yang dimulai dan dicapai dari pendidikannya (Maksum dan Ruhendi, 2004 :227).

Untuk mencapai tujuan pendidikan dan kualitas pendidikan yang diharapkan maka sarana prasarana fisik sekolah sangat menentukan, ”sarana prasarana fisik tersebut misalnya: buku-buku, perpustakaan, gambar, alat permainan, alat peraga, alat labotarium, meja kursi, papan tulis, OHP, transparan, LCD, komputer” (Sumitro, 2000:79).

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa latin *participare* yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian atau turut serta. Sastrodipoetra (1988) menjatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan menurut Alastraire White (Sastrodipoetra,1988) menyatakan partisipasi sebagai “Keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaanya terhadap proyek-proyek bangunan”.

Rahnema (Muluk, 2007) menyatakan partisipasi sebagai “the action or fact of partaking, having or forming a part of”. Dalam pengertian , bahwa partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif, dapat pula bermoral atau tak bermoral, dan bersifat dipaksa atau bebas dapat pula bersifat bebas manipulatif atau bersifat spontan. Partisipasi bersifat transitif berorientasi pada tujuan tertentu, sebaliknya partisipasi bersifat intrasitif apabila subyek tertentu berperan serta tanpa tujuan yang jelas. Sedangkan partisipasi yang menuhi sisi moral apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika dan mengandung konotasi positif.

Migdgley (Muluk, 2007) menjelaskan partisipasi spontan sebagai “a voluntary and autonomous action on the part of the people to organize and deal with their problems unaided by government or other external agent” Ini merupakan partisipasi yang sering dimanipulasi mengandung pengertian partisipan tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun sesungguhnya partisipan untuk berperan serta oleh kekuatan di luar kendalinya.

Dalam kaitan dengan pembangunan mengutip beberapa pendapat para ahli mengatakan misalnya (Ainur Rahman 2009 : 46):

- 1). “Tjokroamidjoyo (1992) mengatakan partisipasi sendiri sebagai keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- 2) Charly (1992) mengatakan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seorang atau kelompok masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan diri) menurut kemampuan swadaya yang ada, untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dalam pencapaiannya tujuan bersama
- 3). Nadraha (1992) menyatakan dengan partisipasi berarti terdapat keberanian untuk menerima tanggungjawab atas suatu usaha pencapaian tujuan bersama”.
- 4). Wolf dalam Goutet (1989) memberikan pengertian partisipasi sebagai usaha terorganisasi meningkatkan peranan pengendalian atas sumber-sumber daya dan lembaga-lembaga dalam suatu masyarakat tertentu, bagi kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan yang sampai sekarang tidak diikutkan dalam pengendalian.
- 5). Depdiknas (2007 : 46) partisipasi adalah *stakelholders* (warga sekolah dan masyarakat) merupakan keterlibatan secara aktif masyarakat baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengevaluasian pendidikan diharapkan dapat mendorong warga masyarakat sekitar dalam menggunakan haknya menyampaikan pendapat untuk kepentingan sekolah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat di bidang pendidikan adalah keterlibatan mental dan emosional seorang atau kelompok masyarakat, untuk mengambil keputusan pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengevaluasian pendidikan diharapkan dapat mendorong warga masyarakat sekitar dapat

menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan ikut melaksanakan upaya pembangunan pendidikan untuk kepentingan pendidikan/ sekolah dan siswa itu sendiri.

Pergeseran focus kebijakan dari pemerintah dan dari dinas pendidikan kesekolah atas landasan otonomi daerah dengan azas desentralisasi diharapkan proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengwasan/ pengevaluasian pendidikan lebih partisipatif dan benar-benar mengabdikan pada kepentingan publik dan bukan pada kepentingan elite birokrasi dan politik. Dengan partisipasi aktif tersebut Manajemen Berbasis Sekolah betul-betul mengalirkan dari kekuasaan pemerintah pusat dan dinas pendidikan ketangan para pengelola sekolah, guru - guru, kepala sekolah, siswa, dan tenaga-tenaga kependidikan lainnya, maupun warga masyarakat seperti : orang tua siswa, akademisi, tokoh masyarakat dan fihak fihak lain yang mewakili masyarakat dalam bentuk forum yang dinamakan Dewan pendidikan dan Komite Sekolah.

B. Tujuan Partisipasi

Tujuan utama peningkatan partisipasi (Depdiknas, 2005) adalah untuk :

1. Meningkatkan dedikasi / kontribusi *stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa, pemikiran, intelektualitas, ketrampilan, moral, financial dan matrial / barang.
2. Memberdayakan kemampuan yang ada pada *stakeholders* bagi pendidikan untuk pendidikan nasional.
3. Meningkatkan peran *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik sebagai *advisor, supporter, mediator, controller, recourse linker, dan education proder.*
4. menjamin tiap adanya setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi *stakeholders*

dan menjadi aspirasi *stakeholders* sebagai penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

C. Upaya Peningkatan Partisipasi

Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya –upaya yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam rangka peningkatan partisipasi *stakeholders* adaah sebagai berikut :

1. Membuat peraturan dan pedoman sekolah yang dapat menjamin hak *stakeholders* yang dapat menjamin *stakeholders* untuk menyampaikan pendapat dalam segala proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengevaluasian pendidikan di sekolah.
2. Menyediakan sarana partisipasi atau saluran komunikasi agar / *stakeholders* dapat mengutarakan pendapatnya atau pendapat mengepresikana keinginan dan aspirasinya melalui pertemuan umum temu wicara,konsultasi, penyampaian pendapat secara tertulis maupun lisan, partisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan perencanaan, pengawasan pendidikan di sekolah.
3. Melakukan advokasi, demokrasi, publikkasi, komunikasi, transparansi, dan realitas terhadap *stakeholders*.
4. Melihat *stakeholders* secara proposional dengan pertimbangan relevansi keterlibatannya, batas-batas yuridisnya, kopetensinya, dan kompatibilitas tujuan yang akan dicapainya.

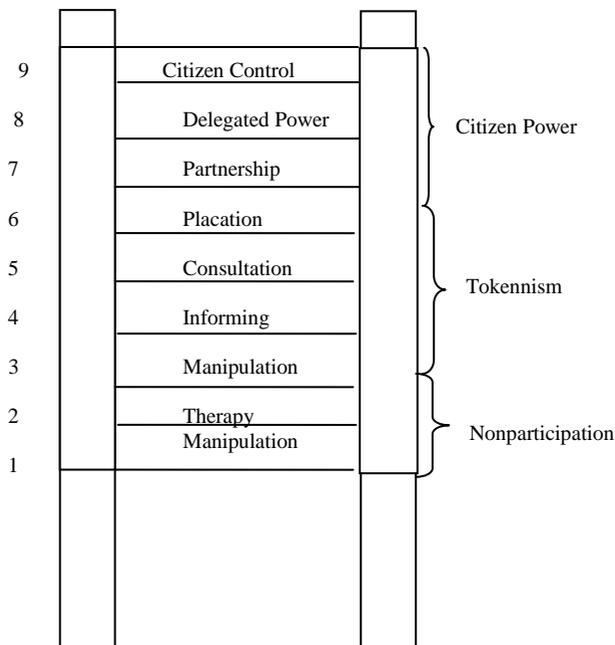
D. Tahap-tahap dan Tingkatan Partisipasi

Tjokroamidjoyo 1992 (Averroes 2009 : 45) membagi partisipasi menjadi tiga tahapan:

1. Partisipasi atau kerlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunanyang dilakukan oleh pemerintah.
2. Kerterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
3. Keterlibatan dalam memetik dan manfaat pembangunan secara berkeadilan”.

Menurut Sherry R Arnstein (1969) yang membuat skema tingkatan partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan, di antaranya adalah control warga negara (*citizen control*): pada tataran ini public berwenang memutuskan, melaksanakan, dan menngawasi pengelolaan sumber daya. Setelah itu delegasi kewenangan (*delegate power*): kewenangan masyarakat lebih tinggi dari penyelenggara Negara dalam pengambilan keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan kemitraan (*partnership*): ada keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan menganmbil keputusan bersama-sama. Secara lebih lengkap tingkatan partisipasi yang diajukan Arnstein 1969(Averroes 2009 :47) dalam tulisannya *A Ladder of Citizen Participation* adalah sebagai berikut :

Tingkatan Partisipasi Menurut Arnstein



Gambar 1

Ket : Arnstein (1969), Eight Rungs on The Ladder of Citizen Participation

Dalam kaitannya dengan partisipasi, Tjokroamidjojo (1992) mengatakan terdapat 4 (empat) aspek penting dalam pembangunan, yaitu: Pertama, terlibat dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik suatu Negara turut menentukan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kedua, meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahan mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan

dalam proses politik. Dalam hal ini tergantung dari sistem dan tata cara penyelenggaraan pemerintah yang berlaku bagi suatu negara.

Keempat, masyarakat akan memberikan partisipasi secara aktif apabila ada perumusan dan pelaksanaan program - program tersebut yang menyentuh kepentingan mereka secara langsung untuk meningkatkan kemakmuran.

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, sebab dalam diri mereka ada keinginan dan kegairahan untuk merubah masa depannya agar lebih baik. Keinginan serta kegairahan tersebut harus dapat terwujud, sebab usaha-usaha dari pembangunan itu langsung menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Ada dua factor yang mempengaruhi terhadap berhasil atau gagalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Conyers (1991) yaitu : pertama, hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak akan berpartisipasi dengan antusias yang tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir. Kedua, Masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang manfaat pembangunan tersebut secara merata.” tidak menarik minat mereka atau yang tidak mempunyai pengaruh langsung dapat mereka rasakan.

Midgley dalam Muluk (2007) mengungkapkan partisipasi masyarakat berkonotasi the direct involvement of ordinary people in local affairs. Partisipasi masyarakat berarti adanya keterlibatan masyarakat biasa dalam urusan-urusan setempat secara langsung. Midgley memperjelas pengertian partisipasi masyarakat ini dengan mengacu pada salah satu definisi yang termuat dalam resolusi PBB pada awal tahun 1970an sebagai berikut, “Penciptaan peluang yang memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan dan mempengaruhi.

E. Indikator Keberhasilan Partisipasi

Keberhasilan peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diukur dengan beberapa indikator :

1. Kontribusi /dedikasi *stakeholders* meningkat dalam hal jasa (pemikiran, ketrampilan), finansial, moral, dan material/ barang.
2. Adanya kepercayaan *stakeholders* kepada sekolah terutama menyangkut kewibawaan dan keberhasilan.
3. Adanya tanggung jawab *stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
4. Adanya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk peningkatan mutu pendidikan
5. Adanya kepedulian *stakeholders* terhadap setiap langkah yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan mutu
6. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh sekolah benar-benar mengeksperisikan aspirasi dan pendapat *stakeholders* dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan (Depdiknas, 2007)

Begitu pula dengan fakta yang terjadi di Indonesia. Keberadaan UU No. 5/1974 tentang Pemerintah Daerah dianggap sebagai sumber sentralisasi kebijakan pembangunan. Dengan datangnya reformasi pemerintahan dan melahirkan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, dan revisi dalam UU No. 32/2204 tentang Pemerintah Daerah lebih membuka peluang partisipasi publik direalisasikan dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan. Walaupun demikian masih membuka sejumlah pertanyaan, di antaranya sejauh mana keberadaan undang-undang yang demokratis tersebut melahirkan kebijakan pembangunan yang demokratis dan benar-benar menghasilkan suatu produk pembangunan yang diharapkan oleh publik.

Partisipasi publik dalam proses pembangunan belum berjalan secara maksimal karena masih sering sebatas mementingkan "keinginan" daripada "kebutuhan" yang sesungguhnya. Masyarakat belum mampu mengidentifikasi dan

merumuskan kebutuhannya sendiri secara ideal, sehingga apa yang dinyatakan oleh elit pemerintahan dianggapnya sebagai suatu kebenaran.

Partisipasi adalah prasyarat yang diperlukan untuk memperkuat gerakan governance, yakni mendorong keberadaan kerangka legal yang mendorong upaya pembangunan untuk mengakui keberadaan kelompok-kelompok warga dan mendorong keterlibatan dalam proses governance. Kerangka legal untuk mendorong partisipasi warga dalam governance bisa dikeluarkan di tingkat Nasional maupun tingkat lokal. Dari Pengamatan awal dapat disampaikan, pada umumnya proses yang terjadi dalam partisipasi pembangunan di daerah secara formal sudah dilaksanakan, namun belum menghasilkan arah kebijakan pembangunan yang berarti dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat. Ironisnya terdapat suatu tradisi umumnya program pembangunan yang seringkali hanya merupakan pengulangan-pengulangan di masa lalu.

Program pembangunan yang direncanakan belum didahului dengan studi dan analisis yang mendalam tentang mengapa, bagaimana, dengan cara dan untuk apa suatu kebijakan ditetapkan. Di sisi lain, aspek kepentingan politik segolongan masyarakat dan pertentangannya dengan lainnya seringkali mengabaikan kepentingan umum dari tujuan pembangunan itu sendiri. Hal tersebut di lapangan apa ada akhirnya mengakibatkan masyarakat menjadi korban dari tarik menarik secara politis dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri.

Berbagai pengalaman pembangunan yang tanpa menunjukan partisipasi warga misalnya menurut Hetifah (2009 ; 109) :

1. "Pemerintah kekurangan petunjuk mengenyai kebutuhan dan keinginan warga.
2. Infestasi yang ditanamkan tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan .

3. Sumber-sumberdaya publik yang langka tidak digunakan secara optimal
4. Sumberdaya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki kualitas tidak terungkap
5. Standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana yang tidak tepat.
6. Fasilitas-fasilitas yang ada digunakan dibawah kemampuan dan ditempatkan pada tempat-tempat yang salah”.
- 7.

Dalam kebijakan pembangunan secara konseptual maupun praktik di lapangan didahului dengan konsep perancangan yang baik dan benar serta memenuhi aspek-aspek aturan kebijakan yang berlaku. Konsep perancangan pembangunan yang efektif dan menyentuh dimensi-dimensi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan dibukanya kesempatan berpartisipasi, warga menjadi lebih memiliki perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi dilingkungannya dan memiliki kepercayaan diri untuk dapat berkontribusi untuk ikut mengatasinya.

Sedangkan langkah-langkah agar partisipasi yang dapat mendukung proses menuju good governance dapat tumbuh (Hetifah 2009) :

1. “Memperkuat legal basis untuk partisipasi dan menguat kapasitas warga , bisa dilakukan dengan merbitkan perda khusus
2. Penguatan institusi komunitas dengan mendorong kebebasan berorganisasi dan mengalokasikan sumber daya.
3. Menyediakan dan menyebarkan berbagai informasi publik dalam bentuk-bentuk media
4. Melakukan proses desentralisasi fiskal ke tingkat bawah (kelurahan, RW,RT)
5. Mengembangkan metode partnership dan partisipasi warga (konsultasi publik, panel warga, komisi-komisi khusus untuk masalah spesifik masing-masing daerah)”

F. MASYARAKAT

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama / merupakan kesatuan sosial, dibawah ini disajikan dari beberapa pendapat para ahli tentang masyarakat misalnya.

1. Menurut Koentjoroningrat 1980, (Basrowi, 2005) istilah masyarakat berasal dari bahasa arab “*syaraka*” yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “*musyaraka*” yang berarti saling bergaul. Didalam bahasa Inggris di pakai istilah “*society*” yang sebelumnya berasal dari kata latin “*sosius*” berarti “kawan”
2. Menurut Abdul Sani 1987 (Basrowi, 2005 : 37) bahwa :Masyarakat berasal dari kata “*musyaraka*” (arab),yang artinya bersama-sama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesempatan menjadi masyarakat (Indonesia).
3. Ralph Linton (1936) mengemukakan, bahwa masyarakat adalah adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan kerja sama, sehingga mereka itu dapat menganalisisakan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
4. Jonh Lewis Gillin dan Jonh Philip Gillin lebih sering disebut Gillin & Gillin (1954) mengatakan, Masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil sampai dengan kelompok manusia dalam suatu masyarakat yang sangat besar, misalnya suatu negara. Seperti diketahui , suatu negara juga memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama dan keteraturan.

5. Koentjoroningrat 1980 (Basrowi, 2005 : 39) merumuskan definisi “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.
6. Pelly dan menanti 1994 (Basrowi, 2005) mengemukakan bahwa hakekat masyarakat sebagai berikut :
 - 1). Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang memiliki budaya sendiri dan bertempat tinggal di daerah teritorial yang tertentu, memiliki rasa paersatuan, merasa memiliki identitas sendiri, memiliki pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, terdapat kerja sama dan nilai-nilai yang dipedomani anggotanya.
 - 2). Masyarakat merupakan wadah sosialisasi dan tranmisinilai dan norma dari generasi ke generasi,salah satu wujud dari kesatuan hidup sosial manusia.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok orang yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kebiasaan tradisi , sikap dan perasaan persatuan yang sama dan mempunyai hakekat yaitu dapat bekerja sama dalam satu wujud dari kesatuan hidup nanusia.

G. Ciri-ciri Dan Prinsip Pembangunan Masyarakat

Menurut Durkhem (Basrowi ,2005 : 40) ,” masyarakat bukanlah hanya sekedar penjumlahan individu semata, melainkan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antara mereka (anggota masyarakat), sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-ciri sendiri”.

Sedangkan menurut Soerjono Soekamto 1986 (Basrowi : 2005) menyatakan , bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat mempunyai ciri – cirinya sendiri pokok, sebagai berikut : a)

Manusia yang hidup bersama, b) Bercampur untuk hidup yang cukup lama, c) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan d) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan dan merasadirinya terikat satu dengan yang lain.

Pendapat lain Abdul Syani (2003) menyebutkan, ciri-ciri masyarakat :

- a). Adanya interaksi,
- b). Ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang bersifat menetap dan kontinu,
- c). Adanya rasa indentitas terhadap kelompok, di mana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.

Dari beberapa pendapat diatas bahwa masyarakat mempunyai ciri – ciri sebagai manusia yang hidup bersama, bercampur cukup lama, adanya interaksi dalam suatu kesatuan dalam sistem yang menimbulkan kebudayaan, dan anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lain adanya ikatan pola tingkah laku yang has dalam aspek kehidupan yang menetap dan kontinu.

Ada 22 prinsip-prinsip Pembangunan masyarakat dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan masyarakat dalam buku Suparjan, 2005 yang berjudul Pengembangan Masyarakat , yaitu :

- 1.Pembangunan terpadu dan seimbang,
- 2.Konfrontasi terhadap ketimpangan Struktural,
- 3.Menjunjung Tinggi Hak Asasi manusia,
- 4.Keberlanjutan,
- 5.Pemberdayaan,
- 6.Pembangunan personal dan politik,
- 7.Pemilikan komunitas,
- 8.Kemandirian ,
- 9.Indevenden dari negara,
10. Tujuan dekat (antara) dan Visi akhir jangka panjang,

11. Pembangunan organis,
12. Tahapan pembangunan,
13. Bebas dari tekanan luar,
14. Pembangunan komunitas,
15. Proses dan hasil,
16. Integritas proses,
17. Anti kekerasan, Inklusif
18. Konsensus,
19. Kooperasi,
20. Partisipasi,
21. Mendefinisikan kebutuhan.

H. Konsep Dan Model Pembangunan Masyarakat

Pembangunan Masyarakat menurut Dirjen Bangdes pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkeanjutan dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera. Pengertian tersebut mengandung makna betapa pentingnya inisiatif lokal, partisipasi yang bagian dari model pembangunan yang dapat mensejahterakan

Menurut Korten (Suparjan, 2003 : 23) konsep pembangunan masyarakat pada hakekatnya memiliki beberapa aspek :

1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibuat ditingkat lokal.
2. Fokus utama adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengawasi dan mengerahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensi daerah mereka sendiri.
3. Mempunyai telenransi terhadap perbedaan dan mengakui arti penting nilai individu.
4. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sosial dilakukan melalui proses belajar sosial.
5. Budaya kelembagaan ditandai dengan adanya organisasi yang mengatur dan mengelola diri sendiri.

6. Jaringan kualisi dan komunikasi pelaku (aktor) lokal dan unit lokal sebagai penerima manfaat lokal, organisasi pelayanan daerah, pemerintah daerah, bank-bank pedesaan dan lain-lain menjadi basis tindakan- tindakan lokal yang diserahkan untuk memperkuat penawasan lokal yang mempunyai dasar kemampuan untuk mengelola .

Selain itu ada beberapa ciri utama dari konsep pembangunan, yaitu (Suparjan , 2003 : 25) :

1. Sumber perencanaan pembangunan adalah prakarsa dan inisiatif masyarakat.
2. Penyusunan program oleh masyarakat
3. Teknologi merupakan teknologi tepat guna yang bersumber dari ide-ide keaktifan masyarakat.
4. Mekanisme kelembagaan bersifat botom up
5. Menekankan pada proses dan hasil
6. Evaluasi berorientasi pada dampak dan peningkatan kapasitas masyarakat
7. Orientasinya adalah terwujudnya kemandirian masyarakat.

Adapun menurut *Jack Rothman* dalam karya klasiknya yang terkenal, "*Tree Models Of Community Organization Practice*, mengembangkan tiga model dalam memahami konsep tentang pembangunan masyarakat misalnya :

- 1). Pengembangan masyarakat lokal (*locality depelopment*),
- 2). Perencanaan Sosial (*social planing*), 3) Aksi sosial (*sosial action*)” yang akan digambarkan dalam tabel berikut (Suharto, 2005 :43

Tabel 1.
Tiga Model pengembangan Masyarakat

PARAMETER	PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL	PERENCANAAN SOSIAL	AKSI SOSIAL
Organisasi tujuan	Kemandirian, integritas & kemampuan masyarakat (tujuan proses)	Pemecahan masalah sosial yang ada dimasyarakat (tujuan tugas dan hasil)	Perubahan struktur Kekuasaan, lembaga dan sumber (tujuan proses & tugas)
Asumsi mengenai Struktur masyarakat & kondisi masalah.	Keseimbangan , kurang kemampuan dalam relasi & pemecahan masalah	Masalah sosial nyata : Kemiskinan, penggangguran, kenakalan remaja	Ketidakadilan, Kesengsaraan, Ketidakmerataan, Ketidaksetaraan
Asumsi mengenai kepentingan masyarakat	Kepentingan umum atau Perbedaan-perbedaan yang Dapat diselaraskan	Kepentingan yang dapat diselaraskan atau konflik kepentingan	Komplik kepentingan yang tidak dapat diselaraskan
Konsep mengenai Kepentingan umum	<i>Rationalist – unitary</i>	<i>Idealist- unitary</i>	<i>Realist-individualist</i>
Orientasi terhadap Struktur kekuasaan	Struktur kekuasaan sebagai pekerja & sponsor	Struktur kekuasaan sebagai pekerja dan sponsor	Struktur kekuasaan sbg sasaran aksi, dominasi elit kekuasaan dihilangkan
Sistem klien atau Sistem perubahan	Masyarakat secara keseluruhan	Seluruh / kelompok masyarakat, termasuk Masyarakat fungsional	Sebagian atau sekelompok anggota masyarakat tertentu
Konsepsi mengenai klien	Warga masyarakat atau negara	Konsumen	Korban

atau penerima pelayanan			
Peranan masyarakat	Partisipan dalam proses pemecahan masalah	Konsumen atau penerima pelayana	Pelaku, elemen atau anggota
Peranan pekerja sosial	Pemungkin, koordinator, Pembimbing	Peneliti, analisis, fasilitator, Pelaksanaan program	Aktivis advokat : broker agitator, negotiator
Media perubahan	Mobilisasi kelompok – Kelompok kecil	Mobilisasi organisasi formal	Mobilisasi organisasi masa & politik
Strategi perubahan	Pelibatan masyarakat dalam Pemecahan masalah	Penentuan masalah & keputusan melalui Tindakan rasional para ahli	Katalisasi & Organisasi masy. untuk mengubah struktur kekuasaan
Teknik perubahan	Konsensus & diskusi Kelompok, partisipasi, bimbingan & penyuluhan	Advokat, andragogy, perumusan kebijakan, Perencanaan program	Konflik / unjuk rasa / Tindakan Langsung, mobilisasi Masa, analisis kekuasaan, mediasi, agitasi, egosiasi, pembekalan.

Sumber : (Suharto, 2005 :43)

BAB III

PENDIDIKAN NASIONAL

A. Pengertian Hakekat, Fungsi Tujuan Pendidikan

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah

” usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif , mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (U.U No.20/2003, pasal 3).

Menurut Maksun dan Ruhendi,(2004 :227), bahwa ”Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Oleh karena kemajuan suatu bangsa dapat ditandai dan diukur dari kemajuan pendidikannya. Kemajuan beberapa negara di dunia ini tidak terlepas dari kemajuan yang dimulai dan dicapai dari pendidikannya”

Demikian juga Zainudin Maliki (2008 : 45) menegaskan bahwa pendidikan harus memainkan perannya dan fungsinya mencerdaskan warga masyarakat, karena pendidikan adalah kunci terpenting dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam membangun kehidupan.

Dalam pelaksanaan pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang bermutu dan berkualitas meliputi;

1. Produk pendidikan yang dihasilkan berupa prosentase peserta didik yang berhasil lulus dan kelulusan tersebut dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia atau membuka lapangan kerja sendiri, baik dengan cara meniru yang sudah ada /menciptakan yang baru.
2. Proses pendidikan, menyangkut pengelolaan kelas yang sesuai dengan kondisi kelas yang sesuai aturan atau relatif kecil, penggunaan metode pengajaran yang tepat serta lingkungan masyarakat yang kondusif.
3. Adanya kontrol dan pengawasan pada sumber-sumber pendidikan dan pelaksanaan yang ada (Sihombing dan Indardjo, 2003).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai warga negara, karena dengan pendidikan orang dapat berusaha membangun kehidupan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

B. Sistem Pendidikan Nasional

Dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, negara sebenarnya telah mempunyai kemauan yang cukup besar ditandai dari sebelum kemerdekaan telah menyiapkan beberapa dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan misalnya :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 menyatakan; setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran dan pemerintah wajib membuat peraturan pelaksanaannya.
2. Keputusan Presiden RI tanggal 2 April 1950 dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 yang baru diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun

1954 . Penekanannya bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas –Universitas Negeri (Perguruan Tinggi)

3. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan ; pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Penekanan pada wajib belajar 9 tahun, pendidikan sepanjang hayat dan biaya pendidikan minimal 20%.
4. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang nomor 2 tahun 1989. baik dari segi prinsip penyelenggaraan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan .

Prinsip penyelenggaraan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (pasal 4 ayat 1).

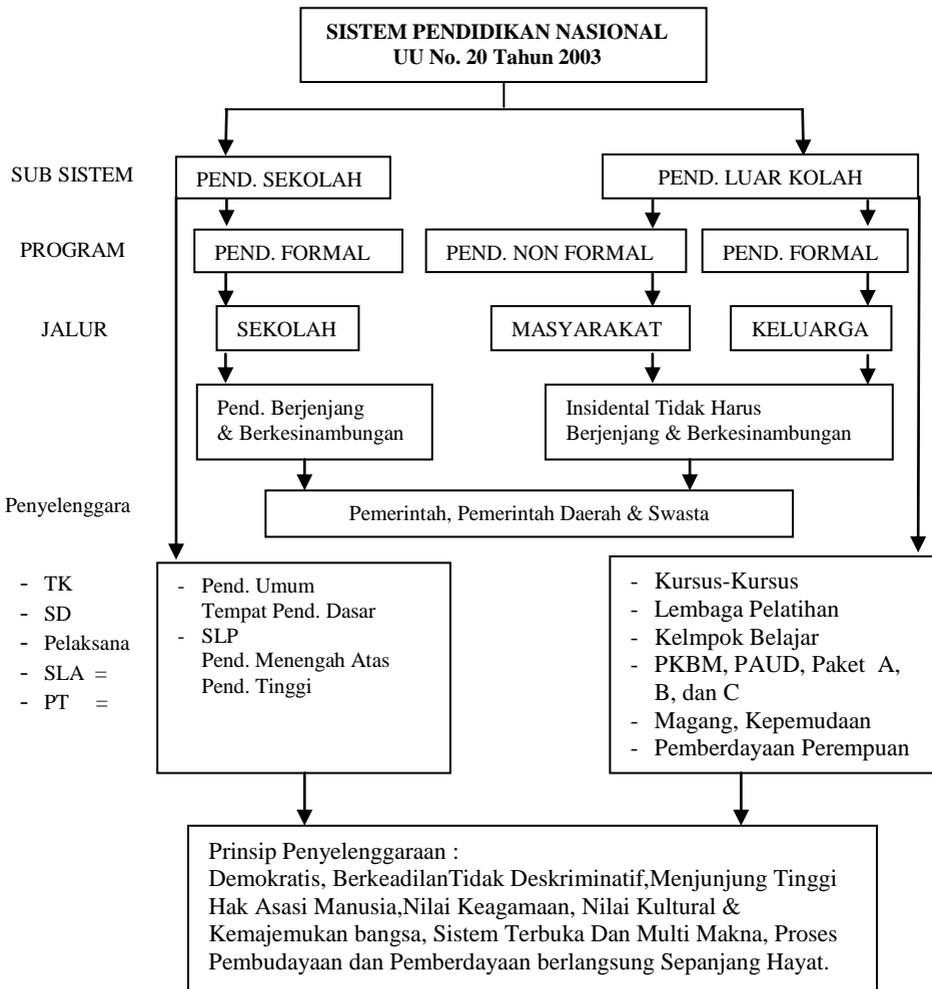
Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3). Diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan , mengembangkan kreatifitas, mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal , non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain Yang sederajat (pasal 17), pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah

Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain Yang sederajat(pasal 18), dan pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister,spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (pasal 19).

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (pasal 26 ; 1).

Sedangkan pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hal ini akan digambarkan dalam kerangka berikut :



Gambar 2. Sistem pendidikan Nasional

C. Pengembangan Sistem Pelaksanaan

Perubahan yang terjadi pada semua sektor kehidupan akibat globalisasi, revolusi informasi dan teknologi, serta perkembangan di bidang jasa dan geo-ekonomi, sehingga tidak dapat dihindari lagi adanya gelombang modal dengan tata nilai

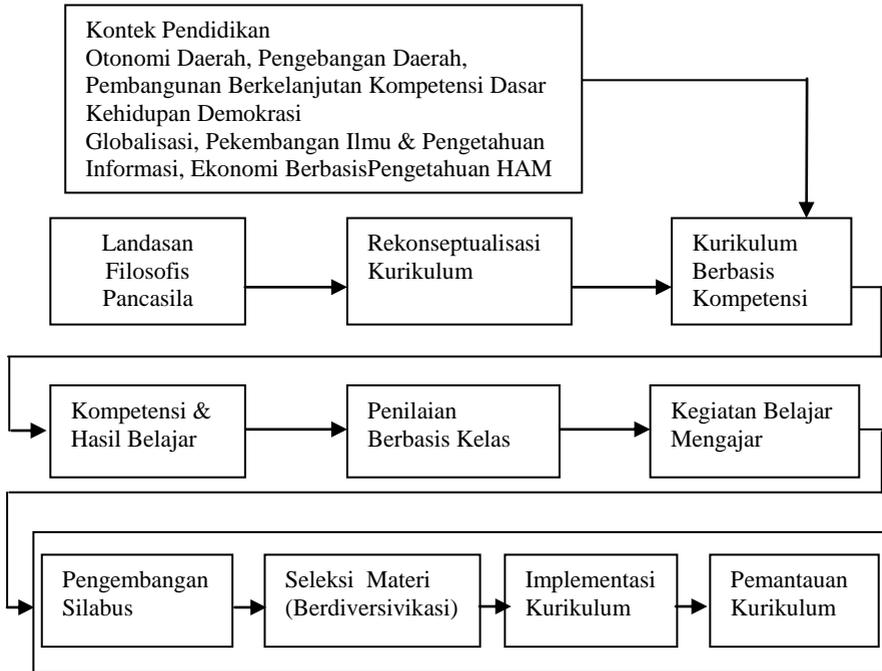
yang menyadarkan setiap negara untuk memposisikan manusia sebagai satu-satunya sumber daya aktif yang dapat menentukan nasib "Kelangsungan Hidup Dan Kemenangan" suatu bangsa dimasa depan. Sumberdaya alam, modal dan teknologi bukan tidak penting tetapi semuanya pasif, jika tanpa sentuhan manusia tidaklah ada manfaatnya.

Berkaitan dengan hal diatas, maka diperlukan adanya perubahan paradigma pendidikan yang berorientasi kompetensi lulusan. Salah satu cara dengan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menjadi "agent Of Change" atau reinventor" lewat pendidikan dan latihan yang memadai, yang menghasilkan SDM yang mampu melakukan perbaikan, menciptakan karya-karya baru yang mampu meningkatkan keunggulan kompetitif. Untuk itu ada pengembangan sistem pelaksanaan misalnya dari segi penerapan kurikulum berbasis kompetensi (competency based curriculum) yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan sesuai tuntutan jaman, guna menjawab tantangan kedepan, arus globalisasi, kontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan nasional, lentur, adaptasi terhadap berbagai perubahan.

Depdiknas (2002: 37) mengemukakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. "Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal
2. Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman
3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi
4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar serta penguasaan".

Untuk memperlancar pelaksanaan dan pengembangan sistem pendidikan, diperlukan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi Depdiknas (2002 :38) melukiskan dalam skema berikut :



Gambar 3. Konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi (Depdiknas 2002)

D. Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Dalam Pembangunan

Munculnya paradigma baru dalam sistem pendidikan nasional, berdasarkan adanya pengalaman pada saat gerak reformasi 1998 yang melihat bahwa bangsa Indonesia dilanda krisis total yang menepa seluruh aspek kehidupan, bermula dari krisis moneter ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis politik, hukum kebudayaan dan akhirnya menjadi krisis

kepercayaan. Krisis diatas merupakan repleksi dari krisis kebudayaan yang merupakan krisis pendidikan.

Kebudayaan itu merupakan jaringan yang dibentuk dan membentuk pribadi masyarakat Indonesia, oleh sebab itu sistem pendidikan dengan paradigmanya diperlukan untuk dirobah agar mencapai masyarakat madani yang mampu menjawab tantangan internal dan global.

Paradigma merupakan suatu pola /model berfikir yang dianut oleh sekelompok manusia baik pemimpin atau kelompok ilmuan didalam melihat suatu perkembangan, dan paradigma pendidikan tidak sekedar menempatkan manusia sebagai alat produksi, tetapi dipandang sebagai sumberdaya yang membawa pendidikan sebagai proses pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Adanya pengembangan proses pembelajaran, mengembangkan suasana kesetaraan melalui komunikasi diologis yang transparan, toleran dan tidak arogan seharusnya terwujud suasana yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk aktif dan berdialog dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan diri dan potensinya.

Beberapa pendapat para ahli tentang paradigma baru pendidikan Aunurrahman (2009), misalnya :

1. Menurut Goldsmith (1996) bahwa dalam proses pembejararan berupaya selalu mendorong sikap positif dan harus berusaha untuk selalu saling menghargai dan menghormati pendapat atau pandangan orang lain , dan mampu menyelesaikan perbedaan yang secara harmonis dan rasional.
2. Gordon (1997), guru memegang peran srategis terutama dalam pembentukan watak bangsa melalui perkembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan.
3. Balitbang Diknas 19 April 2005, secara filosofis pendidikan ditantang untuk melakukan redefinisi tentang tujuan, fungsi dan hakekat pendidikan yang berperan sebagai ” *human*

educaton for all human being” Pendidikan harus memiliki keseimbangan dalam perannya membangun peserta didik sebagai warga dunia, warga bangsa dan warga masyarakat dalam perkembangan global satu sisi dan akar budaya konteks lokal disisi lain yang berdimensi masa depan dengan hal-hal yang berdimensi masa kini.

4. Adanya gerakan *Education For All*”yaitu pendidikan yang”telah merupakan kebutuhan pokok (*basic neet*) didalam kehidupan manusia.
5. Komisi Pendidikan untuk Abad XXI (Unesco 1996) bahwa pendidikan bertumpu pada 4 pilar, yaitu ; a). *Learning to know*, b). *Learning to do*, c). *Learning to live to gether*, *Learning to live to with others*, dan, *Learning to be*.

Learning to know adalah upaya memahami insrtumen pengetahuan baik dari alat maupun sebagai tujuan diharapkan dapat memberikan kemampuan untuk memahami berbagai aspek lingkungan agar mereka dapat hidup dengan harkat dan martabatnya dalam rangka mengembangkan ketrampilan kerja dan berkomunikasi dengan berbagai fihak yang diperlukan untuk memperkaya pengetahuan dirinya dengan berbagai pengalaman yang ditemukan dalam kehidupannya. Upaya ini berlangsung secara terus menerus dengan konsep belajar sepanjang hayat.

Learning to do lebih ditekankan pada bagaimana mengajarkan anak untuk mempraktekan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mengadaptasikan pengetahuan dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan dan dapat menyesuainkannya dengan kebutuhan dinamis masa mendatang dengan melahirkan usaha baru atau pekerjaan baru.

Learning to live to gether, *Learning to live to with others*, pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih dan membimbing melalui komunikasi yang baik, menjauhi prasangka-prasangka yang buruk terhadap orang lain dan menjauhi perselisihan-perselisihan dan konflik. Persaingan dalam misi harus dipandang sebagai upaya yang sehat untuk mencapai keberhasilan, bukan sebaliknya persaingan justru mengalahkan nilai-nilai kebersamaan

bahkan menghancurkan orang lain untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian diharapkan kedamaian dan keharmonisan hidup benar-benar dapat diwujudkan.

Learning to be bahwa prinsip fundamental pendidikan hendaklah mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan seutuhnya, setiap orang, jiwa dan raga, intelegensi, kepekaan, rasa etika, tanggung jawab pribadi dan nilai-nilai spritual hendaklah untuk berfikir mandiri dan kritis mampu membuat keputusan sendiri dalam menentukan sesuatu yang diyakini harus terlaksana.

Menurut Tilaar (2009, 64) bahwa ada 4 (empat) indicator perkembangan system pendidikan nasional yaitu “Popularisasi pendidikan, Sistematisasi pendidikan, proliferasi pendidikan, dan politisasi pendidikan. yang akan diuraikan dalam materik berikut ini :

Tabel 2. Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional

Indikator Perkembangan Sisdiknas	ERA MASYARAKAT INDONESIA BARU		
	Paradigma (Baru)	Usulab Program Pasca-Krisis	Usulan program 2000 – 2004
1. Popularitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan yang mutu adalah pendidikan yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. 2. Pendidikan yang bermutu telah merupakan kebutuhan rakyat banyak. Oleh sebab itu partisipasi keluarga & masy. dalam penyelenggaraan, investasi, evaluasi pendidikan semakin meningkat. 3. Investasi pend. sector pemerintah ditingkatkan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanggulangi putus sekolah akibat krisis dengan melanjutkan program JPS dengan memperbaiki oraganisasi pelaksanaannya. 2. Meningkatkan kinerja guru dan tenaga pendidikan sejjalan dengan memperhatikan kesejahteraan sosialnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan mewujudkan pendidikan berkualitas dengan member insentif pada partisipasi masyarakat. 2. Menyelenggarakan pendidikan guru yang berkualitas. 3. Menyiapkan SDM pendidikan yang professional.

Indikator Perkembangan Sisdiknas	ERA MASYARAKAT INDONESIA BARU		
	Paradigma (Baru)	Usulab Program Pasca-Krisis	Usulan program 2000 – 2004
	dijadikan komitmen politik.		
2. Sistematisasi Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pematapan system pendidikan nasional diprioritaskan kepada pemberdayaan lembaga dengan memberi otonomi yang luas. 2. Mengembangkan system pendidikan nasional yang terbuka bagi keragaman dalam pelaksanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah: SDM, organisasi, fasilitas, program kerja sama antar lembaga di daerah. 2. Debirokratisan penyelenggaraan pendidikan dan secara bertahap memberikan otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan kepada daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan nasional secara bertaha[, dimulai pada tingkat provinsi dengan sekaligus mempersiapkan sarana, SDM, dan dana yang memadai pada tingkat kabupaten. 2. Perampingan birokrasi pend. dgn restrukturisasi Departemen Pendidikan Nas. agar lebih efisien. 3. Menghapus berbagai peraturan perundangan yang menghalangi inovasi dan eksperimen. Melaksanakan otonomi lembaga pendidikan. 4. Revisi atau mengganti UU No.2 Tahun 1989 dgn peraturan perundangan pelaksanaan
3. Proliferasi Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan nasional ikut serta dalam mendidik manusia Indonesia sebagai insane politik yang demokrasi yaitu yang sadar akan hak-hak serta 	Peningkatan secara optimal dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pelatihan baik kepunyaan masyarakat maupun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan partisipasi masyarakat terutama di daerah, dalam kesadarannya terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk

Indikator Perkembangan Sisdiknas	ERA MASYARAKAT INDONESIA BARU		
	Paradigma (Baru)	Usulab Program Pasca-Krisis	Usulan program 2000 – 2004
	<p>kewajibannya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab.</p> <p>2. Pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga profesional dalam berbagai tingkatan diorientasikan terutama pada kebutuhan daerah dan kebutuhan pasar kerja.</p>	<p>pemerintah untuk menanggulangi pengangguran akibar krisis.</p> <p>3. Memperbanyak lembaga-lembaga pelatihan praktis di daerah agar lahir SDM yang produktif dan sejalan dengan itu menahan arus urbanisasi</p>	<p>membangun masyarakat Indonesia baru.</p> <p>2. Suatu wadah masyarakat diperlukan untuk menyalurkan keterlibatan masyarakat tersebut.</p> <p>3. Menjalin kerja sama yang erat antar lembaga pelatihan dgn dunia usaha.</p>
4. Politisasi Pendidikan	<p>1. Pendidikan nasional ikut serta dalam mendidik manusia Indonesia sebagai insane politik yang demokratis yaitu yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab.</p> <p>2. Masyarakat, termasuk keluarga, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.</p>	<p>1. Membersihkan birokrasi Departemen Pendidikan Nasional dari kepentingan-kepentingan politik dengan menerapkan system merit dan professional.</p> <p>2. Menegakkan disiplin yang bertanggung jawab dalam lembaga-lembaga pendidikan.</p> <p>3. Menyelenggarakan pendidikan budi pekerti.</p>	<p>1. Depolitisasi pendidikan nasional Komitmen politik dari masyarakat dan pemerintah untuk membebaskan pendidikan sebagai alat kekuasaan.</p> <p>2. Meningkatkan harkat profesi pendidikan dengan meningkatkan mutu pendidikannya, syarat-syarat profesi disertai dengan renumerasi profesi pendidik yang memadai.</p>

(Sumber : Tilaar, 2004; 81-83)

E. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) 6 Tahun dan Sekolah menengah pertama (SMP) 3 tahun, wajib belajar pendidikan dasar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah ini dalam program pemerintah yang sudah tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003.

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Adapun program pelaksanaan penuntasan Wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Diknas). yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan INPRES No. 5 Tahun 2006 menyatakan:

1. Meningkatkan presentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/ pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008.
2. Meningkatkan presentase peserta didik sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah/ pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008
3. Menurunkan prosentase penduduk buta aksara usia 15 tahun keatas sekurang-kurangnya menjadi 5 % pada akhir tahun 2009.

Sejalan dengan INPRES nomor 5 tahun 2006 di atas deklarasi Dakar mengemukakan, bahwa menjelang tahun 2015

semua anak khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik.

Disamping itu mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan. Selanjutnya rencana aksi nasional dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah tercapainya peningkatan sebesar 50 % pada tingkat keniraksaraan orang dewasa

F. Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan mustahil tanpa ada sarana prasarana yang memadai dan memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan optensi fisik, kecerdasan intelektual , sosial, emosional dan kejiwaan peserta ddidik, hal ini terungkap dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003.

Sarana Dan Prasarana Pendidikan dimaksud yaitu sarana fisik sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 misalnya :

1. Ada gedung sekolah
2. Ruang kelas
3. Ruang perpustakaan
4. Ruang labotarium IPA
5. Ruang pimpinan
6. Ruang guru
7. Ruang tata usaha

8. Tempat beribadah
9. Ruang Konseling
10. Ruang usaha kesehatan sekolah (UKS)
11. Ruang organisasi kemahasiswaan
12. Toilet / Jamban
13. Gudang
14. Ruang sirkulasi
15. Tempat bermain / Berolah raga

Selain hal diatas sarana fisik sekolah yang tidak kalah pentingnya dan langsung menunjang kegiatan belajar mengajar misalnya : 1) Meja kursi 2).papan tulis 3)Buku pelajaran,4).Alat peraga 5). OHP/Transparan, 6).LCD, 7). Komputer (Sumitro, 2000 : 79).

BAB IV

PARTISIPASI DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

A. Partisipasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Berdasarkan undang –undang nomor 22 tahun 2003 pasal 56 menyatakan bahwa : Dewan pendidikan merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan beranggotakan unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Dan komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan

Keberadaan Dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan sarana partisipasi nyata yang bias digunakan oleh masyarakat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, karena menurut Depdiknas 2007; bahwa partisipasi merupakan keterlibatan secara aktif warga sekolah dan masyarakat baik secara individu maupun secara kolektif, secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengevaluasian pendidikan diharap mendapat mendorong warga masyarakat sekitar dalam menggunakan haknya menyampaikan pendapat untuk kepentingan sekolah. Keterlibatan langsung seperti ini dapat membuat masyarakat lebih merasa bertanggung jawab atas kemajuan pendidikan tersebut.

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi komite sekolah dalam pelaksanaan di SMP adalah :

1. Memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada SMP mengenai (RAPBS), kriteria kinerja SMP, kriteria , tenaga kependidikan kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, dan hal lain yang terkait dengan pendidikan.

2. Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan
3. Mengalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
4. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan/program/penyelenggaraan dan keluaran pendidikan
6. Melakukan kerja sama dengan masyarakat, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

B. Partisipasi dan Keberhasilan Pembangunan Pendidikan

Menurut Tilaar (2009) Dalam rangka membangun masyarakat Indonesia baru yaitu masyarakat madani Indonesia, maka sistem pendidikan perlu diaktualisasikan dalam paradigma baru dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

1. Sumberdaya penunjang yang memadai. “Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikannya (*community based education*)
2. Demokratisasi proses pendidikan
3. Sumberdaya pendidikan yang profesional

Orientasi pembangunan pada pemerintah sentralistik dan desentralistik berbeda dalam konteks untuk apa suatu pembangunan atau kebijakan dirumuskan. Bila yang pertama, pembangunan seringkali justru digunakan untuk kepentingan pemerintah itu sendiri dan sedikit yang diberikan kemanfaatannya kepada masyarakat, pada pemerintah desentralistik pembangunan ataupun kebijakan idealnya dirumuskan justru untuk memenuhi kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kelemahan pada pemerintahan desentralistik, seringkali kebijakan berjalan lambat karena harus memenuhi aspirasi dari berbagai komponen dan lapisan masyarakat, sedangkan pada pemerintahan sentralistik, suatu kebijakan bisa dijalankan dengan cepat. Namun demikian, secara ideal hasil yang diharapkan dari dua pola perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di atas, pada pemerintahan yang menganut desentralisasi lebih memenuhi aspirasi publik secara demokratis dibandingkan pendekatan pertama.

Untuk melaksanakan pembangunan daerah secara tepat, efektif dan efisien, dibutuhkan kredibilitas sumberdaya manusia masyarakat itu sendiri, dan kualitas aparatur pemerintahan. Disini dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah yang mampu merespon persoalan masyarakat setempat. Pembangunan pendidikan merupakan tugas yang terbebankan kepada seluruh masyarakat di daerah, tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah kabupaten atau kota saja, melainkan juga tugas dari masyarakat untuk mengarahkan, menentukan dan mengontrol proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Menurut Diana Conyers 1954 (Suparjan, 2005 : 53) menyatakan ada tiga alasan utama partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan mempunyai sifat penting:

"Pertama, partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat.

"Kedua, bahwa masyarakat akan lebih percaya proyek atau program pembangunan jika merasa terlibat dalam proses persiapan perencanaan.

"Ketiga, partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan.

Dari ketiga alasan diatas, menunjukan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan program mutlak dilaksanakan. Kerena dengan pelibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab, dan handarbeni terhadap keberlanjutan pembangunan

C. Sosiologi Sebagai Pendekatan Studi Pendidikan

Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki lapangan penyelidikan, sudut pandang, metode dan susunan pengetahuan. Obyek penelitian adalah tingkah laku manusia dalam kelompok, sudut pandangnya ialah memandang hakekat masyarakat kebudayaan dan sedangkan susunan pengetahuan dalam sosiologi terdapat konsep-konsep dan prinsip-prinsip mengenai kehidupan kelompok sosial, kebudayaannya, perkembangan membangun kepribadian manusia melalui peranan yang dilakukan dalam kehidupan kelompok. Dilain pihak sosiologi pendidikan merupakan suatu cabang ilmu (dari ilmu Jiwa pendidikan) yang membahas proses interaksi sosial anak-anak mulai dari keluarga, masa sekolah sampai dewasa serta dengan kondisi- kondisi sosial kultural yang terdapat didalam masyarakat dan negara.

Menurut ZainudinMaliki (2008 : 4) bahwa ”sosiologi merupakan bidang kajian yang memiliki implikasi penting terhadap tumbuh berkembangnya manusia dalam masyarakat, termasuk tumbuh kembang mereka dalam dunia pendidikan, Sosiologi juga membantu upaya melakukan perubahan dan reformasi sosial melalui berbagai cara”

Atas dasar pemikiran seperti diatas maka sosiologi pendidikan memberi jalan yang mendekatkan kepekaan kita melalui nilai-nilai, institusi, budaya dan kecendrungan yang terjadi dimasyarakat dan dalam dunia pendidikan , termasuk di dalamnya membantu melihat pendidikan dan relasinya dengan masyarakat.

Sosiologi pendidikan dapat membantu memahami, perencanaan, proses implementasi dan implikasi penerapan program maupun kebijakan pendidikan tertentu, serta dapat memberi sumbangan pencerahan, menawarkan kepada setiap orang maupun kelompok mana saja yang tengah berusaha melakukan perubahan dalam penyelenggaraan proses pendidikan.

Adapun tujuan sosiologi pendidikan di Indonesia ialah (Abu Ahmadi, 2007 : 10) :

1. ”Berusaha memahami peranannya adalah harus bisa menjadi suri teladan dalam masyarakat sekitarnya dengan mengadakan sosialisasi intelektual untuk memajukan kehidupan di dalam masyarakat.
2. Untuk memahami seberapa jauh guru dapat membina kegiatan sosial anak didiknya untuk mengembangkan kepribadian anak.
3. Untuk mengetahui pembinaan ideologi Pancasila dan kebudayaan nasional Indonesia dilingkungan pendidikan dan pengajaran.
4. untuk mengintegrasikan kurikulum dengan masyarakat sekitar agar pendidikan mempunyai kegunaan praktis didalam masyarakat, dan negara seluruhnya.
5. Untuk menyelidiki kekuatan masyarakat, yang bisa menstimulir pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak.
6. Memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan ilmu pendidikan”.

Durkheim mengemukakan yang dikutip oleh Adiwikarta (1988: 11) bahwa ” para sosiolog sepakat bahwa sosiologi pendidikan adalah cabang dari ilmu sosiologi, dimana pusat perhatiannya terletak pada mempelajari struktur dan organisasi pendidikan serta proses yang terjadi dalam institusi atau sistem pendidikan dengan sistem kehidupan sosial lainnya.”

Menurut Tilaar (2000) dalam perkembangan pendidikan dewasa ini terdapat lima aliran besar :

1. Aliran Fungsionalisme

Fungsi pendidikan masa kini adalah tranmisi kebudayaan dan mempertahankan tatanan sosial yang ada. Masa depannya dipersiapkan dengan mengajar

fungsi-fungsi dalam masyarakat masa depan. Tokoh dalam aliran ini adalah Durkheim dan Parsons.

2. Aliran Kulturalisme

Fungsi pendidikan masa kini sebagai upaya merekonstruksikan masyarakat: Pendidikan berfungsi meratakan masyarakat berdasarkan fungsi-fungsi budaya universal dengan berdasarkan budaya lokal yang berkembang ke arah kebudayaan nasional dan kebudayaan global. Tokoh dalam aliran ini adalah Brameld dan Kihajar Dewantara.

3. Aliran Interpretatif

Tugas pendidikan adalah mengajarkan berbagai peran dalam masyarakat melalui program dalam kurikulum. Untuk masa Depan, pendidikan berfungsi menghilangkan berbagai bias budaya dan kelas-kelas sosial yang membedakan antara kelompok elit dengan rakyat jelata yang miskin. Tokoh dalam aliran ini Berstein.

4. Aliran Kritis

Ada dua kelompok aliran kritis yaitu menganut teori konflik, fungsi pendidikan dilihat sebagai reproduksi tatanan ekonomi yang sedang berjalan, untuk mengupayakan pemerataan ekonomi melalui perjuangan kelas. Tokohnya adalah Marx dan Bowels. Sedangkan kaum tertindas dengan mengembangkan keaksaraan kritis bagi rakyat banyak. Tokohnya adalah Freire, Gyroux.

5). Aliran Pascamodern

Pendidikan masa kini adalah transmisi ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan masyarakat masa depan perlu menghargai kebinekaan dan keragaman pendapat. Fungsi pendidikan adalah membina pribadi-pribadi yang bebas merumuskan pendapat dan menyatakan pendapatnya sendiri dalam

berbagai perspektif. Tokoh dalam aliran ini adalah Derrida, Foucault dan Gramsci.

Dalam kaitan ini perlu ada lembaga atau struktur organisasi dalam lembaga pendidikan dimana masyarakat ikut berpartisipasi tidak hanya dalam menanamkan investasi yang berupa SPP, pajak dan sebagainya, tetapi juga ikut serta dalam merencanakan kurikulum pendidikan, Evaluasi pendidikan serta hal-hal yang menyangkut proses belajar juga sarana prasarana belajar.

D. Fenomenologi

Immanuel Kant memakai istilah fenomenologi dalam karyanya prinsip-prinsip pertama Metafisika (1786). Maksudnya adalah untuk menjelaskan kaitan antara konsep fisik gerakan dan kategori modalitas dengan mempelajari ciri-ciri dalam relasi umum dan representasi, yakni fenomena indera-indera lahir.

Pendapat Schutz, 1974 (Denzin dan Lincoln, 2009: 337) bahwa : “Fenomenologi sosial adalah untuk merumuskan ilmu sosial yang mampu menafsirkan dan menjelaskan tindakan dan pemikiran manusia dengan cara menggambarkan struktur-struktur dasar, realita yang nampak nyata setiap orang yang berpegang teguh pada sikap alamiah.

Edmund Husserl (Sukarni 2009 : 51) ”memahami fenomenologi sebagai suatu analisis deskriptif serta introspektif mengenai kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman-pengalaman langsung ; religius, moral estetis, konseptual, serta indrawi dan menyelidikannya menekankan watak intensional kesadaran, serta tanpa mengandaikan praduga-praduga konseptual dari ilmu-ilmu empiris”.

Fenomenologi dalam Inggris ; Phenomenologi, berasal dari bahasa Yunani Phainomenon dan logos. Phainomenon berarti tampak dan Phainon berarti memperhatikan. Sedangkan logos

berarti kata , ucapan, rasio pertimbangan. Dengan demikian bahwa fenomenologi dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomena atau apa-apa yang tampak. Dalam arti sempit, ilmu tentang gejala-gejala yang menampakan diri pada kesadaran kita.

Hegel 1807 (Sukarni 2009 : 50) memperluas pengertian fenomenologi dengan merumuskannya sebagai ilmu mengenai pengalaman kesadaran, yakni suatu pemaparan dialektis perjalanan kesadaran kodrati menuju pada pengetahuan yang sebenarnya, dan fenomenologi menunjukkan proses menjadi ilmu pengetahuan pada umumnya dan kemampuan mengetahui sebagai perjalanan jiwa sebagai bentuk-bentuk atau gambaran kesadaran bertahap untuk sampai kepada pengetahuan mutlak.

Bersumber dari pandangan Max Weber yang diteruskan oleh Irwin Deutcher dalam Moleong (1993 : 31) menyatakan bahwa ; “fenomologis berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak bagi orang –orang itu sendiri, bagi mereka yang penting ialah kenyataan yang terjadi sebagai yang dibayangkan atau difikirkan oleh orang itu sendiri”.

BAB V

PERUBAHAN SOSIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Perubahan Sosial

Ada beberapa definisi tentang perubahan sosial yang dikemukakan oleh para ahli di bawah ini misalnya :

1. Basrowi (2005 : 154) mengemukakan bahwa perubahan sosial merupakan proses wajar yang berlangsung terus menerus, namun tidak semua perubahan itu menuju perubahan yang positif, sehingga yang kaitannya dengan modernisasi yaitu perubahan sosial menjadi jalan pintu yang membuka manusia kearah kemajuan.
2. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (Basrowi, 2005 : 155). berpendapat, bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan –perubahan pada lembaga-lembaga masyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di antaranya kelompok dalam masyarakat .
3. Maclver (Basrowi, 2005 :156), mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial (Sosial relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial.
4. Davis (Basrowi, 2005 : 157) berpendapat, bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan meliputi perubahan dalam kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, aturan-aturan, serta bentuk organisasi sosial.
5. Karl Marx menyatakan bahwa manusia berawal dari sebuah kesempurnaan (*the holy spirit of god*) kemudian masuk ke dunia yang penuh keterbatasan, kotor serta tidak suci, sebenarnya yang mengubah masyarakat dari waktu ke waktu adalah materi. Konsepnya sangat dikenal sebagai Historical

Materialism mengungkapkan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materinya, bukan pada idealnya

Dari beberapa pendapat diatas bahwa perubahan social merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat meliputi berbagai aspek kehidupan, sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat dan telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat , merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilan.

B. Konsep Perubahan Sosial

Ada beberapa konsep perubahan sosial yang dikemukakan oleh para ahli dibawah ini misalnya menurut :

1. Karl Marx menyatakan bahwa manusia berawal dari sebuah kesempurnaan (the holy spirit of god) kemudian masuk ke dunia yang penuh keterbatasan, kotor serta tidak suci , sebenarnya yang mengubah masyarakat dari waktu ke waktu adalah materi.

Konsepnya sangat dikenal sebagai Historical Materialism mengungkapkan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materinya, bukan pada idealnya.

Perubahan social menekankan pada kondisi materialistis berpusat pada perubahan-perubahan cara atau teknik produksi material sebagai sumber perubahan social budaya, mencakup perkembangan teknologi baru atau perkembangan lain dari kegiatan produksi, kontradiksi dapat muncul karena cara produksi dan hubungan yang muncul dari hubungan buruh dan majikan.

2. Emile Durkheim konsep perubahan social yaitu bertolak dari konsep perjuangan politik yang moderat, karena ia mencoba untuk menjauhkan diri dari perpecahan, lazimnya dalam seni politik/ sikap politiknya sangat jelas yaitu menolak konservatisme dan menolak revolusioner.
3. Marx weber konsep perubahan social ada pada kondisi histories yang melekat pada perilaku manusia secara luas

dari bentuk resionalisme yang dimiliki secara terus menerus.

Ada tiga tema jika kita mau mempelajari perubahan social lingkungan masyarakat misalnya :

Pertama : Perubahan social menekankan pada kondisi matrialistis berpusat pada perubahan-perubahan cara atau teknik- teknik produksi materiel sebagai sumber perubahan social budaya.

Kedua: Dapat dinyatakan bahwa manusia menciptakan sejarah tematerialnya sendiri selama mereka berjuang menghadapi lingkungannya.

Ketiga : Perubahan social utama adalah kondisi-kondisi material dan cara produksi disuatu fihak dan hubungan-hubungan serta norma pemilikan, mulai dari komunitas bangsa primitif sampai bentuk kapitalis modern.

Dalam fikiran Weber ada 4 (empat) macam model untuk menjadi acuan misalnya :

1. *Tradisional Rationality* : Yang menjadi perjuangan nilai yang menjadi tradisi kehidupan.
2. *Value Oriented Rationality* : Suatu kondisi dimana masyakat melihat nilai sebagai potensi hidup, sekalipun tidak aktual dalam kehidupan kebiasaan yang didukung oleh kehidupan agama serta budaya yang berakar pada tradisi.
3. *Affective Rationality* : Jenis Rational yang bermuara dalam emosi yang sangat mendalam dan ada hubungan khusus yang tidak bisa diterangkan diluar lingkaran. Misalnya suami istri dan anak.
4. *Purposive Rationality* : Yang lebih dikenal dengan rationalitas Insrumental . Bentuk rational yang paling tinggi dengan unsur pertimbangan pilihan yang rational hubungan dengan tujuan tindakan dan alat yang dipilihnya.

Ada beberapa Persamaan pendapat Dari *Karl Max, Marx Weber dan Emil Durkhem*, menyangkut hal dibawah ini dari segi :

1. *Materialisme* : Melihat economic structure sebagai awal dari semua kegiatan manusia / pengerak perubahan yang akan memimpin perubahan termasuk proses perubahan sosial.
2. *Idealisme* : Gerakan kehidupan bermula dari sesuatu yang tidak sempurna menuju sempurna melalui kontradiksi (*contradictio*), alasannya bahwa dengan adanya temuan, pengamatan dan landasan rasional yang berbeda orang bisa mengkritisi suatu pernyataan dan pemikiran.
3. *Metodologi* : Hakekat jalan kebenaran yang dapat di lakukan oleh pendekatan ilmu pengetahuan.
4. *Dunia Material* : Tidak setuju dengan penempatan manusia sebagai robot, karena individu memiliki tempat yang terhormat.
5. Proses Perubahan Sosial : Terjadi secara wajar (*naturally*) , gradual bertahap serta tidak pernah terjadi secara radikal atau revolusioner, dengan proses reproduktion dan proses *transpormation*.
6. Sama-sama menolak gagasan bahwa masyarakat cenderung pada beberapa konsensus dasar atau harmoni, dimana struktur masyarakat bekerja untuk kebaikan setiap orang.

Perbedaan pendapat atau yang menjadi paradigma Dari *Karl Max, Marx Weber dan Emil Durkhem* menyangkut hal-hal dibawah ini dari segi:

Assumption and Beliefs Concerning	Emile Durkheim (1858- 1917)	Max Weber (1864- 1920)	Karl Max (1818-1883)
1. Aliran Pemikiran / Konsep	Positifisme / Teori Konsensus	Konvensionalisme/ Tindakan	Realisme dan Teori Konflik
2. The Image Individual	Negatif	Positif	Positif, Lingkungan Yang Membuat Jahat
3. The Image Of Society	Collecting consciousness Eksplanasi tentang gejala (Individual passions and moral restraint)	A Network of Meaning (The relationships between social actions and the social structure and institutions of capitalism)	Structure of Power Relationships (Dialectical relationships between people and the economic structure of capitalism)
4. The Image Theory And Sociological Theory	Menjelaskan tentang kesadaran kolektif	Interpretation Emphaty 'memahami' verstehen	Model (Analogi Model dll). Menjelaskan hubungan social
5. Metodologi Implikasi (Hakekat jalan kebenaran yang dapat dilakukan oleh pendekatan ilmu)	Kuantitatif Selalu bertolak dari Parameter atau struktur- struktur masyarakat modern	Kualitatif Mengadakan eksploitasi subyektif Nilai-nilai perilaku beragama setiap individual anggota masyarakat.	Analogi Model
6. Nama lain yang diberikan oleh Purdeu (1986) dan George (1985)	- Order Paradigm (paradigma keteraturan) - Fakta Sosial (Social Facts)	- Pluralist Paradigm (Paradigma Kemajemukan) - Social Definition Paradigma	- Conflict Paradig (Paradigma Konflik).

C. Teori Interaksi Sosial / Simbolik

Dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan untuk pengembangan masyarakat secara utuh, maka diperlukan adanya komunikasi yang intensip dengan masyarakat agar tau apa yang menjadi kebutuhan bersama dan bisa diselesaikan bersama dengan cara membuat perencanaan yang matang, supaya pelaksanaanya bisa berjalan dengan lancar dan evaluasi digunakan untuk pengembangan.

Komunikasi yang berlangsung antara individu maupun antar kelompok merupakan interaksi sosial yang melahirkan kehidupan sosial dan merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Dalam interaksi sosial ada beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu :

1. Situasi sosial saat terjadi interaksi,
2. Norma kelompok,
3. Masing – masing individu mempunyai tujuan pribadi,
4. Situasi mengandung arti bagi invidu sesuai penafsiran terhadap situasi tersebut.

Interaksi sosial pada hekekatnya adalah interaksi simbolik. manusia berinteraksi dengan yang lain dengan cara menyapaikan simbol, yang lain memberi makna atas simbol tersebut. Inti pandangan pendekatan ini adalah individu , para ahli dibelakang perseptif ini mengatakan bahwa individu merupakan hal yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu lain.

George Herbet Mead (1863-1931). Charles Horton Cooley (1846 -1929), yang memenuhi pernusatn perhatiannya pada interaksi antara individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa individu- individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, yang didalamnya berisi tanda-tandan , isyarat dan kata-kata sosiologi .

D. Teori Konflik.

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya ,menurut Webster 1966 (Dean G.Pruit.2004 : 10) menyatakan “ Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara stimulan.”

Teori ini dapat digunakan sebagai wawasan dan model untuk menyelesaikan konflik atau segala hambatan yang terjadi karena ada perbedaan pandangan atau persepsi seseorang atau kelompok masyarakat ataupun pemerintah atas pelaksanaan pembangunan pendidikan .

Ada tiga model konflik dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga model konflik umum yang dikemukakan oleh (Pruitt & Gahagan, 2004 : 200) yaitu :

Pertama : model agresor-defender (model penyerang-bertahan). Kedua ; model spiral-konflik, dan Ketiga; model perubahan structural.

Meskipun ketiga model ini memiliki beberapa kelebihan (masing-masing sangat berperan untuk beberapa episode eskalasi), model yang pertama pada umumnya terlalu diberi penekanan dan model yang terakhir sangat kurang diberi penekanan, yang akan diulas dibawah ini.

E. Model Agresor-Defender

Model *agresor-defender* menarik garis pembeda di antara kedua pihak yang berkonflik. Salah satu pihak, sang “agresor” (penyerang), dianggap memiliki suatu tujuan atau sejumlah tujuan yang mengakibatkannya terlibat di dalam konflik bersama pihak lainnya, sang “defender”(pihak yang bertahan).

Agresor biasanya mulai dengan taktik-taktik contentious yang ringan karena mengingat ongkos yang harus dikeluarkannya bila terjadi eskalasi. Tetapi bila tidak berhasil, ia akan berpindah ke taktik-taktik yang lebih berat, dan berlanjut ke eskalasi. Ini akan terus berlanjut samapai tujuannya tercapai atau samapi suatu titik di mana ongkos yang diantisipasi akan timbul (bila eskalasi terus berlanjut) diperkirakan melampaui nilai pencapaian tujuannya. Defender hanya semata-mata bereaksi. Ia akan semakin meningkatkan reaksinya sebagai respons terhadap eskalasi agresor terhadapnya. Eskalasi terus berlanjut sampai sang agresor menang atau menghentikan upayanya.

Istilah “agresor” dan “defender” didalam model ini tidak dimaksudkan sebagai tindakan evaluatif. Dengan perkataan lain, istilah-istilah ini tidak menyiratkan bahwa salah satu pihak salah dan pihak lainnya benar di dalam kontroversi yang terjadi. Agresor adalah pihak yang melihat adanya kesempatan untuk mengubah hal-hal yang searah dengan kepentingannya, sedangkan defender adalah pihak yang berusaha menolak perubahan tersebut.

Model agresor-defender ini membantu menjelaskan salah satu tahapan di dalam perkembangan Perang Dingin, yaitu suatu titik ketika Uni Soviet mengadopsi tujuan untuk memblok unifikasi Jerman Barat. Pada awalnya Soviet menerapkan taktik ringan dalam bentuk protes. Ketika tindakan ini tidak berhasil, mereka berpindah ke taktik yang lebih berat dengan menginterupsi secara sporadic komunikasi antara Berlin dengan Jerman Barat. Ketika tindakan ini juga tidak berhasil, dan pihak Barat mengintroduksi reformasi mata uang sebagai tindak lanjut sumbangannya bagi unifikasi Jerman, mereka menerapkan taktik yang ekstrem berat, yaitu malakukan blockade total terhadap Berlin. Penjelasan ini sangat meyakinkan.

F. Model Spiral-Konflik

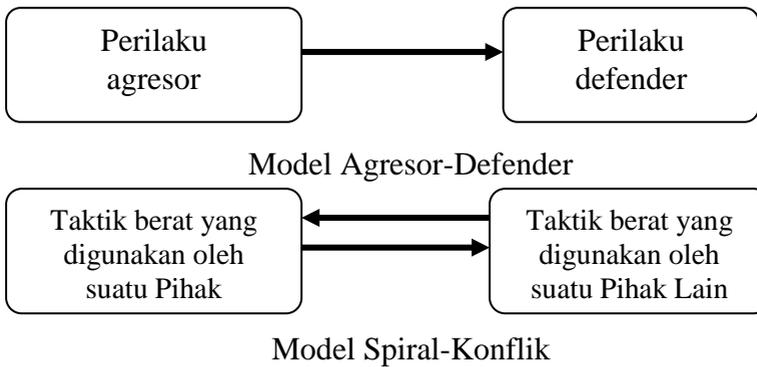
Konflik menghasilkan eskalasi taktik ketika – seperti sering terjadi – setiap reaksi lebih keras dan intens daripada reaksi sebelumnya. Hal ini juga memberikan sumbangan terhadap terjadinya eskalasi taktis, karena ada kenyataannya sekali Model spiral-konflik eskalasi ditemukan dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh banyak ahli teori (North, Brody & Holsti, 1964; Osgood, 1962, 1966; Richardson, 1967). Model ini menjelaskan bahwa eskalasi merupakan hasil dari suatu lingkaran setan antara aksi dan reaksi. Taktik-taktik contentious yang dilakukan oleh Suatu Pihak mendorong timbulnya respon contentious dari Pihak Lain. Respon ini memberikan sumbangan terhadap tindakan contentious lebih lanjut dari Pihak yang bersangkutan. Ini membuat lingkaran konflik menjadi utuh dan kemudian mulai membentuk lingkaran berikutnya.

Ada dua kelompok besar spiral-konflik. Didalam spiral bersifat balas-membalas (retaliatory), masing-masing pihak menjatuhkan hukuman kepada pihak yang lain atas tindakan-tindakannya yang dianggap tidak menyenangkan (aversif). Salah satu contohnya adalah adu argumentasi yang diikuti dengan saling membentak kemudian diikuti dengan adu jotos. Didalam spiral densif, masing-masing pihak memberikan reaksi dalam rangka melindungi diri dari ancaman yang dirasakannya ada didalam tindakan defensive pihak lain. Salah satu contohnya adalah perlombaan senjata. Di dalam spiral defensive, masing-masing pihak dapat dianggap sebagai agresor atau defender.

Spiraltaktik berat digunakan, maka ia akan digunakan secara berkelanjutan oleh kedua belah pihak. Bila saya memukul kamu, maka (seperti yang sering terjadi) kamu akan membalas memukul saya, sehingga saya akan memukul kamu lagi, dan seterusnya.

Model spiral-konflik memberikan pemikiran (insight) yang lebih jauh ke dalam dinamika eskalasi Perang Dingin.

Sebagai respons atas tindakan Soviet di Eropa Timur, di Yunani, dan di Turki, Amerika Serikat dan para sekutunya mulai mendirikan Negara bagian Jerman Barat. Sebagai respon atas blockade ini dan semua tindakan lain yang telah dilakukan sebelumnya, AS dan para sekutunya membentuk NATO dan mulai mempersenjatai Jerman Barat. Dan seterusnya. Urut-urutan tindakan di dalam krisis UB, yang dimulai dengan pelemparan batu ke arah jendela kantor pejabat rector dan diakhiri dengan konfrontasi yang memuakkan antara massa mahasiswa dan sejumlah petugas polisi kota, juga mengilustrasikan spiral semacam itu.



Gambar 4.

Model-model agresor-defender dan spiral-konflik dari eskalasi konflik (Dean G Pruitt, 2004 : 2004)

Model agresor-defender dan spiral-konflik diperbandingkan dalam bentuk diagram dalam Gambar 6.1. Didalam analisis mengenai agresor-defender, aliran penyebab hanya satu arah; agresor bertindak dan defender bereaksi. Di dalam analisis spiral-konflik, aliran penyebab bersifat dua arah; masing-masing pihak memberikan reaksi terhadap tindakan pihak lain.

Diagram spiral-konflik tersebut menggambarkan tindakan masing-masing pihak sebagai respons atas tindakan pihak lain yang baru saja dilakukan. Di dalam kenyataan, setiap tindakan merupakan “hasil impresi kumulatif dari semua tindakan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh pihak lain” meskipun tindakan

yang lebih baru biasanya diberi bobot yang lebih besar daripada tindakan yang lebih lama.

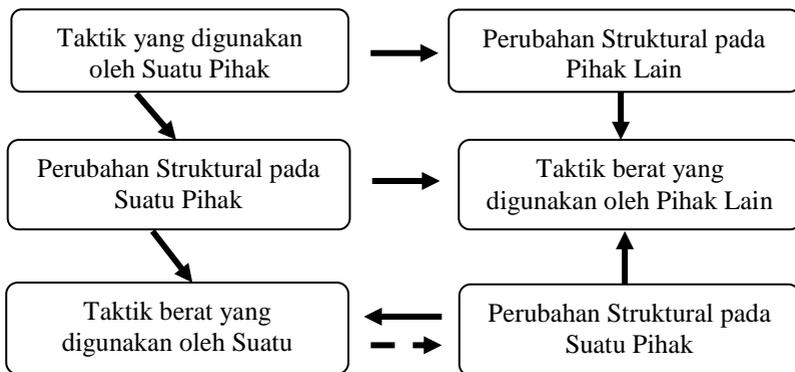
Model spiral-konflik tidak boleh dianggap sebagai versi pengembangan atau sebagai pengganti model eskalasi agresor-defender. Model spiral-konflik ini bisa digunakan bilamana salah satu pihak mengembangkan tujuan yang berbeda dengan tujuan pihak lain dan berusaha mencapai tujuan ini melalui urutan yang bereskalasi. Banyak kasus eskalasi yang mengikuti bentuk ini. Tetapi, bahkan di dalam konflik-konflik sering kali dapat memberikan wawasan tambahan. Cukup sering terjadi bahwa tujuan yang mendorong pihak agresor untuk bertindak merupakan reaksi atas tindakan pihak defender sebelumnya. Hal ini juga sering terlupakan oleh para pengamat yang terlibat, yang menganggap bahwa penyebab konflik adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang hubungan dengan dirinya lebih lemah, atau pihak yang menerapkan taktik-taktik lebih berat atau kurang begitu defensive. Tetapi analisis yang cermat biasanya akan menemukan penyebab yang timbul dari kedua arah.

Kasus yang sesuai dengan hal ini adalah upaya Soviet untuk mencegah unifikasi dan penguatan Jerman Barat. Upaya tersebut berupa sejumlah tindakan protes yang semakin meningkat, yang secara progresif ditotal oleh pihak Barat. Meskipun tindakan-tindakan ini pantas disebut sebagai “agresi” tetapi tindakan-tindakan tersebut juga dapat dianggap sebagai reaksi terhadap upaya pihak Barat untuk memperkuat Jerman. Jadi mereka sebenarnya juga merupakan bagian spiral-konflik yang lebih besar. Demikian juga dengan usaha Jerman untuk menguasai Eropa pada tahun 1940-an, yang dari definisi mana pun pasti dianggap sebagai tindakan agresi. Tindakan dimaksud dapat dianggap sebagai bagian reaksi atas tindakan yang memermalukan Jerman setelah usai Perang Dunia Pertama – sehingga juga merupakan bagian spiral-konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun.

G. Model Perubahan Struktural

Gambaran kita mengenai kekuatan-kekuatan yang mendorong terjadinya eskalasi akan dilengkapi oleh model yang ketiga. Model ini terdapat antara lain di dalam tulisan-tulisan Burton (1962), Coleman (1957), dan Schumpeter (1995, yang dipublikasikan untuk pertama kali pada tahun 1919). Model perubahan structural ini menjelaskan bahwa konflik, beserta taktik-taktik yang digunakan untuk mengatasinya, menghasilkan residu. Residu ini berupa perubahan-perubahan yang terjadi baik pada pihak-pihak yang berkonflik maupun masyarakat di mana mereka tinggal.

Residu ini kemudian mendorong perilaku contentious lanjutan, yang levelnya setara atau lebih tinggi, dan mengurangi usaha untuk mencari resolusi konflik. Dengan demikian, konflik yang tereskalasi merupakan perubahan yang bersifat antededen dan sekaligus konsekuen. Tiga macam bentuk perubahan structural dapat dibedakan, yaitu perubahan psikologis, perubahan dalam kelompok dan kolektif lainnya, dan perubahan dalam masyarakat di sekeliling pihak yang berkonflik



Model

Gambar 5. Model II
Model perubahan structural eskalasi konflik
(Dean G Pruitt, 2004 : 207)

H. Teori Tindakan Sosial

Komunikasi yang berlangsung antara individu maupun antar kelompok merupakan interaksi sosial yang melahirkan kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Dalam interaksi sosial ada beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu : 1) situasi sosial saat terjadi interaksi, 2) norma kelompok, 3) masing – masing individu mempunyai tujuan pribadi, 4) situasi mengandung arti bagi individu sesuai penafsiran terhadap situasi tersebut.

Tindakan individu itu merupakan tindakan social yang rasional, karena teori tindakan social, yaitu individu yang melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman, persepsi pemahaman dan penafsiran atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu. Tindakan social dibedakan menjadi 4 (empat) tipe tindakan :

1. Tindakan social instrumental dilakukan berdasarkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai dengan didasari tujuan yang telah matang dipertimbangkan.
2. Tindakan social berorientasi nilai dilakukan menghitung manfaat dan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu untuk perhitungkan.
3. Tindakan social tradisional termasuk kebiasaan yang berlaku selama ini dalam masyarakat
4. Tindakan Afektif sebagian besar tindakan dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa perhitungan atau pertimbangan yang matang.

I. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan

Hetifah (2009) mengungkapkan bahwa pelibatan masyarakat dalam tahap kegiatan pembangunan sangat diperlukan agar masyarakat lebih memiliki tanggung jawab tentang hal tersebut, serta bagaimana penempatan dan penetapan

tahap –tahap tingkat partisipasi perlu dilakukan melalui proses rembuk yang didasarkan atas potensi yang dimiliki dengan mencapai tujuan yang optimal dalam sumber daya dan pembangunan. Sementara beberapa di pemerintahan lokal dan kelompok elit melihat ini merupakan suatu ancaman karena para inovator yang tidak lempang dalam menjalani perjuangan partisipasi ini.

Adapun tahap-tahap yang dimaksud dalam pembangunan yang berkaitan dengan partisipasi dapat dipilah sebagai berikut :

1. Tahap inisiasi : Partisipasi pada tahap ini pada tingkat kendali penuh berbagi peran dan bersifat konsulatif
2. Tahap perencanaan : merupakan tahap krusial untuk menentukan langkah-langkah berikutnya.
3. Tahap desain : dapat ditawarkan pendekatan inovatif
4. Tahap Konstruktif : Keterlibatan masyarakat disini sangat efektif untuk menghemat biaya karna rasionalisasinya bisa dengan tenaga murah.
5. Tahap operasional dan pemeliharaan : dalam hal ini diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat berperan dalam perawatan dan pengawasannya sesuai dengan kemampuannya.

Sugeng (2008) mengungkapkan bahwa tinggi rendahnya keikut sertaan peserta dalam kegiatan pendidikan banyak ditentukan oleh intensitas keikut sertaanya. Intensitas ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdapat dalam diri (internal), dan faktor yang dari luar (eksternal). Berdasarkan hasil temuannya bahwa intensitas keikut sertaan seseorang dilandasi oleh faktor motivasi dan latar belakang sosial ekonomi.

Zainudin (2006) mengungkapkan temuannya bahwa dalam palaksanaan pembangunan pendidikan komite sekolah kurang dilibatkan atau keikutsertaannya dalam pengambil kebijakan. Peran komite sekolah sekedar memenuhi prosedural dan kurang dilibatkan dalam rangka substansial.

Partisipasi merupakan proses ketika warga masyarakat, selaku individu maupun kelompok sosial dan organisasi,

mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka orang tua, terutama bagi anak-anak generasi penerus bisa ikut bertanggung jawab atas pengembangan kualitas hidupnya melalui pendidikan. Mengingat setiap orang dalam masyarakat dapat memberikan makna yang berbeda terhadap partisipasi sesuai dengan persepsi dan sikapnya dalam menanggapi sesuatu maka sebagai konsekwensinya akan melahirkan tindakan yang berbeda pula, demikian juga dalam dalam pelaksanaannya terutama terhadap pembangunan pendidikan

Sistem stratifikasi yang berlaku di masyarakat akan menuntut atau menghadapi persoalan berbagai cara mengisi posisi yang ada dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengisi posisi tersebut. Tokoh masyarakat adalah posisi yang penting untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat.

Masyarakat mempunyai kemampuan dan kebutuhan yang belum tentu sama / tidak sama, hal inilah yang bisa menimbulkan perbedaan dalam memandang dan berbuat, jika perbedaan berlangsung terus maka terjadilah apa yang dinamakan konflik diantara masyarakat itu sendiri, hal ini disebabkan ada pemahaman atau cara pandang yang berbeda. Hal ini dapat merupakan hambatan dalam membangun masyarakat itu sendiri.

Salah satu aspek yang membedakan masyarakat dengan yang lain adalah kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol yang berupa bahasa, isyarat maupun gerakan tubuh. Komunikasi yang berlangsung antara individu maupun antar kelompok merupakan interaksi sosial yang melahirkan kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Dalam interaksi sosial ada beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu : 1) situasi sosial saat terjadi interaksi, 2) norma kelompok, 3) masing – masing individu mempunyai tujuan pribadi, 4) situasi mengandung arti bagi individu sesuai penafsiran terhadap situasi tersebut.

Sistem Sosial harus memenuhi persyaratan fungsional, antara lain, bahwa sistem sosial harus terstruktur (ditata), didukung sistem lain, dapat memenuhi kebutuhan individu, mendorong partisipasi setiap individu, mampu mengendalikan Perilaku individu maupun kelompok, dan memerlukan bahasa. Setiap individu yang hidup dalam satu (1) yang harus dalam suatu sistem harus mendalami norma sistem sosial tersebut, tokoh masyarakat dan individu yang mendalami norma sistem sosial merupakan proses sosialisasi yang berhasil maka disitulah terjadi adanya perubahan sosial.

Kepatuhan terhadap norma merupakan kesadaran dari dalam diri sendiri tanpa merasa terpaksa. Perilaku individu yang mengikuti norma merupakan refleksi sebagai sebuah bentuk kesadaran dari dalam diri seseorang diperlukan pendidikan. Pentingnya pendidikan bagi anggota masyarakat adalah merupakan investasi masa depan untuk meningkatkan mutu kehidupan.

Prinsip dasar pendidikan menurut Socrates, adalah metode dialektis, metode ini digunakan sebagai dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seseorang belajar berfikir secara cermat, untuk menguji coba diri sendiri untuk memperbaiki pengetahuannya. Dengan pengetahuan dapat berfikir, manusia akan mampu untuk menertipkan, meningkatkan dan mengubah dirinya, sehingga orang sungguh-sungguh mengetahui dan mengerti apa yang benar dan dapat menyadari konsekuensi-konsekuensi akan perbuatan yang benar (Jalaludin dkk. 2007 :77).

BAB VI

PENDIDIKAN INKLUSIF

A. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Inklusif merupakan sebuah kata yang berasal dari terminologi Inggris yakni *inclusion* yang berarti : termasuknya atau pemasukan. Menurut Olsen&Fuller (2003:167), inklusif merupakan sebuah terminologi yang secara umum digunakan untuk mendidik siswa baik yang memiliki maupun tidak memiliki ketidak mampuan tertentu di dalam sebuah kelas reguler. Dewasa ini, terminologi inklusif digunakan untuk mengagaskan hak anak-anak yang memiliki ketidakmampuan tertentu untuk dididik dalam sebuah lingkungan pendidikan (sekolah) yang tidak terpisahkan dari anak-anak lain yang tidak memiliki ketidakmampuan tertentu.

Pendidikan inklusif pada hakekatnya adalah bagaimana memahami segala kesulitan pendidikan yang dihadapi oleh peserta didik. Anak/peserta didik berkelainan misalnya, mereka mendapat kesulitan untuk mengikuti beberapa kurikulum yang ada, atau tidak mampu mengakses cara baca tulis secara normal, atau kesulitan mengakses lokasi sekolah, dan sebagainya. Pendekatan pendidikan inklusif dalam hal ini tidak seharusnya melihat hambatan ini dari sisi anak/peserta didik yang memiliki kelainan, melainkan harus melihat hambatan ini dari sistem pendidikannya sendiri, kurikulum yang belum sesuai untuk mereka, sarana yang tersedia belum memadai, guru yang belum siap melayani mereka dan sebagainya. Dengan demikian untuk merubah yang teresklusikan menjadi terinklusif adalah dengan mengidentifikasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi peserta didik dan mengupayakan sekolah umum/inklusif untuk dapat

meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

UNESCO mencetuskan filsafat Educational for All. Educational for All mengandung makna bahwa pendidikan “ada” untuk semua atau wajib mengakomodasi keberagaman kebutuhan siswa yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus (An Efa Flagship, 2004). Filosofi Educational for All lahir sebagai konsekuensi logis dari adanya pernyataan Salamanca yang menegaskan perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif (UNESCO, 1994).

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, ayat 1 s.d. 4 telah menegaskan bahwa:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Florida State University Center for Prevention & Early Intervention Policy (2002) mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sebuah usaha untuk membuat para siswa yang memiliki ketidakmampuan tertentu pergi ke sekolah bersama teman-teman dan sesamanya serta menerima apa pun dari sekolah seperti teman-teman yang lainnya terutama dukungan dan pengajaran yang didesain secara khusus yang mereka butuhkan untuk mencapai standar yang tinggi dan sukses sebagai pembelajar.

Dari definisi tentang inklusif di atas, kita dapat mengatakan bahwa sekolah inklusif adalah lembaga pendidikan formal yang menyediakan layanan belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak

normal dalam komunitas sekolah reguler di mana setiap anak diterima menjadi bagian dari kelas, diakomodir, dan direspon kebutuhannya sehingga setiap anak mendapat peluang dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya.

Dengan demikian, perlu diingat bahwa pendidikan atau sekolah inklusif bukan sebuah sekolah bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus melainkan sekolah yang memberikan layanan efektif bagi semua (*education for all*). Dengan kata lain, pendidikan inklusif adalah pendidikan di mana semua anak dapat memasukinya, kebutuhan setiap anak diakomodir atau dirangkul dan dipenuhi bukan hanya sekedar ditolerir (Watterdal, 2002).

Berdasarkan definisi di atas, kita dapat mengatakan bahwa dalam sekolah inklusif ada dua kategori siswa yakni siswa yang tidak memiliki ketidakmampuan (*non difabel*) dan siswa yang memiliki ketidakmampuan (*difabel*). Adapun uraian tentang klasifikasi siswa difabel akan dibahas dalam bagian berikut ini.

Berdasarkan kemampuan intelektualnya, peserta didik berkebutuhan khusus atau yang disebut juga dengan peserta didik berkelainan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu (1) peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, (2) peserta didik berkelainan yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Kelompok yang pertama merupakan peserta didik yang dapat mengikuti pendidikan inklusif. Hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri No.22 Tahun 2006 yang berbunyi:

Peserta didik pendidikan inklusif adalah peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Berkelainan dalam hal ini adalah tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras.

Anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif terdiri dari beberapa jenis. Secara garis, jenis kebutuhan khusus tersebut, sebagaimana yang digagas Hallahan dan Kauffman

(1978:13), Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2006) dan Hadiyanto (2009) adalah:

- 1). Tunanetra; 2). Tunarungu; 3). Tunadaksa; 4). Anak yang berbakat/memiliki kemampuan dan kecerdasan luarbiasa; 5). Tunagrahita; 6). Anak yang lamban belajar (*slowlearner*); 7). Anak yang mengalami kesulitan belajarspesifik; 8). Tunalaras; 9). Tunawicara; 10). Autisme; 11). ADHD; 12). Cerebral Palsy(CP); 13). Anak korban narkoba serta HIV/AIDS.

B. Manfaat Pendidikan Inklusif

Hasil penelitian yang dilakukan oleh banyak ahli, ditemukan bahwa pendidikan inklusif memiliki banyak manfaat bagi semua siswa dan personil sekolah karena berfungsi sebagai sebuah contoh atau model bagi masyarakat yang inklusif (Florida State University Center for Prevention & Early Intervention Policy 2002).

Adapun keuntungan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah:

1. Dalam pendidikan dasar maupun menengah, ditemukan bahwa prestasi akademis siswa pada sekolah inklusif sama dengan atau lebih baik dari pada siswa yang berada di sekolah yang tidak menerapkan prinsip inklusi (Baker, Wang, & Walbreg, 1994).
2. Adanya penerapan belajar co-teaching, siswa yang memiliki ketidak mampuan tertentu dan siswa yang lambat dalam menyerap informasi mengalami peningkatan dalam keterampilan sosial dan semua siswa mengalami peningkatan harga diri dalam kaitan dengan kemampuan dan kecerdasan mereka. Siswa yang memiliki ketidakmampuan tertentu mengalami peningkatan harga diri atau kepercayaan diri semata-mata hanya karena belajar di sekolah reguler daripada sekolah luar biasa.
3. Siswa yang tidak memiliki ketidakmampuan tertentu mengalami pertumbuhan dalam pemahaman sosial dan

memiliki pemahaman dan penerimaan yang lebih besar terhadap siswa yang memiliki ketidakmampuan tertentu karena mereka mengalami program inklusif (Freeman & Alkin, 2000).

C. Landasan Pendidikan Inklusif

Ada empat landasan yang harus dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Keempat landasan tersebut antara lain landasan filosofis, landasan religi, landasan historis, dan landasan yuridis.

1. Landasan Filosofis

Setiap bangsa memiliki pandangan hidup atau filosofi sendiri, begitu pula halnya dengan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki pandangan atau filosofi sendiri, maka dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif harus diletakkan atas dasar pandangan hidup atau filosofi bangsa Indonesia sendiri.

Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horisontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi.

Kebinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dan sebagainya. Sedangkan kebinekaan horisontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dan sebagainya. Karena berbagai keberagaman namun dengan kesamaan misi yang diemban di bumi ini, misi, menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi dilandasi

dengan saling membutuhkan.

Filosofi Bhinneka Tunggal Ika meyakini bahwa di dalam diri manusia bersemayam potensi yang bila dikembangkan melalui pendidikan yang baik dan benar dapat berkembang hingga hampir tak terbatas. Bertolak dari perbedaan antar manusia, filosofi ini meyakini adanya potensi unggul yang tersembunyi dalam diri individu apabila dikembangkan secara optimal dan terintegrasi dengan semua potensi kemanusiaan lainnya dapat menghasilkan suatu kinerja profesional.

Tugas pendidikan adalah menemukan dan mengenali potensi unggul yang tersembunyi yang terdapat dalam diri setiap individu peserta didik untuk dikembangkan hingga derajat yang optimal sebagai bekal manusia beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk memberdayakan semua potensi kemanusiaan yang mencakup potensi fisik, kognitif, afektif, dan intuitif secara optimal dan terintegrasi. Keunggulan dan kekurangan adalah suatu bentuk kebhinnekaan seperti halnya ras, suku, agama, latar budaya, dan sebagainya.

Di dalam individu dengan segala keterbatasan dan kelebihan, di mana yang memiliki keterbatasan sering bersemayam keunggulan, dan di dalam diri individu yang memiliki keunggulan sering bersemayam keterbatasan. Dengan demikian keunggulan dan keterbatasan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk memisahkan peserta didik yang memiliki keterbatasan atau keunggulan dari pergaulannya dengan peserta didik lainnya, karena pergaulan antara mereka akan memungkinkan terjadi saling belajar tentang perilaku dan pengalaman.

2. Landasan Religi

Sebagai bangsa yang beragama, penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan agama. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hakikat manusia

adalah makhluk yang satu sama lain berbeda (individual differences). Tuhan menciptakan manusia berbeda satu sama lain dengan maksud agar dapat saling berhubungan dalam rangka saling membutuhkan (QS. Al- Hujurat 49:13). Adanya siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus pada hakikatnya adalah manifestasi dari hakikat manusia sebagai individual differences tersebut. Interaksi manusia harus dikaitkan dengan upaya pembuatan kebijakan. Ada dua jenis interaksi antar manusia, yaitu kooperatif dan kompetitif (QS. Al-Maidah, 5:2&48). Begitu pula dengan pendidika, yang juga harus menggunakan keduanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran.

Bertolak dari ayat-ayat Al-Quran yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa ada kesamaan antara pandangan filosofis dengan religi tentang hakikat manusia. Keduanya merupakan upaya menemukan kebenaran hakiki; filsafat menggunakan nalar belaka sedangkan agama menggunakan wahyu. Keduanya akan bertemu karena sumber kebenaran hakiki hanya satu yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Landasan filosofis dan religi akan bertemu untuk selanjutnya dapat menjadi landasan dalam pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai produk kegiatan keilmuan, termasuk di dalamnya untuk penyelenggaran pendidikan.

3. Landasan Historis

Masa-masa awal. Pada awalnya, masyarakat bersikap acuh tak acuh bahkan menganggap sebagai sampah dan menolak, orang-orang yang memiliki ketidakmampuan (disability) tertentu (Olsen&Fuller, 2003:161). Di satu sisi, hal ini terjadi karena rasa takut akan takhayul bahwa ibu melahirkan anak cacat merupakan hukuman baginya atas dosa-dosa nenek moyangnya. Oleh sebab itu, harus dihindari, penolakan itu juga terjadi karena takut tertular.

Namun dilain sisi penolakan itu terjadi karena perjuangan untuk bertahan hidup. Anggota kelompok yang terlalu lemah dan tidak berkontribusi terhadap kelangsungan hidup kelompoknya dikeluarkan dari keanggotaannya. Mereka sering kali tidak diberi makanan yang cukup dan tidak memperoleh kasih sayang dan kontak sosial yang bermakna. Mereka kesepian, terasing dari kelompok sosialnya dan merasa tidak berguna. Mereka yang berbeda karena kecacatannya akan dikurung atau dibiarkan mati (Skjorten, 2001).

4. LandasanYuridis

Landasan yuridis memiliki hirarki dari undang-undang dasar, undang- undang, peraturan pemerintah, kebijakan direktur jendral, peraturan daerah, kebijakan direktur, hingga peraturan sekolah. Juga melibatkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang berkenaan dengan pendidikan. Dalam kesepakatan UNESCO di Salamanca, Spanyol pada tahun 1994 telah ditetapkan agar pendidikan di seluruh dunia dilaksanakan secara inklusif. Dalam kesepakatan tersebut juga dinyatakan bahwa pendidikan adalah hak untuk semua (educational for all), tidak peduli orang itu memiliki hambatan atau tidak, kaya atau miskin, pendidikan juga tidak membedakan ras, warna kulit, suku, dan agama. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sedapat mungkin dintegrasikan dengan pendidikan reguler, pemisahan dalam bentuk segregasi hanya untuk keperluan pembelajaran (instruction), bukan untuk keperluan pendidikan (education). Untuk keperluan pendidikan, anak berkebutuhan khusus harus disosialisasikan dalam lingkungan yang nyata dengan anak-anak lain pada umumnya.

Landasan yuridis pendidikan inklusif dengan Instrumen Internasional sebagai berikut:

1. Deklarasi Universal Hak AsasiManusia, tahun 1989

2. Konvensi PBB tentang Hak Anak 1989
3. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (Jomtien) 1990:
4. Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang Cacat 1993:
5. Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus 1994
6. Tinjauan 5 tahun Salamanca 1999:
7. Kerangka Aksi Forum Pendidikan Dunia (Dakar) 2000:
8. Tujuan Pembangunan Millenium yang berfokus pada Penurunan Angka Kemiskinan dan Pembangunan 2000
9. Flagship PUS tentang Pendidikan dan Kecacatan 2001

Adapun Landasan Pelaksanaan secara Nasional sebagai berikut :

1. UUD 1945 (amandemen) pasal 31
2. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional
3. UU No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pasal 5
4. Deklarasi Bandung (Nasional) "Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif" 8- 14 Agustus 2004.
5. Deklarasi Bukit Tinggi (Internasional) Tahun 2005
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusif
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.

BAB VII STANDAR PROSES PENDIDIKAN

A. Perlunya Standar Proses Pendidikan

Kenyataan pelaksanaan system dalam pendidikan selama ini kurang memperhatikan proses, sehingga dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan tentang pengembangan kemampuan berfikir anak karena dalam pelaksanaan lebih pada hasil akhir yaitu nilai ujian dijadikan sebagai standar, sehingga proses pembelajaran dikelas lebih banyak diarahkan pada sifat kemampuan menghafal informasi tanpa dituntut untuk menghubungkannya pada kehidupan sehari-hari, akibatnya ketika anak didik lulus dari sekolah mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi.

Untuk pengembangan kemampuan diperlukan adanya proses yang dilakukan secara kontinu, sehingga pemerintah membuat Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar proses pendidikan, agar siswa dapat mengerti akan kompetensi yang harus dimilikinya, Dalam proses pembelajaran pada anak diarahkan untuk mendorong perkembangan kemampuan berfikir secara kritis dan sistematis, sementara selama ini permasalahan yang dihadapi, karena lemahnya dalam system dan proses pembelajaran itu sendiri lebih - lebih dalam praktek pendidikan di Indonesia selama ini cenderung lebih berorientasi pada pendidikan berbasis *hard skill* yaitu ketrampilan teknis yang lebih bersifat pengembangan *intelligence quotient (IQ)* namun kurang mengembangkan kemampuan *soft skill* yang tertuang dalam *emotional intelligence (EQ)* dan *spiritual intelligence (SQ)* (Lue . 2013)

Standar pendidikan yang diharapkan agar anak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan karakter dan potensi yang dimilikinya dengan kemampuan untuk memecahkan masalah hidup, serta diarahkan untuk membentuk manusia yang kreatif dan inovatif dengan sasaran pendidikan yang jelas dengan tujuan yang sama yaitu membentuk sikap kecerdasan, dan

ketrampilan bagi setiap anak didik, misalnya : seorang mahasiswa telah belajar Psikologi Pendidikan tentang “Hakekat Belajar”. Ketika dia mengikuti perkuliahan “Strategi Belajar Mengajar”, maka pengetahuan, sikap dan keterampilannya tentang “Hakekat Belajar” akan dilanjutkan dan dapat dimanfaatkan dalam mengikuti perkuliahan “Strategi Belajar Mengajar”.

B. Fungsi Standar Proses Pendidikan

Penetapan standar proses pendidikan merupakan kebijakan yang sangat penting dan strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, di mana standar proses pendidikan (SPP) memiliki fungsi dan peranan sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran. Menurut Puspita (2012), bahwa Fungsi standar proses pendidikan adalah:

1. Fungsi SPP dalam Rangka Mencapai Standar Kompetensi yang Harus Dicapai

SPP berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni kompetensi, serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

2. Fungsi SPP Bagi Guru

Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata.

3. Fungsi SPP Bagi Kepala Sekolah

Sebagai alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah khususnya dalam menentukan dan mengusahakan ketersediaan berbagai keperluan sarana prasarana untuk menunjang proses pendidikan.

4. Fungsi SPP Bagi Para Pengawas (Supervisor)

Bagi pengawas SPP berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh guru dalam pengelolaan proses pembelajaran.

5. Fungsi SPP Bagi Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan Melalui pemahaman SPP, maka lembaga ini dapat melaksanakan fungsinya:

- a) Menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan sarpras yang diperlukan sekolah dalam pengelolaan proses pembelajaran sesuai standar minimal.
- b) Memberikan saran-saran dalam pengelolaan pembelajaran sesuai standar minimal.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses pembelajaran yang dilakukan guru.

C. Tujuan dan Standar Kompetensi

Pentingnya pemusatan tujuan, menurut Prasitio (2010), Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran diantaranya:

- a. *Pertama*, rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran.
- b. *Kedua*, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa.
- c. *Ketiga*, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran.
- d. *Keempat*, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran.

1. Tingkatan Tujuan

Dalam penentuan standar pembelajaran diperlukan tujuan yang jelas dan bersifat spesifik. Tingkatan tujuan pendidikan menurut Wina Sanjaya (2014) yang meliputi:

- a. Tujuan Pendidikan Nasional (TPN)

TPN adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. TPN merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan.

b. Tujuan Intitusional

Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu.

c. Tujuan kurikuler

Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan.

d. Tujuan Pembelajaran/Instruksional

Dalam klasifikasi tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran/instruksional merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dan dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan.

2. Tujuan dan Kompetensi

Dalam kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, tujuan yang harus dicapai oleh siswa dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Menurut Chatroks (2010) dalam kompetensi sebagai tujuan, di dalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu :

- a. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kemampuan dalam bidang kognitif.
 - b. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalam pengetahuan yang dimiliki setiap individu.
 - c. Kemahiran (*skill*), yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
 - d. Nilai (*value*), yaitu norma-norma yang dianggap baik oleh setiap individu.
 - e. Sikap (*attitude*), yaitu pandangan individu terhadap sesuatu.
 - f. Minat (*interest*), yaitu kecenderungan individu untuk melakukan suatu kegiatan.
3. Klasifikasi kompetensi meliputi :
- a. Kompetensi lulusan, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah tamat mengikuti pendidikan pada jenjang atau satuan pendidikan tertentu.
 - b. Kompetensi standar, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai setelah anak didik menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu pada setiap jenjang pendidikan yang diikutinya.
 - c. Kompetensi dasar, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu.
4. Merumuskan Tujuan Pembelajaran
- Ada empat komponen pokok yang harus tampak dalam rumusan indicator hasil belajar, yaitu :
- a. Subjek yang diharapkan dapat mencapai tujuan atau hasil belajar tersebut.
 - b. Tingkah laku atau hasil belajar yang ingin didapatkan.
 - c. Kondisi seperti apa hasil belajar dapat ditampilkan.
 - d. Sejauhmana hasil belajar itu dapat diperoleh

BAB VIII

MODEL PARTISIPASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN STUDY KASUS DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN JETIS BANTUL YOGYAKARTA

Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan merupakan hasil kajian penelitian disertasi penulis: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Jetis Bantul Yogyakarta, berusaha menggali dan menemukan model partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bantul Yogyakarta, terutama sinergitas antara komponen pemerintah, sekolah dan masyarakat / orang tua siswa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan atau mutu sumber daya manusia.

Untuk itu, penulis menelaah dan merefleksi bagaimana cara para orang tua/wali siswa memberikan kontribusi atau keikutsertaannya dalam pembangunan fisik sekolah lanjutan tingkat pertama di kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman dan pemaknaan masyarakat terhadap perubahan sosial berkaitan dengan tanggung jawab pendidikan. Tentu saja pemahaman dan pemaknaan dalam perspektif polemik, karena refleksi tersebut beranjak dari paradigma fenomenologi, yang mempelajari berbagai upaya, langkah dan penerapan pengetahuan umum pada kelompok komunitas untuk menghasilkan dan mengenali subjek, realitas, dan alur tindakan yang bisa dipahami bersama-sama (Kuper, 2000, dalam Basrowi dan Sukidin, 2002:49).

Perspektif penelitian ini adalah fenomenologi yang berusaha memahami pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya, serta fenomena yang dialami oleh informan dan dianggap sebagai suatu entitas – sesuatu yang ada dalam dunia (Collin, 1997:115 dalam Basrowi dan Sukidin, 2002:32), yang merupakan analisis deskriptif dan introspektif tentang semua bentuk

kesadaran dan pengalaman langsung yang meliputi inderawi, konseptual, moral, estetis dan religius (Dimiyati, 2000 dalam Basrowi dan Sukidin, 2002:38). Dengan kata lain, pemahaman mengenai latarbelakang dan kondisi informan menjadi dasar untuk menganalisis dan menentukan langkah/upaya tindakan perubahan sosial yang dilakukan.

Dalam bab ini dibahas mengenai temuan-temuan lapangan yang memiliki hubungan dengan teori-teori yang ditemukan sebelumnya. Pembahasan ini didasari oleh pendekatan dan analisis kualitatif, yaitu peneliti berusaha menemukan keterkaitan satu sama lain. Kategori-kategori yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sekolah menengah pertama se kecamatan Jetis pasca gempa bumi tahun 2006 seperti; (a) Partisipasi dalam perencanaan atau kerlibatan dalam proses penentuan arah, srategi dan kebijakan pembangunan, (b) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, (c) Pengawasan dan evaluasi dari masyarakat. (2) Faktor pendukung sekolah untuk menjaring partisipasi masyarakat terhadap pembangun/ pengembangan sekolah, misalnya tentang kebijakan pemerintah dan swadaya masyarakat (3) Faktor hambatan sekolah untuk menjaring partisipasi masyarakat terhadap pembangun/pengembangan sekolah, misalnya tentang koordinasi dan birokrasi. (4) model partisipasi pembangunan pendidikan yang adaptif.

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Sekolah

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan merupakan suatu keharusan sebagaimana diamanatkan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Partisipasi dimaksud adalah partisipasi di dalam kegiatan fisik dan non fisik dalam pembangunan sekolah. Menurut Depdiknas, partisipasi *stakeholders* (warga sekolah dan masyarakat) merupakan keterlibatan secara aktif masyarakat baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengevaluasian

pendidikan yang diharapkan dapat mendorong warga masyarakat dalam menggunakan haknya menyampaikan pendapat untuk kepentingan sekolah” (Depdiknas, 2007 : 46).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hefifah (2009:15) menyebutkan bahwa: ”Partisipasi merupakan proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dalam pemantauan/ pengawasan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan fisik sekolah, yang mula-mula digali dari pernyataan –pernyataan dari komite sekolah, orang tua/wali siswa dan tokoh-tokoh masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sekolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif terhadap faktor internal dan faktor eksternal.

Konsep partisipasi tersebut dipadukan dengan tahapan-tahapan partisipasi yang diajukan oleh Tjokro 1992 (Averroes 2009 : 45) yaitu membagi partisipasi menjadi tiga tahapan : 1). Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, 2) Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, 3).Keterlibatan dalam memetik manfaat secara berkeadilan / pengawasan dan evaluasi.

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Sekolah

Pembangunan fisik sekolah sebagai sarana peningkatan mutu dan kinerja sekolah, dan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan, termasuk pula partisipasi masyarakat dalam perencanaan, menentukan sumberdaya, baik sumber daya manusia pelaksanaannya maupun sumberdana

yang mendukung terlaksananya program-program pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan/ sekolah sangat dibutuhkan, baik dalam perencanaan pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Dengan pendekatan kultural khas Indonesia yang dapat dimasukkan dalam proses eksplorasi kebutuhan dan identifikasi masalah, merupakan bentuk sarana untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki atas keputusan dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan. Oleh karenanya musyawarah dilakukan antara pengurus sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang terkait, dewan sekolah dan sebagian orangtua/wali murid atau tokoh masyarakat.

Berdasarkan data wawancara dengan para informan penelitian ini, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan ada dua bentuk yaitu :

- 1) Melibatkan masyarakat secara langsung (Orang tua/Wali Siswa dan tokoh masyarakat).

Diawali dengan musyawarah antara Pihak Sekolah, Dewan Pendidikan dan Orang Tua/Wali siswa. Musyawarah tersebut, ada yang sengaja diadakan pada waktu khusus, ada juga yang disatukan pada saat pembagian raport.

- 2) Keterlibatan melalui perwakilan / Dewan Sekolah

Dalam hal ini, orang tua/wali siswa menerima informasi dari pihak Dewan Pendidikan mengenai hasil rapat dengan pihak sekolah baik mengenai jumlah/besarnya biaya yang dibutuhkan, jenis kegiatan yang dilakukan/direncanakan, kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya kontribusi dari orang tua/wali siswa, dan lain sebagainya

Pelibatan masyarakat sejak perencanaan pembangunan fisik sekolah sangat dibutuhkan sebab dampak gempa bumi tahun 2006 yang menghancurkan gedung sekolah mencapai 85% sehingga tidak dapat digunakan lagi. Kenyataan lapangan penelitian menunjukkan bahwa usaha membangun kembali gedung sekolah dan mengadakan prasarana pendidikan untuk SMP – SMP di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul berbeda – beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Contoh : SMP Negeri I Jetis mendapat bantuan / partisipasi dari masyarakat Budha Tzu Chi melalui Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Bantul. Bantuan tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan kepedulian masyarakat Budha di bidang pendidikan. Dengan bantuan tersebut, SMP Negeri 1 Jetis bisa memiliki sarana prasarana fisik yang memadai bahkan dijadikan sebagai sekolah terpadu dan percontohan dengan akreditasi A. Dampak ketersediaan fasilitas tersebut dapat dilihat pada persentase kelulusan siswa/*Out put* selama tiga (3) tahun terakhir ini yang mencapai 100% baik hasil untuk kenaikan kelas, ujian sekolah dan Ujian Akhir Nasional.

Hal yang sama juga terlihat pada pembangunan perbaikan gedung SMP Negeri 2 Jetis yang mendapat bantuan dari masyarakat Jepang melalui Departemen Luar Negeri. Bantuan tersebut dikelola langsung oleh pelaksana pihak pemberi bantuan , sedangkan sekolah hanya menerima hasil akhir (jadi tinggal pakai/ tinggal menerima kunci). Namun pelaksanaan tersebut juga diawali dengan perencanaan bersama antar pelaksana pemberi bantuan antar sekolah dengan Depdiknas Bantul.

Bantuan untuk membangun kembali gedung sekolah yang rusak tidak hanya berasal dari luar negeri atau kelompok masyarakat agama, tetapi juga dari LSM dan Perss. Seperti halnya yang diterima oleh SMP Negeri 3 Jetis. Pembangunan sarana prasarana fisik SMP Negeri 3 Jetis mendapat bantuan

dari LSM yang disponsori oleh Republika melalui Direktorat pembinaan SMP Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas, dengan total dana mencapai lebih dari enam ratus juta rupiah (Rp.630.000.000) berdasarkan prasasti peresmian pembangunan.

Bila sekolah – sekolah negeri tersebut di atas mendapat limpahan dana untuk membangun kembali gedung sekolahnya yang rusak, maka hal berbeda dialami dalam perbaikan pembangunan sarana fisik bagi SMP Muhammadiyah Jetis. Sekolah ini mendapat bantuan dari pengurus Muhammadiyah Jetis dan masyarakat Muhammadiyah untuk memperbaiki sedikit demi sedikit dengan sarana prasarana yang sederhana, bahkan tempat parkir siswapun belum memenuhi syarat. Kondisi SMP swasta ini semakin sulit bersaing karena dikelilingi oleh sekolah negeri yang dibangun serba mewah dan menjadi favorit. Dampaknya sangat terasa dengan menurunnya jumlah siswa yang masuk SMP ini, atau bisa dikatakan bahwa siswa yang masuk di SMP Muhammadiyah adalah siswa sisa dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3. Kondisi ini membuat sekolah ini sangat sulit untuk berkembang, ditambah lagi dengan adanya kebijakan pemerintah mendirikan sekolah dengan jarak terlalu dekat antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, pemberian bantuan yang tidak merata/ perlakuan berbeda terhadap sekolah negeri dan sekolah swasta.

Dampak lanjut dari ketimpangan kebijakan tersebut adalah ketidakmampuan sekolah swasta untuk bersaing sehingga jumlah siswa semakin menurun dari tahun ke tahun. Misalnya, untuk tahun 2008/2009 siswa yang mendaftar ada 33 orang yang diterima ada 32 orang, tahun 2009/2010 yang mendaftar 23 orang , yang diterima 23 orang juga, dan tahun 2010/2011 yang mendaftar 19 orang sedangkan yang diterima juga 19 orang. Jadi kondisi sekarang jumlah siswa hanya ada 68 orang. Sebuah jumlah yang jauh berbeda dengan keadaan lima atau sepuluh tahun lalu dimana siswa mencapai sepuluh sampai

dua belas kelas, seperti disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang kebetulan mantan guru sekaligus mantan kepala sekolah yang purna tugas. Menurutnya, sistem pemberian bantuan dari pemerintah tidak merata misalkan saja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan dengan sistem per siswa Rp.570.000,- pertahun. Dilain pihak siswa yang membayar iuran (SPP) hanya sekitar 15 %. Demikian juga dengan program bantuan dari pemerintah untuk anak yang tidak mampu, dengan istilah bantuan siswa miskin (BSM) tahun 2010 mengajukan 45 orang siswa , yang disetujui hanya 9 orang siswa. Kenyataan ini menyiratkan suatu harapan agar kebijakan dan sistem pemberian bantuan pendidikan perlu ditinjau kembali.

Selain SMP Muhammadiyah, terdapat juga sekolah yang bernuansa agama yaitu MTs.Negeri Sumber Agung. Pembangunan fisik pasca gempa MTs.Negeri Sumber Agung mendapat dana bantuan langsung rehabilitasi gedung dari Direktur Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) yang langsung dikelola oleh pihak sekolah dan Komite Madrasah.

Menurut pengakuan narasumber, masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi dalam mengikuti pembangunan fisik sekolah, karena mereka beranggapan bahwa pembangunan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan proses pembelajaran. Kesadaran masyarakat tersebut memberikan manfaat yang besar sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan. Dijelaskan pula bahwa bentuk kontribusi yang diberikan sangat beragam, tergantung pada kesediaan dan kemampuan orang tua/ wali murid dalam memberikan sumbangan sukarela untuk kelancaran bersama.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa untuk pembangunan pengembangan dan kemajuan sekolah diperlukan partisipasi masyarakat, seperti dikatakan oleh

Tjokroamidjoyo (dalam Hefifah, 2009). Masyarakat dapat memberikan partisipasi aktif apabila perumusan dan pelaksanaan pembangunan tersebut menyentuh kepentingan mereka secara langsung untuk meningkatkan kemakmuran.

Meskipun terdapat perbedaan dalam implementasi pembangunan sarana dan prasarana fisik sekolah, namun bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan fisik sekolah, diakui oleh semua informan. Setiap sekolah mempunyai caranya tersendiri untuk dapat melibatkan masyarakat. Misalnya;

- SMP Negeri 2 Jetis : bahwa masyarakat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan juga pengawasan pembangunan. Hal itu diawali dengan rapat perencanaan atau diskusi pada acara pertemuan rutin wali murid atau setiap periode kenaikan kelas.
- SMP Negeri 3 Jetis : Setiap ada rencana pembangunan, sekolah selalu mengundang orangtua/wali murid untuk mensosialisasikan sekaligus mendiskusikan rencana pembangunan tersebut. Pertemuan perencanaan pembangunan fisik sekolah lebih mengarah pada pembahasan tentang urgensi pelaksanaan pembangunan dan pendanaan yang harus disediakan. Pembahasan masalah pendanaan tersebut karena sekolah harus menyediakan dana tersebut secara swadaya.
- SMP Muhammadiyah Jetis : rencana pembangunan biasanya dibahas terlebih dahulu dengan pengelola atau yayasan. karena mempertimbangkan jumlah siswa yang sedikit tidak mungkin membebankan kepada siswa saja, baru setelah ada persetujuan dari Yayasan Muhammadiyah, sekolah mensosialisasikan kepada orangtua/wali murid dan masyarakat terkait dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan.
- MTs Negeri Sumberagung Jetis: pada dasarnya selalu berusaha untuk menginformasikan setiap perencanaan

yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat atau orangtua/wali murid, memanfaatkan waktu di akhir tahun ajaran atau pembagian raport kenaikan kelas. Pada kesempatan ini diadakan diskusi dengan orangtua/wali murid dan dewan sekolah mengenai rencana pendidikan yang akan diselenggarakan pada tahun ajaran yang akan datang, jadi tidak hanya membahas rencana pembangunan fisik madrasah saja.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada umumnya, semua sekolah memiliki kesamaan, yaitu:

- a) Melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini orangtua/ wali murid, baik yang masuk dalam anggota dewan sekolah maupun tidak.
- b) Setiap sekolah memanfaatkan moment pembagian laporan hasil belajar siswa (raport) khususnya pada awal dan akhir tahun ajaran, karena pada saat itu akan diberi informasi dan dibahas mengenai perencanaan kegiatan pada tahun pelajaran yang akan datang.

Hal lain yang tampak dari penjelasan para informan adalah semua mengakui bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan program sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran dewan sekolah maupun orangtua/wali murid dalam pertemuan yang diselenggarakan sekolah. Keterlibatan warga dalam perencanaan program sangat menentukan bagaimana mekanisme pelaksanaan pembangunan fisik sekolah yang lebih tepat dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang paling mendesak, sebaliknya respon warga juga tinggi sehingga proses pembahasan rencana pelaksanaan pembangunan fisik sekolah dapat berjalan dengan lancar, demikian pernyataan dari komite sekolah.

Namun bagi orang tua siswa bentuk partisipasi ke sekolah itu dengan membayar segala kewajiban yang telah ditentukan oleh sekolah. Mulai dari sejak awal masuk sampai dengan anaknya

lulus. Menurut mereka, pembangunan gedung dan ruang-ruang kelas yang rusak pada pasca gempa bumi beberapa tahun lalu itu terlaksana karena mendapat bantuan dana dari pemerintah. Orang tua diundang ke sekolah kalau pembagian rapor pada kenaikan kelas atau pada awal masuk sekolah; pada saat itu masyarakat diberi informasi tentang hari libur dan masuk sekolah, selain itu ada pengarahan-pengarahan dari Dewan Sekolah dan Kepala Sekolah, ditempat itu juga segala kewajiban murid dan orang tua dijelaskan/ diberitahu langsung .

Bahkan ada juga tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sekolah, biasanya rencana pembangunan tersebut tidak secara langsung dikomunikasikan dengan orangtua / wali murid. Masyarakat hanya dapat mengamati secara fisik apakah pembangunan tersebut sudah selesai atau belum, dan ketika masyarakat merasa proses pembangunan terlalu lama maka baru masyarakat khususnya melalui dewan sekolah akan menanyakan. Artinya, apa dan bagaimana proses tersebut dilakukan tidak terlalu mendapat perhatian dari masyarakat. Sekolah pun hanya menyampaikan pada saat pertemuan dengan orangtua/wali murid bersamaan dengan pembagian rapor atau acara peresmian pembukaan fasilitas sekolah yang dibangun tersebut. Tidak ada pertemuan khusus membahas rencana pembangunan.

Demikian juga dari pendapat- pendapat orang tua siswa yang lain tentang keterlibatan atau bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan fisik sekolah , mengungkapkan bahwa; wali murid diundang kesekolah pada saat menerima rapor, selesai *try out*, mau ujian. Diundang untuk menasehati anak supaya lebih rajin . Selain diberikan informasi tentang perkembangan anak, orang tua juga diberitahukan tentang pembangunan mushola, parkir, laboratorium termasuk ruang-ruang kelas dibangun atas bantuan pemerintah. Ketika ditanya tentang partisipasi dalam pembangunan fisik sekolah, partisipasi wali murid dalam bentuk ikut rapat, membahas jumlah sumbangan wali murid.. Pembangunan sarana sekolah dari proyek

sekolah jadi wali murid tidak di minta dalam sumbangan tenaga. Tetapi apabila sekolah meminta wali murid untuk gotong royong membangun sarana juga mau melaksanakan karena bisa mengurangi jumlah sumbangan, dengan demikian orang tua menginginkan dari pada membayar dengan uang mereka mau menyumbang dengan tenaga agar sumbangan bisa jadi murah.

Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Abu Ahmadi, (2007 : 105) yang menyatakan:

“Bahwa apabila masyarakat dapat didorong untuk serta dalam pembangunan, , dengan menyediakan secara sukarela tenaga bebas dan bahan-bahan dari sumber-sumber tempat mereka sendiri, maka masalah besar mengenai pembiayaan yang dikehendaki secara cepat dan dipermudah”

Dalam musyawarah pihak sekolah dengan masyarakat, selain melakukan sosialisasi tentang diadakannya pembangunan fisik sekolah, masyarakat turut serta menentukan program atau pembangunan apa yang paling rasional untuk segera dilaksanakan, selanjutnya kesiapan masyarakat dalam melaksanakan dengan segala konsekuensinya, seperti bentuk partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk barang, uang maupun tenaga dalam pembangunan fisik sekolah. Musyawarah antara pihak sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu wadah untuk menampung segala aspirasi maupun berbagai keluhan-keluhan masyarakat, yang akan dimanfaatkan pula sebagai suatu cara dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pertemuan antara pihak sekolah dengan dewan sekolah dan unsur masyarakat tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam menemukan masalah dan berusaha mencari jalan keluar dari masalah yang muncul dalam pembangunan fisik sekolah secara bersama-sama. Pertemuan pihak sekolah dengan dewan sekolah sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun

ajaran dan pertemuan dengan orangtua/wali murid dilaksanakan setiap penerimaan laporan hasil belajar siswa, yakni penerimaan raport semester I dan semester II.

Musyawarah dilaksanakan di sekolah dihadiri oleh pengurus sekolah, dewan sekolah dan orangtua/wali murid. musyawarah bersama ini merupakan cara menganalisis kebutuhan-kebutuhan dalam pembangunan fisik sekolah, tidak sekadar keinginan yang bersifat *superfisial* demi pemenuhan kebutuhan sesaat misalnya hanya untuk memenuhi persyaratan akreditasi SMP/MTs. Dalam musyawarah dijelaskan mekanisme pelaksanaan pembangunan fisik SMP/MTs, orang-orang yang mampu mewakili dalam pelaksanaan dan pendanaan yang dibutuhkan. Musyawarah untuk suatu keperluan seperti merumuskan kebutuhan dalam pembangunan fisik sekolah harus benar-benar diikuti oleh orang-orang yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Musyawarah dipandang sebagai bentuk dari *community needs analysis*.

Dalam pelaksanaan musyawarah pihak sekolah dengan orangtua/wali murid membahas beberapa materi, yaitu:

1. Sosialisasi kegiatan pembangunan fisik SMP/MTs secara mendetail.
2. Pembentukan atau penetapan satuan pelaksana pembangunan, apakah akan dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat atau dilimpahkan kepada pihak pengembang (*developer*)
3. Penetapan sumber dana yang akan digunakan dalam pembangunan fisik sekolah.

Berdasarkan Musyawarah tersebut, telah diputuskan bahwa:

1. Dana bantuan pembangunan SMP/MTs dari pemerintah daerah, para donor dan sebagian dari swadaya masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela.
2. Ditetapkan pelaksana pembangunan di masing-masing sekolah

3. Musyawarah lanjutan akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau pemberitahuan melalui surat edaran yang ditujukan kepada orangtua/wali murid.

Selanjutnya, musyawarah yang mengharuskan keterlibatan pemerintah desa atau kecamatan setempat juga diupayakan, karena bagaimanapun pemerintahan setempat lebih memahami karakteristik masyarakat dengan demikian perencanaan pembangun fisik SMP/MTs dapat disusun sesuai dengan kemampuan dan keinginan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembangunan fisik sekolah yang merupakan ajang penyampaian aspirasi masyarakat cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari intensitas yang cukup tinggi keikutsertaan masyarakat Jetis Bantul dalam musyawarah pihak sekolah dengan masyarakat, baik musyawarah dengan dewan sekolah maupun musyawarah dengan orangtua/wali murid dan pemerintah setempat, meskipun keterlibatan mereka tidak secara langsung, akan tetapi melalui wakil masyarakat yaitu masing-masing dari sekolah atau orangtua/wali murid yang diundang dalam musyawarah tersebut.

Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Rencana Pembangunan Fisik Sekolah, penyusunan kebijakan dalam pembangunan fisik sekolah sejak awal harus melibatkan masyarakat secara bersama-sama menentukan arah kebijakan (*model bottom-up*), sehingga melahirkan suatu kebijakan yang adil dan demokratis. Pembuat kebijakan yang demokratis menawarkan dan mejunjung tinggi pentingnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Melalui cara partisipatif diharapkan menciptakan suatu keputusan bersama yang adil dari pemerintah untuk rakyatnya, sehingga akan mendorong munculnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Sehubungan dengan hal ini *Cohen dan Uphoolf* (1997) dalam terjemahannya berpendapat bahwa sifat has partisipasi terutama dikenal dengan gagasan inisiatif (prakarsa) ini pada satu pihak datang dari bawah (*botom up*) dan dilain pihak datang dari atas (*top down*), selanjutnya dikatakan bahwa partisipasi *botom up* kemungkinan lebih sering sukarela daripada paksaan, sedangkan partisipasi *top down*, tindakannya kerapkali melibatkan beberapa jenis paksaan dan disamping itu juga ada juga partisipasi yang didorong melalui imbalan-imbalan tertentu.

Pelaksanaan pembangunan fisik SMP/ MTs di Jetis melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan, termasuk mulai dari proses pengambilan keputusan. Namun, karena tidak setiap kondisi sosial budaya terbiasa dengan partisipasi sebagai salah satu bentuk dari budaya demokrasi, seperti halnya kebanyakan daerah di Indonesia, maka masyarakat Jetis Bantul masih kental dengan budaya patronase di mana seluruh kebijakan dan kehendak mereka digantungkan kepada pihak-pihak yang mereka percayai menjadi tokoh atau panutan bagi masyarakat. Masyarakat Jetis Bantul sangat menjunjung tinggi kemampuan pihak sekolah dan tokoh-tokoh dalam masyarakat, sehingga keputusan atau pendapat mayoritas tergantung kepada kepala sekolah dan dewan sekolah. Akan tetapi, sebaliknya, pemimpin atau kepala sekolah juga memberikan kesempatan berpendapat bagi masyarakat, melalui perwakilannya yaitu dewan sekolah dan orangtua/wali murid dalam musyawarah sekolah, dimana dalam musyawarah tersebut bertujuan untuk merumuskan kebutuhan masyarakat dan benar-benar mampu menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Partisipasi masyarakat Jetis Bantul mempunyai potensi untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai arahan dan motivasi dari penyelenggara pelayanan pendidikan yaitu SMP/MTs, sehingga masyarakat termotivasi. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pihak SMP/MTs dalam hal ini adalah kepala SMP/MTs, untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam

pembangunan fisik sekolah yaitu melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan pembangunan agar dapat memiliki tanggung jawab bersama, yaitu pembangunan baik ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah laboratorium, perpustakaan, lapangan olah raga, penyediaan buku-buku pelajaran dan sebagainya sehingga masyarakat dengan sukarela berpartisipasi dalam program maupun pembangunan fisik tersebut. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang baik adalah para penyelenggara pendidikan yaitu SMP/MTs mampu menjalankan tugasnya untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan siswa ke arah tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan fisik sekolah, cukup tinggi. Ide atau gagasan muncul dari kehendak masyarakat dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam pengambilan keputusan rencana pembangunan fisik sekolah Kabupaten Bantul. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambil keputusan yang merupakan opini publik dalam membuat sebuah kebijakan adalah cukup tinggi.

Pendapat informan tentang kebijakan untuk pengambilan keputusan, antara lain bahwa ; “pengambilan keputusan tentang kegiatan pembangunan fisik sekolah, masyarakat terlibat secara langsung, tetapi pada akhirnya masyarakat mengikuti konsep pembangunan yang diajukan kepala sekolah”.

Demikian juga yang dikatakan Dewan Sekolah MTs Negeri Sumber Agung, bahwa : pengambil keputusan pembangunan fisik dan pengembangan atau rencana ke depan selalu bermusyawarah dengan wali murid, Dewan Sekolah , pengurus Yayasan dan sekolah. Ini biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran dan akhir tahun ajaran. Disaat itu kita meminta pendapat dari berbagai pihak/ wawasan dari konsep-konsep yang sekolah tawarkan ke orang tua murid, disitu ada beberapa

keputusan. Sebenarnya masyarakat sudah sadar bahwa pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan manfaat bagi siswa sehingga akan mampu meningkatkan mutu pendidikan.

Begitu juga menurut Bapak Thohayadi dan Bapak Dahlan Nahrowi (Dewan Sekolah) yang mempunyai pendapat yang hampir sama bahwa : pengambilan keputusan rencana pembangunan fisik sekolah biasanya pihak sekolah selalu koordinasi dengan kami, dan masyarakat sekarang ini lebih mempercayakan kepada pihak sekolah, yang penting tidak memberatkan orangtua/wali murid, pelaksanaan rapat antara kepala sekolah, guru dan dewan sekolah dilaksanakan sedikitnya satu kali dalam satu tahun pelajaran. Sebetulnya rapat tersebut tidak hanya membahas tentang pembangunan sekolah, tetapi juga membahas program untuk mengembangkan mutu peserta didik dan mutu sekolah saja, Namun demikian apabila diperlukan pembahasan suatu program yang sifatnya mendesak, bisa saja sekolah mengundang dewan sekolah, tokoh masyarakat atau pihak lain yang terkait untuk membahas secara bersama-sama yang kemudian dilanjutkan kepada orangtua murid melalui surat pemberitahuan. Sedangkan untuk musyawarah dengan orangtua/wali murid, pihak sekolah telah mengagendakan pada setiap pembagian laporan hasil belajar siswa (*raport*).

Pendapat lain dari Bapak Giatmo selaku orang tua /wali murid berkenaan dengan partisipasinya terhadap pembangunan fisik sekolah bahwa; setiap pembagian rapor selalu dikumpulkan untuk menerima penjelasan dari sekolah untuk menerima rapor, mendengar informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah / kepala sekolah dan Dewan sekolah biasanya mengenai ; masalah liburan, masuk sekolah, iuran –iuran untuk bayar les, seragam dan buku-buku latihan murid dan pada saat itu dipesan untuk manesehati dan memantau anak selama dirumah untuk belajar lebih giat lagi agar ujiannya lebih baik hasilnya. Pada saat yang sama Bapak Giatmo mengungkapkan, bahwa pada awal dulu membayar untuk seragam empat ratus lebih diangsur pertama boleh seratus lima puluh

ribu(RP.150.000) dulu dan ditambah lagi setiap bulan membayar tiga puluh lima ribu rupiah(Rp.35.000) untuk bayar les, selain itu juga kadang-kadang beli buku untuk latihan yang disebut buku latihan kerja siswa (LKS).

Demikian juga Bapak Sukirman Orang Tua/Wali Murid SMP Muhammadiyah, dan Ibu Paijem Orangtua murid MTs yang mengungkapkan hal yang hampir sama. Cuma bedanya Bu Paijem mengungkapkan kalau dia orang yang sama sekali tidak mampu untuk membanyar sekolah sehingga anaknya sama sekali tidak membayar tetapi putranya mendapat bantuan untuk anak tidak mampu. Lain juga Bu Paijem, bahwa pertamanya ia jual kambing untuk bayar. Kemudian ada bantuan dari pemerintah sehingga anaknya bisa sekolah, sehingga ia siap menyumbangkan tenaga sebagai bentuk partisipasinya apalagi sejak gempa rumahnya masih rusak.

Jadi, proses perencanaan dan pengambilan keputusan melalui musyawarah sekolah yang telah diselenggarakan, dimana masyarakat melalui perwakilannya yang turut serta dalam musyawarah sekolah telah diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat, usulan maupun keluhan sebagai aspirasi masyarakat. Akan tetapi keputusan tertinggi tergantung pada kepiawaian kepala sekolah dalam memimpin musyawarah sekolah.

Pada dasarnya, masyarakat mendukung dan mempercayakan keputusan yang diambil dalam musyawarah. Keputusan yang diambil lahir dari aspirasi dan keinginan masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik di SMP/MTs. Adapun bentuk partisipasi yang dilakukan diantaranya dengan memberikan pendapat dan pandangan dalam rapat pengambilan keputusan, walaupun orang tua wali hanya mengiyakan apa yang sudah dikonsep sebelumnya apa yang sdh menjadi keputusan, biasanya orang

tua pada saat itu mendapat informasi tentang kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa melalui orang tua.

Upaya memberdayakan masyarakat sipil atau '*civil society*' merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Keterlibatan masyarakat akan memberikan dampak yang positif terhadap keputusan dan kebijakan atau program pembangunan yang diambil atau yang akan diimplementasikan, karena dapat membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Dari beberapa pendapat dan pembahasan dibawah ini ada temuan-temuan sebagai berikut :

1. Bantuan Organisasi Budha Tzu Chi Asean, Jepang dan masyarakat atas pembangunan fisik sekolah di Kecamatan Jetis Bantul, merupakan wujud partisipasi masyarakat.
2. Terdapat kesamaan masing-masing sekolah dalam perencanaan, penetapan keputusan dan kebijakan pembangunan fisik sekolah dengan dewan sekolah dan orangtua/wali murid, dilaksanakan pada saat tahun ajaran baru dan pembagian raport hasil belajar siswa
3. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah kesediaan orang tua menghadiri rapat/ pertemuan, ketaatan membayar iuran dan lebih senang kalau diajak gotong royong.

Dari temuan-temuan diatas maka sebagai solusi atau proposisinya sebagai berikut:

Bantuan masyarakat Budha Tzu Chi Asian, Jepang dan masyarakat serta kesediaan orang tua menghadiri rapat/ pertemuan, ketaatan membayar iuran sekolah, merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sekolah.

4. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah kesediaan orang tua menghadiri rapat/ pertemuan, ketaatan membayar iuran dan lebih senang kalau diajak gotong royong.

5. Penetapan keputusan arah pembangunan fisik sekolah dilaksanakan melalui tahapan musyawarah antara pihak sekolah dengan dewan sekolah dan orangtua/wali murid.
6. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otonomi sekolah, karakteristik sosial masyarakat, dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.

Dari temuan 4, 5 dan 6 diatas maka sebagai solusi atau proposisinya sebagai berikut:

Bantuan organisasi Budha Tzu Chi Asian, Jepang dan masyarakat serta kesediaan orang tua menghadiri rapat/pertemuan , ketaatan membayar iuran sekolah, merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sekolah.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Sekolah

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu: adanya kemauan, adanya kemampuan, dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Pada tahapan ini Tjokroamidjoyo (dalam Ainur, 2009: 45) menjelaskan sebagai keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama peningkatan partisipasi di bidang pendidikan (Depdiknas, 2005) yaitu untuk :

- a. Meningkatkan dedikasi / kontribusi stakeholders terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa, pemikiran, intelektualitas, ketrampilan, moral, finansial dan matrial / barang.

- b. Memberdayakan kemampuan yang ada pada *stakeholders* bagi pendidikan untuk pendidikan nasional.
- c. Meningkatkan peran *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik sebagai *advisor*, *supporter*, *mediator*, *controller*, *recourse linker*, dan *education proder*.
- d. Menjamin tiap adanya setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan dan menjadikan aspirasi *stakeholders* sebagai penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Kondisi di lapangan dapat digambarkan bahwa kesediaan atau partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan sumbangan dana masih rendah. Masyarakat cenderung berpartisipasi dalam bentuk waktu, tenaga dan partisipasi lainnya yang mampu mereka kontribusikan pada kelancaran pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan didasarkan oleh inisiatif warga atau sekolah dalam rangka pemecahan permasalahan yang muncul dalam proses belajar mengajar, sehingga meskipun partisipasi dalam bentuk uang rendah, namun partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, waktu yang mereka sumbangkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah cukup tinggi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah di SMP/MTs Kecamatan Jetis dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut:

Kesediaan untuk memberi kontribusi atau dukungan dalam pelaksanaan program: barang, uang, bahan-bahan jasa, buah pikiran, ketrampilan dan sebagainya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah secara keseluruhan pada masing-masing sekolah cukup tinggi. Namun bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat pada masing-masing sekolah memiliki beberapa perbedaan. Kesediaan masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan sumbangannya di beberapa sekolah

baik berupa, tenaga dan pikiran dalam pelaksanaan program didasarkan oleh inisiatif warga guna memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pembelajaran, sedangkan sekolah yang lain didasarkan pada inisiatif sekolah. Swadaya masyarakat dalam bentuk keterlibatan langsung yang tentunya sesuai dengan kemampuan mereka memberikan kontribusi dalam pembangunan fisik sekolah. Keterlibatan langsung yang sangat tinggi tercermin dalam kesediaan mereka dalam membantu pembangunan sarana dan prasarana fisik, dukungan masyarakat untuk keberhasilan program dan kesediaan waktu yang cukup tinggi dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah.

Sejauh ini orangtua/wali murid sangat peduli dengan adanya pembangunan sekolah selama pembangunan tersebut dapat diwujudkan secara nyata, untuk bentuk partisipasi orangtua/wali murid memang kami arahkan dalam bentuk uang sekedarnya untuk mempermudah kami dalam mengelola dana tersebut. Selama ini belum ada orangtua/wali murid yang menyumbangkan material atau barang lainnya.

Untuk pembangunan fisik sekolah secara umum tidak dibebankan kepada masyarakat, karena pembangunan fisik sekolah sudah didanai oleh lembaga donor. Sehingga partisipasi masyarakat diarahkan kepada peningkatan mutu, pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan.

Tetapi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah cukup tinggi. Pasca Gempa di Bantul yang terjadi Mei 2006 silam, pembangunan fisik sendiri telah dilaksanakan seluruhnya oleh Yayasan Budha Tzu Chi. Sekolah dibangun secara terpadu antara sekolah dasar, sekolah menengah atas. Pihak sekolah sudah tinggal memakai dan memelihara bangunan sekolah ini.

Hanya saja sekolah masih membutuhkan bangunan mushola, karena guru-guru, karyawan, dan siswa hampir 85 %

menganut agama Islam, ruang ketrampilan dan komputer karena baru saja ada bantuan dari pemerintah dalam hal ini Depdiknas sebanyak 20 unit belum ada tempatnya, serta ruang kesenian karena alat-alat itu sementara disimpan di Aula.

Hal ini atas inisiatif atau swadaya dari masyarakat dan dibicarakan ke kepala sekolah dengan pihak dewan sekolah selanjutnya menindak lanjuti untuk membangun mushola, ruang ketrampilan dan ruang kesenian. Dalam hal ini partisipasi masyarakat telah terkoordinasi sepenuhnya melalui komite sekolah atau dewan sekolah yang ada.

Dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah partisipasi masyarakat juga cukup tinggi walaupun masyarakat juga kena gempa, dan sekarang pemulihan hampir selesai. Ide dari beberapa orang tua/wali murid dan kita tawarkan ke orang tua/ wali murid mereka setuju. Adapun mekanisme partisipasinya yaitu dengan berbentuk semen, uang dan tenaga, dengan cara mengedarkan blanko / pormolir kesediaan orang tua sesuai dengan kemampuan orang tua/wali murid , itupun dengan sukarela, ternyata mendapat hasil yang luar biasa.

Sejarah rekonstruksi pembangunan gedung SMP. Negeri 1, adalah bantuan dari Yayasan Budha Tzu Chi, pada waktu itu menawarkan bantuan kepada Bapak Partijo Arief yang saat itu masih sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , kebetulan juga beliau sebagai dewan sekolah, lalu dipertemukan dengan Bapak Bupati H. Idam Sanawi waktu itu. Ternyata saat itu SD.Negeri 1 Jetis, dan SMA.Negeri 1 Jetis Juga Dibantu menjadi satu lokasi , sehingga sekarang disebut sekolah terpadu, untuk rekonstruksi gedung dan sarana prasarana sekolah tersebut menggunakan dana hampir mencapai 10 M (sepuluh milyar rupiah).

Lain halnya untuk pelaksanaan pembangunan SMP Muhammadiyah Jetis orangtua/wali murid yang ingin berpartisipasi diharapkan berpartisipasi dalam bentuk uang, yang besarnya berjenjang berdasarkan kelas dan sesuai

dengan kondisi ekonominya. Sekolah juga tidak menyarankan untuk sumbangan buku bacaan atau buku pelajaran, untuk mengisi perpustakaan karena selain anggaran sudah ada dari BOS, kurikulum pendidikan saat ini sudah berbeda dengan kurikulum sebelum-sebelumnya, dimana buku pelajaran belum tentu dapat dipakai oleh siswa berikutnya. Sedangkan bantuan yang ada hanya oleh yayasan dan masyarakat Muhammadiyah. Sehingga bangunanya bertahap walaupun saat pasca gempa bantuannya tidak seperti sekolah yang lainya mendapat bantuan banyak dari mana-mana, apalagi tentang partisipasi orang tua juga sangat rendah, karena kesadaran tentang pendidikan memang kurang, ini boleh jadi karena pengaruh ekonomi keluarga.

Sedangkan di MTs Negeri Sumberagung, partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pembangunan fisik sekolah ini sangat tinggi. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, karena mereka beranggapan bahwa pembangunan dilaksanakan memang untuk kepentingan proses pembelajaran, dan kesadaran bahwa pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan manfaat yang besar sehingga akan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Bentuk kontribusi yang mereka berikan sangat beragam, tergantung pada kesediaan dan kemampuan mereka memberikan sumbangan sukarela untuk kelancaran pembangunan ini,.

Arahan bentuk partisipasi yang dilakukan dalam bentuk uang sesuai dengan pemikiran Pasaribu dan Simanjutak (2005: 11) yang menyebutkan Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha

yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

Partisipasi masyarakat untuk sekolah itu sebenarnya sangat baik, Cuma mungkin sekolah itu, sudah banyak yang diurus sehingga sering mengambil jalan pintas saja , hanya lebih banyak dengan Dewan sekolah saja, untuk perencanaan dan segala kebijakan yang diambil, walaupun itu berkenaan dengan masyarakat selaku orang tua /wali murid. Kalau sudah siap konsepnya baru orang tua/wali dikumpulkan untuk mengesahkan. konsep tersebut, demikian Bapak Jupri sudarmo selaku tokoh masyarakat dari SMP.Negeri 1 Jetis tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sekolah, mengungkapkan dalam wawancara hari Sabtu, 5 Agustus 2011.

Di lain pihak orangtua/wali murid tidak di minta dalam sumbangan tenaga. tetapi apabila sekolah meminta orang tua wali murid untuk gotong royong membangun sarana juga mau melaksanakan karena bisa mengurangi jumlah sumbangan, sebagian besar dari orang tua murid mengatakan demikian, bahwa sekolah itu mahal sementara kami sering mendengar bahwa sekolah itu gratis dari Sekolah Dasar sampai Sekolah lanjutan Pertama / Sekolah Tingkat Pertama (SMP) .

Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik sekolah, subag Didasmen selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, mengungkapkan; mekanisme pelaksanaan pembangunan fisik sekolah sepenuhnya dikelola oleh SMP/MTs yang bersangkutan karena sekarang sudah ada otonomi sekolah, keterlibatan orangtua/wali murid sebagai perwakilan masyarakat ditentukan oleh sekolah melalui musyawarah bersama dengan dewan sekolah atau orangtua/wali murid dalam pertemuan perencanaan pembangunan sekolah. Namun pembangunan fisik sekolah pasca gempa bumi 2006 beberapa sekolah sudah dibantu oleh

masyarakat bahkan mereka hanya menerima kunci barang sudah jadi semua seperti halnya untuk SMP negeri 1 dan SMP.Negeri 2 Jetis.

Beberapa pendapat di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pembangunan fisik sekolah cukup tinggi yaitu kesediaan untuk memberi kontribusi atau dukungan dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah berupa barang, uang, buah pikiran, tenaga dan ketrampilan. Kontribusi yang diberikan warga masyarakat tersebut dibangun atas prakarsa sekolah atau masyarakat dengan semangat gotong-royong. Namun demikian bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan bersama dalam musyawarah sekolah dengan dewan sekolah dan orangtua/wali. Tidak semua SMP/MTs di Kecamatan Jetis mengikut sertakan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Setiap sekolah memiliki kebijakan tidak atau mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan berbagai pertimbangan.

Kemauan dan kemampuan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi pada dasarnya berasal dari kesadaran diri masyarakat yang bersangkutan, sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak sekolah yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga dalam suatu masyarakat, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga sebaliknya, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh sekolah atau penyelenggara pendidikan untuk turut serta berpartisipasi, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Beberapa SMP yang menetapkan kebijakan untuk tidak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah diantaranya adalah:

- 1) Pertimbangan waktu: dikawatirkan jika melibatkan partisipasi masyarakat proses pembangunan tidak selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Pertimbangan Kualitas: untuk menjamin kualitas hasil pembangunan maka sekolah lebih mempercayakan kepada pengembang yang telah terbukti.

Dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah, pendekatan cenderung pada tujuan yang memandang hubungan kewenangan dalam sebuah proses yang partisipatif mengarah pada upaya-upaya perubahan dan pemberdayaan dari masyarakat, sehingga harus ada kesamaan hubungan kewenangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program atau kebijakan pembangunan. Artinya, masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung, sehingga mereka mengetahui apa yang diputuskan dan manfaat yang akan diambil pada saat program diimplementasikan dan selesai dijalankan

Komunikasi yang kuat antara pihak sekolah, dewan sekolah dengan masyarakat akan mampu memunculkan dialog antara sekolah atau penyelenggara pendidikan dan masyarakat. Masyarakat adalah orang yang paling tau tentang kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah sosial yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, akan lebih efektif dan efisien dalam membuat kebijakan pembangunan fisik sekolah. Komunikasi dibangun melalui sosialisasi yang cukup memadai, hal ini tidak mengurangi aktivitas dan respon masyarakat dalam menanggapi pembangunan fisik sekolah. Mekanisme komunikasi ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, musyawarah sekolah, laporan, jadwal pelaksanaan program yang disusun secara jelas dan diinformasikan kepada seluruh stakeholder yang diadakan setiap 3 bulan antara sekolah dengan masyarakat dan dewan sekolah/komite sekolah.

Dari hasil pendalaman materi melalui pengumpulan informasi dari masyarakat, diperoleh keterangan bahwa proses

pembangunan fisik sekolah tidak secara langsung dikomunikasikan dengan orangtua/wali baik dalam bentuk pemberitahuan tertulis maupun pelaporan hasil pembangunan. Karena sejauh ini, proses pembangunan tidak secara langsung dikomunikasikan dengan orangtua/wali murid. Mereka hanya dapat mengamati secara fisik apakah pembangunan tersebut sudah selesai atau belum, dan ketika masyarakat merasa proses pembangunan .

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara diperoleh informasi Kepala Sekolah cukup baik dan mampu mengajak dan mendorong masyarakat untuk terlibat secara intensif dalam proses dan pelaksanaan pembangunan fisik sekolah, meskipun pada kenyataannya masyarakat lebih bersikap patronase, di mana seluruh keputusan program yang akan dilaksanakan serta kehendak masyarakat umumnya digantungkan kepada pihak sekolah yang mereka percaya menjadi pelaksana pembangunan.

Upaya-upaya pelaksanaan pembangunan fisik sekolah tidak secara serta merta dapat terwujud dan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, melainkan harus melalui proses berliku-liku yang akan menghabiskan banyak waktu serta tenaga, dan tampaknya harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki integritas dan hati nurani yang jernih, karena dalam pelaksanaannya masyarakat akan banyak mempergunakan mekanisme komunikasi timbal balik, mendengar dan menampung dengan penuh kesabaran, dan sikap toleransi dalam menghadapi pandangan yang berbeda (*community approach*).

Strategi pembangunan di Indonesia pada umumnya adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat (*people empowering*). Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti *pertama*

sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan; *kedua* sebagai program dan *ketiga* sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Kartasasmita (1997) menyebutkan bahwa studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya partisipasi (politik) masyarakat, bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan.

Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal : 1) Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan. 2) Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut. 3) Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut. 4) Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan. Untuk itu pembangunan fisik sekolah harus diselaraskan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, disamping memerlukan pemahaman tentang pembangunan itu sendiri, juga sangat diperlukan komitmen dan keseriusan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah.

Secara umum, komitmen merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam pelaksanaan program. Komitmen merupakan langkah atau tindakan yang diambil untuk menopang suatu pilihan tindakan tertentu, sehingga pilihan tindakan itu dapat dijalankan dengan mantap dan sepenuh hati. Komitmen dan keseriusan dalam pelaksanaan program merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam dukungannya terhadap pelaksanaan pembangunan fisik sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen dan keseriusan sekolah dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah, sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan pembangunan fisik sekolah yang terencana dan berkelanjutan. Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan fisik sekolah sebagai bagian dari kegiatan pendidikan yang merupakan tanggung jawab antara sekolah, pemerintah dan masyarakat. Signifikansi tanggungjawab tersebut pada kondisi tertentu lebih besar kepada pemerintah, tetapi pada kondisi lain lebih besar ada pada masyarakat. Atau bahkan selalu dalam keadaan yang memiliki porsi yang sama antara pemerintah dengan masyarakat.

Wujud partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa sumbangan pemikiran, dana atau uang, dan juga tenaga untuk pengerjaan pembangunan tersebut. Sekolah dan dewan sekolah tidak mematok jumlah sumbangan atau iuran yang harus dibayarkan, komitmen sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan adalah manfaat bagi proses pembelajaran kepada siswa. Sekolah juga memiliki komitmen untuk dapat mempertanggung jawabkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan diselenggarakan kepada masyarakat.

Bapak Giyatmo selaku salah satu orangtua/wali murid mengungkapkan: Komitmen masyarakat adalah memenuhi kewajibannya kepada sekolah selama anaknya masih menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Orangtua akan mendukung sepenuhnya program yang dilaksanakan sekolah agar anaknya dapat mencapai prestasi yang baik. Dalam pembangunan sarana sekolah semua sudah diputuskan dalam musyawarah pihak sekolah, dewan sekolah dan orangtua/wali murid, sehingga kami berusaha untuk mematuhi terhadap kesepakatan yang telah dibentuk. Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Tika.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh informan tersebut di atas, pihak komite sekolah bersama wali murid, bertanggung jawab dalam pembangunan yang diselenggarakan di sekolah. Masyarakat tetap memiliki tanggung jawab yakni memiliki komitmen dan keseriusan yang tinggi terhadap seluruh aktivitas pemerintahan dalam bidang pendidikan yang terjadi di wilayahnya terutama berkaitan dengan pembangunan fisik sekolah.

Dampak pembangunan akan dirasakan oleh masyarakat. Jika ada sebagian masyarakat hanya berpartisipasi melalui kontribusi biaya atau barang material yang mereka miliki maka yang lainnya dapat memberikan kontribusi berupa tenaga atau pemikiran. Setiap pihak saling memahami akan kekurangan dan keterbatasan masing-masing sehingga dapat saling *take and give*. Komitmen dan keseriusan masyarakat yang tinggi sangat penting yang akan menentukan kegagalan dan keberhasilan program yang dilaksanakan.

Pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan di sekolah (SMP/Madrasah) merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan nasional. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab utama dalam pelayanan pendidikan di masing-masing sekolah SMP/madrasah, penyediaan sarana pendukung pendidikan di masing-masing sekolah/madrasah-pertahapan partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang menjadi p dituntut untuk mempunyai kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan khususnya pengadaan fisik sekolah demi peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan.

Jika setiap stakeholder dapat memainkan peran aktif dan bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan pelayanan pendidikan baik perumusan, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan serta evaluasi, maka dapat terjalin ikatan emosional yang kuat antara penyelenggara pendidikan dengan

masyarakat, dan antara masyarakat dengan program pembangunan tersebut.

Realisasi pembangunan fisik sekolah dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, namun demikian ketepatan waktu dan penyelesaian pembangunan fisik sekolah terdapat beberapa perbedaan pada masing-masing sekolah karena dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing sekolah, situasi dan kondisi. Hal ini dapat menggambarkan bahwa aspek partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah adalah tinggi, yang dapat dibuktikan dengan antusias masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pembangunan tersebut, masyarakat terlibat dan ikut berpartisipasi secara langsung dan penuh tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Sistem komunikasi dapat dilaksanakan dua arah dengan baik antara penyelenggara dan pelaksana pembangunan fisik sekolah sehingga segala informasi terkait penyelenggaraan pembangunan fisik sekolah dapat berjalan lancar.

Pada tahap pelaksanaan rekonstruksi atau pembangunan fisik sekolah pasca gempa, tugas dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pihak Pemberi Bantuan/Donor secara kontinyu agar segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan rekonstruksi/rehabilitasi gedung sekolah/madrasah dapat diketahui sesegera mungkin.
2. Melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan, dalam rangka memberikan bantuan/pembinaan teknis kepada Panitia Pelaksana Pembangunan, kemajuan pelaksanaan pekerjaan, administrasi dan pencatatan keuangan secara kontinyu.

3. Bersama-sama dengan tokoh masyarakat setempat maupun Pejabat Pemerintah Daerah (sesuai keperluannya) memberikan bantuan dalam penyelesaian masalah/kendala yang terjadi.
4. Mengingatkan kepada Panitia Pelaksana Pembangunan perihal transparansi dan akuntabilitas yang berkaitan dengan penggunaan dana program hibah rekonstruksi/rehabilitasi gedung sekolah/ madrasah dalam bentuk pemberian informasi kepada masyarakat.

Ada beberapa temuan dalam Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Sekolah

1. Untuk berpartisipasi terhadap pendidikan, masyarakat memiliki kesadaran.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah ditentukan dalam keputusan hasil musyawarah pihak sekolah dengan dewan sekolah dan orangtua/wali murid.

Solusi atau proposisi dalam temuan diatas adalah: Dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah atas hasil musyawarah, masyarakat memiliki kesadaran.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Atau Evaluasi

Sesuai dengan tujuan utama peningkatan partisipasi di bidang pendidikan (Depdiknas, 2005) yaitu untuk :

1. Meningkatkan dedikasi/ kontribusi stakeholders terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa, pemikiran, intelektualitas, ketrampilan, moral, finansial dan material / barang.
2. Memberdayakan kemampuan yang ada pada stakeholders bagi pendidikan untuk pendidikan nasional.
3. Meningkatkan peran stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik sebagai

advisor, supporter, mediator, controller, recourse linker, dan education proder.

4. Menjamin tiap adanya setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi *stakeholders* dan menjadi aspirasi *stakeholders* sebagai penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Pada tahapan ini Tjokroamidjoyo 1992 (Ainurohman, 2009:45) mengartikan sebagai keterlibatan dalam memetik dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pelaksanaan program pembangunan sangat penting dilakukan, mulai dari tahap pengambilan keputusan sampai pada tahap evaluasi program. Hal ini, karena keterlibatan masyarakat dalam membuat kebijakan dapat memberikan manfaat besar terhadap kepentingan masyarakat di bidang pendidikan secara luas, diantaranya meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat dan sebagai sumber bahan masukan terhadap penyelenggara pendidikan/sekolah sebelum memutuskan program pembangunan yang hendak dilaksanakan.

Dampak langsung yang dapat dirasakan dengan adanya pembangunan fisik sekolah oleh masyarakat khususnya para siswa dimana aktivitas siswa yang semakin meningkat termasuk dalam kegiatan praktikum, karena setelah dilakukan pembangunan sarana fisik sekolah, siswa dapat menggunakan fasilitas pendukung pendidikan seperti laboratorium, ruang ketrampilan, sarana olah raga dan sebagainya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengeksplorasi teori yang disampaikan di dalam kelas yang kemudian diaplikasikan pada praktek secara nyata.

Berdasarkan pengamatan dalam penelitian ini, hasil pembangunan fisik sekolah di SMP/MTs sangat dirasakan

manfaatnya oleh sebagian besar siswa dan masyarakat pada umumnya. Hal ini juga didukung oleh beberapa pernyataan informan, bahwa pengawasan dalam pembangunan sekolah tentunya menjadi tanggungjawab pengembang atau pemborong bangunan, namun demikian kami tetap mengawasi progres pembangunan tersebut, karena kami harus memastikan hasil dan dampak langsung bagi siswa khususnya dari pembangunan tersebut. Adapun keterlibatan masyarakat dalam tahapan ini adalah untuk ikut serta dalam pengawasan proses pembangunan sarana fisik sekolah.

Dengan melihat kondisi fisik sekolah saat ini, partisipasi masyarakat lebih diarahkan pada perawatan dan pemeliharaan serta peningkatan mutu pendidikan. Untuk selanjutnya, masyarakat tidak lagi dibebankan pada pembangunan fisik tetapi lebih pada pemeliharaan seperti pengecatan dan perawatan kebersihan. dan, kegiatan siswa menjadi lebih banyak lagi seperti penambahan jam praktikum dan ekstra kurikuler.

Sedangkan hasil wawancara dengan Dewan Sekolah, bahwa sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan di tingkat daerah yaitu menuntaskan pendidikan dasar sembilan tahun, pelaksanaan program pembangunan fisik sekolah memang memberikan manfaat bagi masyarakat dimana pembangunan fisik sekolah tersebut dilaksanakan, setidaknya memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah terdekat yang tersedia di lingkungannya. Melihat sarana dan prasarana sekolah yang lengkap, siswa akan merasa bangga dan nyaman selama menempuh pendidikan serta mampu meraih prestasi yang tinggi, dan secara langsung para siswa dapat merasakan manfaat pembangunan sarana fisik sekolah untuk kegiatan praktikum, ekstra kulikuler dan mengembangkan ketrampilan siswa. Selanjutnya manfaat bagi sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan mendukung

akreditasi sekolah, siswa lebih proaktif terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah.

Pernyataan informan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa bentuk partisipasi warga dalam menghadapi dampak langsung dari pembangunan fisik sekolah adalah melalui respon positif terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, menjadikan rangsangan untuk merumuskan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi kepentingan pelaksanaan pendidikan. Dampak pembangunan sarana sekolah juga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, yaitu Fasilitas sekolah yang dibangun sesuai dengan keinginan dan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembelajaran. Partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan juga sangat tinggi, karena pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan manfaat yang optimal dalam peningkatan kegiatan sekolah. Rasa kepemilikan yang tinggi dari masyarakat menyebabkan warga dengan senang hati bersedia dalam menjaga dan memelihara fasilitas pendidikan dengan baik.

Program pembangunan fisik sekolah yang dilaksanakan telah mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak terlepas dari adanya pemberian kesempatan untuk masyarakat terlibat secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut program kegiatan dan pembangunan fisik sekolah. Dengan demikian masyarakat akan merasa bahwa hasil pembangunan yang dilaksanakan juga merupakan milik mereka sendiri "*sense of belonging*" yang tinggi dalam sanubari masyarakat, sehingga apabila dituntut agar menjaga hasil tersebut masyarakat tidak merasa keberatan. Oleh karenanya, keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur sekolah sebagai fasilitas pendidikan bagi masyarakat, akan sangat penting guna kelangsungan manfaat atau dampak secara langsung yang

dapaat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya bagi putra-putrinya yang sedang menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

a. Partisipasi Dalam Memanfaatkan Hasil Yang Diperoleh Masyarakat

Dalam memanfaatkan hasil dari pelaksanaan pembangunan fisik sekolah, masyarakat Bantul merasa dapat menikmati dan memanfaatkan sarana sekolah. Gambaran yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil dari fisik sekolah diantaranya; masyarakat lebih termotivasi untuk menyekolahkan anaknya karena melihat sarana dan prasarana sekolah yang sudah memadai, selain itu, siswa lebih memanfaatkan sarana pendukung sekolah yang telah tersedia untuk mengembangkan bakat dan ketrampilan, serta meningkatkan kegiatan baik secara individu maupun kelompok yang terbentuk dalam organisasi sekolah. Siswa memanfaatkan adanya sarana pendukung sekolah dengan sungguh-sungguh.

Pada dasarnya pembangunan sarana pendukung sekolah adalah untuk meningkatkan kegiatan sekolah, sehingga ketika fasilitas tersebut sudah tersedia, maka pihak sekolah langsung memanfaatkan untuk kepentingan siswa melalui guru bidang studi yang terkait. Siswa dapat menggunakan sarana tersebut untuk meningkatkan ketrampilan dan bakat yang seluas-luasnya. Selain itu pendapat tokoh masyarakat juga mengungkapkan, bahwa pembangunan fisik sekolah pada dasarnya memberikan output positif bagi masyarakat, dengan tersedianya prasarana pendukung pendidikan tentunya akan meningkatkan efektivitas belajar mengajar dan mampu mengembangkan ketrampilan siswa untuk peningkatan mutu pendidikan itu sendiri.

Selanjutnya pendapat orang tua / wali siswa pada dasarnya mengungkapkan, bahwa setelah tersedia sarana pendukung sekolah yang lengkap seperti saat ini, anak saya lebih aktif dalam kegiatan sekolah, baik dalam organisasi sekolah

maupun dalam pengembangan bakat dan ketrampilan melalui ekstra kulikuler sekolah.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas dapat diartikan bahwa, seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan fisik sekolah juga ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan hasilnya melalui berbagai aktivitas seperti pengembangan bakat dan ketrampilan siswa, praktikum siswa dan aktivitas pendidikan yang lainnya, terutama aktivitas yang mendukung proses pembelajaran. Aktivitas siswa yang telah ada sebelumnya menjadi lebih meningkat. Sedangkan manfaat bagi sekolah adalah masyarakat lebih proaktif terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah dan mendukung penuntasan program pendidikan dasar sembilan tahun khususnya di Kabupaten Bantul.

b. Partisipasi Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Sekolah

Sesuai hasil penelitian di lapangan tentang pemantauan terhadap progress atau hasil yang telah dicapai, dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan fisik secara berkala. Dalam pelaksanaannya yang terlibat adalah penanggungjawab pelaksanaan pembangunan, dimana setiap periode yang telah ditetapkan kepala sekolah selalu berkoordinasi dengan dewan sekolah dan anggota pembangunan untuk membahas apa yang telah dicapai dan apa yang akan dikerjakan pada periode selanjutnya.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan terkait pada pengawasan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan fisik sekolah, bahwa dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik sekolah dilakukan secara langsung oleh kepala pelaksana pembangunan, mungkin masyarakat hanya melihat saja seberapa lama proses pembangunan tersebut di laksanakan, intinya pihak sekolah memberikan ruang bagi

masyarakat untuk ikut mengawasi proses pembangunan, tetapi pengawasan secara langsung adalah dilakukan tenaga pelaksana dan Bawasda Kabupaten Bantul.

Selain itu sekolah selalu melaporkan kepada dewan pendidikan juga ke Dinas Pendidikan Nasional setiap periode tertentu/ setiap ada perkembangan, paling tidak satu kali dalam setahun pada tutup ajaran baru termasuk melaporkan hasil studi siswa serta keadaan sekolah secara menyeluruh.

Berikut pendapat – pendapat tokoh masyarakat dan orang tua /wali siswa bahwa dalam pelaksanaan pembangunan semua diserahkan kepada sekolah dan dewan sekolah untuk melakukan pengawasan secara langsung. Namun demikian jika masyarakat menemukan sesuatu yang kurang sesuai dalam pelaksanaan pembangunan sekolah maka kami memiliki hak untuk melakukan evaluasi.

Berdasarkan kutipan wawancara dengan informan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat tidak terlibat langsung dalam pengawasan pelaksanaan dan evaluasi pencapaian hasil pembangunan karena sudah ada yang bertanggung jawab untuk membuat catatan atau laporan pekerjaan secara periode tertentu.

Namun demikian masyarakat dan penerima program pembangunan fisik sekolah dapat memberikan masukan atau laporan apabila masih ada kekurangan-kekurangan yang belum dilaporkan. Masyarakat tidak terlibat langsung dalam evaluasi dan penilaian terhadap target dan realisasi pelaksanaan pembangunan fisik sekolah. karena sudah ada yang bertanggung jawab untuk membuat catatan atau laporan pekerjaan.

Temuan dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Atau Evaluasi adalah:

1. Masyarakat dan orangtua/wali murid tidak terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan fisik sekolah.
2. Kebijakan yang ditetapkan dalam musyawarah bersama antara pihak sekolah dengan dewan sekolah dan orangtua/wali murid membentuk sikap taat dan

menghormati bagi setiap orangtua/wali murid dan memberikan kepercayaan kepada tim pelaksana pembangunan untuk mewujudkan perencanaan yang telah disepakati.

Dari temuan-temuan diatas maka solusi atau proposisinya adalah: dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan fisik sekolah, orang tua siswa tidak terlibat langsung. karena terbentuk sikap taat dan menghormati sekolah.

B. Faktor Pendukung Partisipasi

1. Kebijakan Pemerintah

Temuan dalam penelitian ini adalah mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Bantul dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah.

Pertama adalah adanya otonomi sekolah sebagai kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang diberikan oleh otoritas kebijakan di tingkat kabupaten kepada masing-masing sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pendidikan. Kewenangan tersebut meliputi perumusan pembangunan dan sumber dana.

Kedua pengelolaan dana pembangunan yang bersumber dari sekolah, subsidi pemerintah dan swadaya masyarakat.

Adanya otonomi sekolah tersebut menyebabkan bentuk partisipasi masyarakat antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain berbeda. Pemberian otonomi dalam pembangunan sekolah tersebut didasarkan pada karakteristik dan potensi yang dimiliki masyarakat sekitar sekolah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul bahwa arah kebijakan pembangunan di bidang pendidikan ada 7, antara lain ;

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme kependidikan
2. Meningkatkan kualitas lembaga
3. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan
4. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah pelayanan
5. Memantapkan sistem prinsip desentralisasi
6. Mengembangkan kualitas SDM anak sedini mungkin
7. Mengembangkan sistem pendidikan sekolah bermuatan lokal.

Secara *rinci* ke dalam program-program yaitu: Meningkatkan kegiatan pelatihan keterampilan guru, Meningkatkan kesempatan guru untuk mengikuti pendidikan untuk memperoleh kualifikasi S1 (strata satu) S2 (strata dua) dan S3 (Strata Tiga) dengan diberi dana, Meningkatkan kegiatan diklat guru dan tersedianya sumber belajar; Peningkatan, perbaikan, sarana prasarana, dan Melaksanakan revitalisasi serta penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap. Meningkatkan pelaksanaan program Kejar Paket A, B dan C serta SKB, SMP Terbuka dan SD-SMP Satu Atap, Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu; dan Memberdayakan SKB secara optimal”serta Pembinaan berwirausaha misalnya bagi siswa yang melanjutkan ke SMP diberi hadiah satu pasang ayam untuk dipelihara dan diberi bibit untuk menanam jati demi masa depan.

Secara lokal juga Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pendidikan adalah mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap terjadinya bencana alam, sehingga pasca terjadinya bencana alam tahun 2006, arah pembangunan mengarah pada pembelajaran tentang tanggap dan penanggulangan terhadap bencana alam untuk meminimalisir korban bencana. Tetapi secara nasional, kebijakan Dinas Pendidikan sama seperti dengan daerah-daerah lain yaitu mengembangkan otonomi sekolah. Dengan adanya otonomi sekolah diharapkan jalur kebijakan vertikal akan terurai, artinya sekolah dapat cepat tanggap dan memberikan

sikap yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan.

Lebih lanjut dijelaskan pembangunan fisik sekolah sepenuhnya dikelola oleh masing-masing sekolah atau, setiap sekolah mendapatkan kewenangan untuk mengelola potensi sekolah dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat lokal atau orangtua/wali murid yang menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.

Adanya Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang mengarah pada penerapan kurikulum yang adaptif terhadap penanggulangan bencana alam. Dikatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan, proses rekonstruksi atau pembangunan kembali gedung-gedung sekolah pasca gempa sudah selesai. Kebijakan selanjutnya adalah mengembangkan tindakan preventif terhadap bencana alam, sehingga upaya tersebut diharapkan dapat dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan di setiap sekolah. Selanjutnya upaya pembangunan sekolah lebih mengarah untuk melengkapi fasilitas sekolah seperti laboratorium, perpustakaan atau fasilitas olah raga, dan semuanya diberikan kewenangan kepada masing-masing sekolah untuk menyelenggarakan.

Peran Kecamatan dalam pendidikan khususnya di daerah Jetis yaitu memberikan motivasi kepada warga agar paham betul tentang arti pendidikan dan mengkondisikan masyarakat yang ramah lingkungan, santun dalam berbahasa dan taat beragama, ini terlihat di daerah ini termasuk daerah yang aman, masyarakat tidak reko-reko, apalagi seingat saya selama pasca gempa masyarakat ini tidak ada yang bermasalah terhadap bantuan-bantuan dan mereka siap antri untuk menunggu giliran mereka / masyarakat dapat bantuan, termasuk bantuan untuk rehap rumah, dalam hal pembangunan gedung-gedung sekolah Kecamatan hanya sebagai motivator masyarakat, dan pembangunan fisik itu

sudah menjadi wewenang Kabupaten dalam hal ini dulu ada badan yang dibentuk dalam penamngulangan dampak yang disebut satuan koordinasi pelaksana daerah (SATKORLAK). Kalau pendidikan mereka bekerja sama dengan Depdiknas Bantul”.

Sejak tahun 2005 ada kebijakan program bantuan operasional sekolah (BOS) Secara Nasional ada kebijakan Pemerintah seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2008 yang menjadi acuan utama program BOS tahun 2010. dengan menetapkan dana dengan ketentuan:

- 1) SD/SDLB di kota Rp.400.000,-/ siswa
- 2) SD/SDLB di kabupaten Rp.397.000,-/ siswa
- 3) SMP/SMPLB di kota Rp.575.000,-/ siswa
- 4) SMP/SMPLB di Kabupaten Rp.570.000,-/ siswa

Secara khusus program BOS bertujuan untuk :

- a Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri dari biaya operasional sekolah. Terkecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), dan sekolah bertaraf internasional (SBI)
- b Menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh punggutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta
- c Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah negeri maupun swasta.

Sedangkan waktu penyaluran diberikan selama 12 bulan dilakukan 3 bulanan, yaitu periode januari – maret, April – Juni, Juli -September, dan Oktober – Desember

Pemerintah Kabupaten Bantul tetap berupaya untuk menanamkan persepsi kepada masyarakat atas program sekolah gratis dan mensukseskan program pendidikan dasar sembilan tahun sebagai komitmen yang harus direalisasikan. Kebijakan pemerintah tersebut juga telah mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah secara non materi tinggi, selanjutnya pemerintah juga

memberikan himbauan kepada sekolah untuk tidak mengadakan pungutan dana pembangunan fisik sekolah dalam bentuk materi karena mempertimbangkan faktor sosial ekonomi masyarakat Bantul khususnya pasca gempa yang menyebabkan perekonomian masyarakat Bantul menurun.

Berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul di bidang Pendidikan adalah menyangkut tujuh hal, antara lain: (1) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme tenaga kependidikan; (2) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah; (3) Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan; (4) Meningkatkan kualitas lembaga dan pelayanan perpustakaan; (5) Melaksanakan pembahasan dan pemantapan sistem pendidikan berdasarkan prinsip desentralisasi manajemen pendidikan; (6) Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia anak-anak dan remaja sedini mungkin secara bertahap, terarah dan terpadu; dan (7) Mengembangkan sistem pendidikan sekolah bermuatan lokal.

Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul menjabarkan ke dalam program pembangunan di bidang pendidikan lebih rinci ke dalam program-program yaitu: *Pertama*, Program pembinaan tenaga kependidikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guru (tenaga pendidik). Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia (guru) dan pembinaan kesenian, meningkatkan kualitas pendidikan sekolah, meningkatkan jumlah guru yang mengikuti pendidikan untuk memperoleh kualifikasi S1 (strata satu). Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) Meningkatkan kegiatan pelatihan keterampilan guru; (2) Meningkatkan kesempatan guru untuk mengikuti pendidikan strata satu; (3)

Meningkatkan kegiatan diklat guru dan tersedianya sumber belajar.

Kedua, program peningkatan, perbaikan, pengembangan dan pemerataan fasilitas kependidikan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan fasilitas prasarana gedung sekolah, mengembangkan bantuan untuk sarana sekolah, meningkatkan efisiensi operasionalisasi pelaksanaan PBM. Sasaran yang akan dicapai oleh program ini terwujudnya fasilitas prasarana gedung sekolah dan sarana fasilitas sekolah yang memadai serta terwujudnya efektivitas proses belajar mengajar. Kegiatan pokok dalam mengupayakan program ini adalah: (1) Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana sekolah; dan (2) Melaksanakan revitalisasi serta penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap.

Ketiga, program peningkatan prasarana dan sarana pendidikan. Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan daya tampung siswa sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan yang memadai. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah meningkatnya kuyalitas pendidikan. Kegiatan pokok dalam pelaksanaan program ini adalah: (1) Meningkatkan pengadaan dan pendistribusian alat pendidikan, buku paket dan buku perpustakaan; (2) Memberikan bantuan untuk pembangunan gedung sekolah dan meubelernya; (3) Menambah ruang belajar mengajar (kelas baru); dan (4) Menambah jumlah guru sesuai dengan kebutuhan.

Keempat, program peningkatan mutu pendidikan dasar sembilan tahun bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang mampu dan rawan putus sekolah. Sasaran pelaksanaan program ini adalah terealisasinya pemberian bantuan biasiswa dan optimalisasi pemebrian bantuan GNOTA bagi masyarakat yang kurang mampu, berkurangnya jumlah anak putus sekolah, meningkatnya kesempatan belajar bagi masyarakat kurang mampu dan meningkat pemerataan pendidikan. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan adalah: (1) Meningkatkan pemberian bantuan biasiswa bagi keluarga miskin dan rawan putus sekolah; (2) Membentuk SD Jendral sebagai SD Percontohan; (3) Meningkatkan pelaksanaan program Kejar Paket A, B dan C serta SKB, SMP Terbuka dan SD-SMP Satu Atap; (4) Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu; dan (5) Memberdayakan SKB secara optimal.

Kelima, program peningkatan mutu pendidikan olah raga dan kebudayaan daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru olah raga, mengenalkan dan melestarikan budaya lokal guna memperkokoh budaya nasional. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah meningkatkan prestasi atlet siswa dan dilaksanakan untuk meraih tujuan program antara lain: (1) Menyediakan prasarana dan sarana kesenian; (2) Melaksanakan pembinaan di bidang olah raga dan kesenian; (3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru olah raga dan kesenian; dan (4) Melaksanakan kegiatan pameran dan pagelaran kesenian tradisional melalui safari seni dan budaya.

Keenam, program peningkatan manajemen pendidikan dasar berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memperbaiki manajemen pendidikan dasar berbasis pada masyarakat, terbentuknya Dewan Pendidikan Sekolah dan Majelis Madrasah/Dewan Pendidikan Luar Sekolah serta terwujudnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan gugus sekolah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah: (1) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan manajemen pendidikan dasar berbasis pada masyarakat; (2) Membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah/Dewan Pendidikan Luar Sekolah; dan (3) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan gugus sekolah.

Ketujuh program peningkatan kreasi, karya dan apresiasi pemuda. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemuda kreatif, berkarya dan apresiasif. Sasaran program yang akan dicapai adalah meningkatnya pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan dan kepramukaan bagi pemuda. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah: (1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemuda tentang manfaat dan kegunaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) Mengembangkan kewirausahaan pemuda yang berorientasi global; (3) Memberdayakan sanggar kegiatan belajar (SKB) bagi masyarakat; dan (4) Melaksanakan kegiatan pemilihan siswa teladan dan pertukaran pemuda dan pelajar.

Kedelapan, program pengkajian kurikulum berbasis kompetensi dasar sesuai kebutuhan dan potensi pembangunan daerah. Program ini bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum yang mencakup muatan lokal. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah: (1) Mengkaji dan mengembangkan kurikulum Pendidikan yang mencakup muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah; (2) Mengembangkan sistem dan alat ukur penilaian yang lebih efektif untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan; (3) Mengembangkan proses akreditasi secara adil dan merata; dan (4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja sekolah.

Kedelapan program yang diuraikan di atas selalu menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan sektor pendidikan kabupaten Bantul, sedangkan proses pencapaiannya dilakukan secara bertahap. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan (observasi) dan juga berdasarkan data di Diknas kabupaten Bantul menunjukkan setiap tahun untuk masing-masing unit program pengembangan tersebut terus menunjukkan adanya peningkatan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, yaitu unit program: (a) Pembinaan tenaga kependidikan; (b) Peningkatan prasarana dan sarana pembelajaran di sekolah; (c) Peningkatan, perbaikan,

pengembangan dan pemerataan fasilitas pendidikan di Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas; (d) Meningkatkan mutu pendidikan dasar masyarakat; (3) Pembinaan kebahasaan, kesusastraan dan perpustakaan; (f) Meningkatkan mutu pendidikan oleh raga dan kebudayaan daerah; (g) Peningkatan manajemen pendidikan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas berbasis pemberdayaan masyarakat; (h) Peningkatan kreasi karya dan apresiasi pemuda; dan (i) Peningkatan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

2. Swadaya Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai dukungan masyarakat dengan ukuran kemauan masyarakat untuk mendukung setiap tahapan dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah, baik dukungan dalam bentuk waktu, uang maupun tenaga.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sekolah merupakan kerjasama yang erat antara penyelenggara pendidikan atau sekolah dengan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan fisik sekolah sangat tinggi. Hal ini tercermin pada keikutsertaan masyarakat dalam turut serta andil dalam pengerjaan program pembangunan fisik sekolah. Masyarakat turut berpartisipasi memberikan waktu, tenaga dan biaya yang digunakan dalam kelancaran pembangunan. Masyarakat juga turut berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan dan berupaya turut melestarikan serta mengembangkan kegiatan pembangunan.

Sebagai bukti, di SMPN.1 Jetis pada saat peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat sebagai

informan terkait dengan dukungan dan swadaya masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan fisik sekolah. Hasil pendapatnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung setiap tahap dalam pelaksanaan program relatif tinggi. Ini terlihat dengan partisipasi wali murid dalam bentuk ikut rapat, membahas jumlah sumbangan wali murid tetapi dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana sekolah semua dilakukan oleh sekolah dari proyek sekolah atau bantuan dari darmawan donatur dan pemerintah, dalam hal ini wali murid tidak di minta dalam sumbangan berupa materil maupun tenaga terkecuali berupa tambahan uang, tetapi apabila sekolah meminta wali murid untuk gotong royong membangun sarana juga mau melaksanakan karena bisa mengurangi jumlah sumbangan dan kalau ikut harapanya bisa memberi semangat ke anak untuk menunjang kegemaran anak, hal ini terkecuali untuk SMP N.1 Jetis untuk mensiasati ada PP nomor 10 t1hun 2009 bahwa dewan sekolah dan sekolah tidak boleh memunggut uang dari orang tua siswa maka dibentuk peguyuban peduli pendidikan sebagai sarana orang tua wali murid kalau berpartisipasi atau menyumbang boleh berupa fikiran, uang, semen, pasir dan tenaga. untuk melengkapi fisik yang kurang misalnya pada saat ada bantuan alat kesenian dari pusat tapi belum ada tempatnya, demikian juga baru-baru ini ada bantuan 20 unit computer juga belum ada tempatnya yang sementara ini ditempatkan di ruang pertemuan.

Kutipan wawancara di atas menunjukkan dukungan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan program muncul atas kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Kemauan dan kemampuan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi serta dukungan diberikan demi keberhasilan program, dibangun atas prakarsa masyarakat dan disepakati dalam musyawarah antara pihak sekolah, dewan sekolah dan orangtua/wali murid dan dengan semangat gotong-royong.

Temuan dalam faktor pendukung masyarakat adalah:

1. Swadaya masyarakat dalam proses pembangunan fisik sekolah masih terbatas, adanya kebijakan larangan untuk melakukan pungutan kepada orangtua/wali murid, karena sudah ada bantuan biaya operasional sekolah (BOS) salah satunya yang rutin.
2. Di SMPN.1 jetis dibentuk peguyuban peduli pendidikan oleh masyarakat yang dimotivasi oleh dewan sekolah, sebagai cara untuk mengatasi kesulitan dalam sekolah tersebut.
3. Kegiatan partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai upaya mobilisasi kepentingan pemerintah atau sekolah, kebijakan penyaluran bantuan tidak merata dan sekolah belum siap operasionalnya

Proposisi dari temuan diatas adalah Faktor pendukung, kebijakan, bantuan dari pemerintah dan kesadaran swadaya masyarakat yang memperkuat otonomitas sekolah, dibentuk peguyuban peduli pendidikan, dan upaya mobilisasi kepentingan birokrat merupakan factor penghambat.

C. Faktor Penghambat

1. Koordinasi dan Komunikasi

Untuk komunikasi dan koordinasi antara sekolah dan orang tua/ wali muris serta dewan sekolah pada prinsipnya tidak ada hambatan yang berarti, karena hal itu bisa dilakukan melalui siswa dan alat komunikasi lisan dan tertulis. Ini dilakukan lebih pada sarana untuk mensosialisasikan program-program yang sudah di konsep oleh sekolah/ Kepala Sekolah dan Dewan Sekolah.

Sedangkan hakekat Partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi

masukannya berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya. Selama ini, penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam kenyataannya masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai upaya mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau sekolah.

Partisipasi tersebut idealnya berarti masyarakat ikut menentukan kebijakan pemerintah yaitu sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakannya. Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sekolah masih sangat rendah bila ditinjau dari arti partisipasi itu sendiri. Hal-hal yang menjadi penghambat rendahnya partisipasi masyarakat tersebut, seperti diungkapkan oleh beberapa kepala Sekolah, bahwa masyarakat tetap dilibatkan dalam pembangunan fisik sekolah. Namun, hambatannya jika melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sekolah diantaranya kinerjanya atau tingkat kedisiplinannya sangat rendah jadi memerlukan pengawasan yang terus-menerus, karena mereka terbiasa bekerja di kampung dengan sistem gotong royong atau bekerja dengan sistem kontrak dan ikut pemborong, makanya bekerjanya cenderung lambat. Jadi kalau dalam pembangunan sekolah ini melibatkan masyarakat malah akan menjadi hambatan tersendiri.

Lebih lanjut, diungkapkan bahwa dalam pembangunan fisik sekolah bahwa keterlibatan masyarakat hanya sebatas perencanaan saja, karena sebelum pelaksanaan pembangunan diadakan pertemuan wali murid, dan pihak sekolah dan dewan pendidikan menginformasikan kepada masyarakat dalam hal ini para wali murid. Namun pihak sekolah sama sekali tidak mewajibkan orang tua murid untuk membayar iuran tertentu. Bentuk partisipasinya, selain melibatkan dalam perencanaan masyarakat khususnya wali murid juga menyumbangkan dana sukarela untuk pembangunan fisik sekolah.

Dengan beragam faktor kondisi, sehingga masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah, yang pada intinya adalah ketidaktahuan mereka tentang perencanaan pembangunan fisik sekolah. Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Slamet (1992:55) bahwa “ada dua faktor yang menyebabkan orang kurang berpartisipasi yaitu karena mereka mengetahui bahwa final *decision* bukan pada mereka tetapi ada pada orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta karena mereka tidak mempunyai kepentingan khusus yang mempengaruhinya secara langsung”.

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu: (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan.

Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, sungguhpun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang

atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Kalau pembangunan gedung sekolah SMP N.1,2 dan 3 ini, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik memang belum optimal. Karena semua sudah lengkap dibangun oleh atas bantuan dana /kontribusi dari masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional lainnya pada pasca gempa 2006. Jadi fisik gedungnya sudah lengkap, mabeller sudah lengkap, peralatan lain sudah lengkap, sehingga dari masyarakat memang akhir-akhir ini ada sumbangan tetapi sifatnya untuk pemeliharaan dan penambahan saja kalau untuk pembangunan fisik ini memang tidak ada lagi.

Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari masyarakat itu sendiri, dan kesempatan berasal dari pihak luar, peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan sangat penting.

Keharusan masyarakat terlibat dalam pendidikan sudah menjadi peraturan dalam UU No.20 tahun 2003 yaitu sumberdaya pendidikan adalah dukungan dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana da prsarana yang tersedia yang digunakan dan didayagunakan oleh keluarga, sekolah dan masyarakat, peserta didik dan pemerintah secara bersama-sama.

Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan keluarga/warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Sebaliknya juga pihak penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan perlu memberikan ruang dan/atau kesempatan dalam hal lingkup apa, seluas mana, melalui cara bagaimana, seintensif mana, dan dengan mekanisme bagaimana partisipasi masyarakat itu dapat dilakukan. Ada tidaknya kemauan keluarga/warga atau kelompok masyarakat dalam pengembangan pendidikan di

Indonesia terkait dengan kebijakan dan paradigma pembangunan yang dominan saat ini dan sebelumnya.

Persepsi masyarakat yang berkembang terkait dengan hambatan dalam partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik sekolah lebih banyak disebabkan kebijakan yang disampaikan oleh pihak sekolah, karena sekolah dalam pelaksanaannya seringkali tidak melakukan koordinasi atau mengkomunikasikan dengan orangtua/wali murid. Sedangkan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan hanya dilakukan kepada pihak pengembang, dan tidak ada pemberitahuan secara kepada masyarakat apakah proses pembangunan sudah selesai dilakukan.

Dari beberapa kutipan wawancara di atas, dapat diperoleh gambaran yaitu hambatan koordinasi dan komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi terkadang dilakukan hanya satu arah yaitu sebatas informasi yang disampaikan kepada masyarakat, dan tidak diperlukan koordinasi atau timbal balik dari masyarakat, karena dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah tidak melibatkan masyarakat secara langsung, melainkan dilaksanakan oleh pengembang.

Temuan-temuan dalam factor penghambat adalah:

1. Penyaluran partisipasi dapat diciptakan dengan berbagai variasi cara sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah atau komunitas tempat masyarakat dan lembaga pendidikan itu berada.
2. Model partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan membutuhkan kesigapan para pemegang kebijakan dan manajer pendidikan untuk mendistribusi peran, kekuasaannya serta kemauan dan kemampuan masyarakat berpartisipasi.

2. Birokrasi

Kekuasaan birokrasi menjadi faktor sebab dari menurunnya semangat partisipasi masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Seperti halnya dalam koordinasi dan komunikasi sering digunakan sebagai sarana mensosialisasikan program-program yang sudah di konsep oleh sekolah/ Kepala Sekolah dan Dewan Sekolah, dan partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai upaya mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau sekolah, akibatnya masyarakat sering mengartikan partisipasi adalah kewajiban membayar iuran yang telah ditetapkan dan kehadirannya pada saat diundang ke sekolah.

Peran masyarakat yang sebelumnya “bertanggungjawab”, mulai berubah menjadi hanya “berpartisipasi” terhadap pendidikan, selanjutnya, masyarakat bahkan menjadi “asing” terhadap sekolah. Semua sumberdaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah dan sekolah tidak ada alasan bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi apalagi bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Ada kebijakan pemerintah sejak tahun 2005 program bantuan rutin yang namanya bantuan operasional sekolah (BOS) diperkuat dengan PP nomor 28 tahun 2008 yang menjadi acuan program BOS 2010, untuk pencairannya harus melengkapi syarat yang cukup menyita waktu , energy dan tenaga dari Kepala Sekolah, lebih lagi turunnya tidak menentu sementara aktifitas sekolah berjalan terus.

Sebagian besar sekolah sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat ini sifatnya swasta, dan merekalah yang membangun dan memelihara sekolah, mengadakan sarana pendidikan, serta iuran untuk mengadakan biaya operasional sekolah. Jika sekolah telah mereka bangun, masyarakat hanya meminta guru-guru kepada pemerintah untuk diangkat pada sekolah mereka itu. Pada waktu itu, sekolah sebenarnya telah mencapai pembangunan pendidikan yang berkelanjutan (*sustainable development*), karena sekolah adalah sepenuhnya milik masyarakat yang senantiasa bertanggungjawab dalam pemeliharaan serta operasional pendidikan sehari-hari,

Pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang, melalui pemberian subsidi bantuan bagi sekolah-sekolah pada masyarakat yang benar-benar kurang mampu.

Dalam pelaksanaan fihak swasta juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara dalam implementasi segala bantuan baik berupa fisik maupun non fisik masih di duakan misalnya yang terjadi pada SMP Muhammadiyah dan MTs. Sumberagung Jetis juga sementara yang Negeri segala fasilitas dan bantuan sudah tercukupi.

Satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus dihasilkan dari interaksi dari ketiga pihak tersebut. Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun pajak, sehingga sekolah-sekolah seharusnya bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Namun demikian, identitas yang disebut “masyarakat” itu sangat kompleks dan tak terbatas , sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan. Untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah, konsep masyarakat itu perlu disederhanakan (*simplified*) agar menjadi mudah bagi sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat itu sendiri merupakan interaksi sosial sebagai kehidupan sosial, oleh karena tanpa ada interaksi sosial tak akan ada kehidupan bersama (Young dalam Sukanto, 1998:76).

Penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui “perwakilan” fungsi *stakeholder*, dengan jalan membentuk Komite Sekolah (KS) pada setiap sekolah disebut Dewan Pendidikan (DP) di setiap kabupaten/kota, ditingkat sekolah disebut Dewan pendidikan (DP) sedapat mungkin dapat merepresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Dengan demikian, interaksi antara sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah-sekolah dengan Dewan Sekolah, dan interaksi antara masyarakat, Kepala Sekolah para pejabat pendidikan di pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Pendidikan.

Bukti tanggungjawab masyarakat terhadap pendidikan diwujudkan dalam fungsi yang melekat pada DP dan DS, yaitu fungsi pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, fungsi kontrol dan akuntabilitas publik, fungsi pendukung (*supports*), serta fungsi mediator antara sekolah dengan masyarakat yang diwakilinya.

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut Barros dalam Yulianti (2000:34), bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju, 1999:77).

Menumbuhkan respon akan kesadaran berpartisipasi dalam perencanaan dalam menyelenggarakan pembangunan adalah sebuah kesulitan tersendiri. Kebanyakan masyarakat belum siap untuk berinisiatif dalam membuat perumusan

kebutuhan serta perencanaan sendiri, sehingga perumusan kebutuhan dan perencanaan dibuat oleh kelompok atau warga masyarakat yang mempunyai pengaruh dilingkungannya, dan memungkinkan masuknya kepentingan-kepentingan tertentu. Ditambah lagi dengan pelaksanaan kegiatan fisik ini lebih difokuskan pada hasil daripada prosesnya, serta sumber dananya berupa hibah yang menyebabkan masyarakat merasa apatis dengan kegiatan ini.

Dalam melaksanakan partisipasi masyarakat selama ini berlandaskan pada paradigma lama yang bersifat *top-down*, kegiatan perencanaan pembangunan prasarana ditentukan oleh pihak luar dengan asumsi bahwa warga dianggap tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk merencanakan pembangunan. Persoalan kemudian, apakah memang demikian adanya, bahwa apabila perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pihak luar, warga akan mampu dan memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya dalam pengelolaan prasarana sehingga mereka akan mampu pula untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana sekolah yang seharusnya melibatkan seluruh warga masyarakat, sering terjadi hal yang sebaliknya, yaitu timbulnya rasa enggan dari orangtua/wali murid dan masyarakat pada umumnya karena mereka merasa bahwa kegiatan itu hanya akan memberikan manfaat bagi kelompok tertentu (misalnya pihak sekolah dan dewan sekolah saja). Hasilnya adalah prasarana yang telah selesai dibangun pada akhirnya kurang memuaskan disebabkan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar sehingga manfaatnya kurang begitu terasa secara langsung oleh semua siswa. Peran pengawasan yang diharapkan timbul dengan sendirinya karena perencanaan dan pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat sendiripun tampaknya masih jauh dari harapan, karena adanya anggapan

bahwa yang bertugas melakukan pengawasan adalah pihak pemerintah atau panitia khusus yang ditunjuk oleh sekolah.

Selain hambatan diatas kebijakan bantuan rutin yaitu bantuan operasional sekolah (BOS) keluarinya tidak menentu. Dalam koran Bernas 23 Agustus 2011 halaman 5, judul proses pencairan dana BOSDA DIY lambat. Para informan menyayangkan lambatnya proses pencairan dana, sebab dana yang mestinya digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan termasuk dana intensip guru tetap dan pegawai tidak tetap (GTT- PTT) sejak awal tahun ajaran baru sampai saat ini belum dicairkan, padahal ini digunakan untuk belanja sekolah secara rutin pada semester I, jumlah murid sekolah tersebut sebanyak 280 siswa berarti sekitar Rp.33 juta. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori mengakui belum cairnya dana BOSDA tersebut muncul banyak keluhan. Kalau Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta hanya bertugas melakukan proses pendataan jumlah penerima, untuk selanjutnya dikirimkan ke Propinsi untuk diproses agar dana dapat disalurkan ke sekolah. Untuk untuk wilayah kota besaran anggaran BOSDA DIY tahun 2011 ini mencapai sekitar Rp.13 miliar ini digunakan untuk berbagai jenjang pendidikan” (Bernas 23 Agustus 2011, hal 5).

Selain itu seperti tahun – tahun yang lalu antara jumlah permintaan bantuan tidak selalu seperti yang diajukan dalam proposal dan dan kenyataan lapangan belum tentu dikabulkan, misalnya saja untuk SMP. Muhammadiyah 1, mengajukan 45 siswa yang disetujui hanya 9 orang siswa.

Hal diatas menunjukkan adanya hambatan dari birokrasi yang berkali-kali dilakukan , sementara sekolah membutuhkan dana itu untuk keperluan penyelenggaraan rutin sekolah dan itu merupakan nafas sekolah, sedangkan sekolah tidak boleh mungut SPP lagi dari siswa, sedangkan persepsi masyarakat kalau sekolah itu sudah gratis sampai SMP. Ini perkataan pemerintah dengan adanya kebijakan BOS tersebut itulah keluhan dari pengelola sekolah pada umumnya.

Selain itu sebagai gambaran ada kebijakan bantuan yang tidak merata dari pemerintah dalam hal ini Depdiknas, ada sekolah yang mendapat bantuan dana melimpah dan beratus juta, sementara yang lain untuk bangku tempat duduk belajarpun tidak layak, misalnya memberikan bantuan fisik berupa gedung dan ruang yang mewah sementara ada sekolah yang berlantai ubin semen biasa, lebih lagi dalam bantuan peralatan, alat kesenian dan tahun 2010 memberikan bantuan ke beberapa sekolah mendapat 20 unit komputer sedangkan tempatnya saja belum ada, dan sekolah yang lain baru memiliki komputer satu yang sudah lama itupun dari swadaya sekolah itu sendiri. Dalam hal ini sekolah yang mendapat bantuan peralatan, harus berupaya membuat tempat agar bantuan tersebut dapat dipergunakan oleh siswa, dilain pihak sekolah yang miskin akan mendapat ganjaran pengurangan minat masyarakat untuk masuk ke sekolah tersebut.

Selain kedua faktor yang dianggap dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sekolah, Angell (dalam Ross dan Lappin, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Pekerjaan dan penghasilan.

Satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus dihasilkan dari interaksi dari ketiga pihak tersebut. Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan, baik melalui uang

sekolah maupun pajak, sehingga sekolah-sekolah seharusnya bertanggung jawab terhadap masyarakat. Namun demikian, entitas yang disebut “masyarakat” itu sangat kompleks dan tak terbatas (*borderless*) sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan. Untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah, konsep masyarakat itu perlu disederhanakan (*simplified*) agar menjadi mudah bagi sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat itu sendiri.

Penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui “perwakilan” fungsi *stakeholder*, dengan jalan membentuk Komite Sekolah (KS) pada setiap sekolah dan Dewan Pendidikan (DP) di setiap kabupaten/kota di sekolah ada Dewan Sekolah sedapat mungkin dapat merepresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Dengan demikian, interaksi antara sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah-sekolah dengan Dewan Sekolah, dan interaksi antara para pejabat pendidikan di pemerintah kabupaten/kota dengan Dewan Pendidikan.

Bukti tanggungjawab masyarakat terhadap pendidikan diwujudkan dalam fungsi yang melekat pada DP dan KS, yaitu fungsi pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, fungsi kontrol dan akuntabilitas publik, fungsi pendukung (*supports*), serta fungsi mediator antara sekolah dengan masyarakat yang diwakilinya.

Sehubungan dengan hal diatas Cohen (1997) berpendapat bahwa sifat has partisipasi terutama dikenal dengan gagasan inisiatif (prakarsa) yang berfihak datang dari bawah (Bottom up) kemungkinan lebih sering sekarela daripada paksaan, sedangkan inisiatif yang datang dari atas (top down) sering kali melibatkan beberapa jenis paksaan dan disamping itu ada juga partisipasi yang didorong melalui imbalan-imbalan tertentu.

Berdasarkan pengalaman dan pendapat ahli diatas, maka perlu mengubah model pembangunan yaitu dengan menggunakan strategi pembangunan masyarakat (*bottom up*) dengan memprioritaskan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena pada dasarnya rakyat itu memiliki suatu sumber daya yang apabila diberdayakan akan muncul dengan kekuatan yang bisa maksimal, karena digali berdasarkan kebutuhan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk mereka sendiri, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari sebuah program dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan harapan masyarakat bersama. Model pembangunan tersebut, dapat dikemukakan bahwa suatu proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan partisipatif apabila program tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah. Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek/program pembangunan, tetapi juga untuk mengelola proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/program tersebut. Pada gilirannya keberdayaan masyarakat setempat menjadi baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat. Penguatan kelembagaan di sini tidak hanya berarti penguatan secara fisik saja, seperti bangunan, struktur, atau hanya kelengkapan organisasi, tetapi lebih kepada penguatan fungsi dan perannya sebagai lembaga/organisasi yang disertai tugas dan wewenang melaksanakan, memantau, atau menjaga program pembangunan.

Dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber, pengamatan dan pengumpulan beberapa dokumentasi, penulis berhasil menyusun konsep partisipasi masyarakat yang menurut penulis paling sesuai dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang

pendidikan. Model partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah model partisipasi yang adaptif yaitu mengembangkan partisipasi masyarakat yang menyesuaikan karakteristik dan kondisi sosial masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan suatu program yang melibatkan masyarakat akan dapat mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat dan masyarakat sendiri tidak merasa dirugikan.

Pengembangan model partisipasi masyarakat yang adaptif ini tentunya mengacu pada konsep-konsep partisipasi yang telah ada sebelumnya dan menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program atau pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah yang memiliki tipe masyarakat yang majemuk.

Sesuai dengan era otonomi daerah yang diperkuat dengan UU 22/1999 yang telah diamandemen menjadi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU 25 Tahun 1999 menjadi UU 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah maka pemerintah daerah, termasuk pada sektor pendidikan diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dan kebutuhan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan bidang pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakatnya.

Pasca terjadinya bencana gempa bumi pada tahun 2006 yang menyebabkan kerusakan pada sekolah/madrasah, pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan prioritas pembangunan sektor pendidikan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membangun kembali sarana belajar mengajar yang rusak akibat gempa. Seluruh unsur khususnya yang berada di sekitar sekolah ikut berpartisipasi dan saling bergotong royong serta saling menjaga agar seluruh sumberdaya yang ada benar-benar digunakan sesuai dengan perencanaan awal maupun revisi-revisi yang dilakukan selama pelaksanaan pembangunan fisik sekolah/madrasah berlangsung dan sesuai dengan ketentuan pada manual rekonstruksi/ rehabilitasi gedung sekolah/madrasah. Ada juga

berbagai bantuan dana dari berbagai sumber di Kabupaten Bantul baik dari pemerintah, lembaga non pemerintah, donor, instansi swasta, dan lainnya. Karena itu diperlukan suatu ketentuan yang memberikan kejelasan tugas dan fungsi masing-masing unsure, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul sebagai penanggungjawab kegiatan pembanguan fisik sekolah agar proses pembangunan fisik sekolah tetap sesuai dengan target dan sasaran yang diharapkan.

Terkait gempa tahun 2006 proses rekonstruksi sekolah sudah selesai. namun kedepan pemerintah berupaya untuk menerapkan upaya penanggulangan atau antisipasi jika terjadi gempa termasuk bagi semua siswa di sekolah dan memasukan kedalam kurikulum sekolah. Dalam pelaksanaan upaya antisipasi ini, nanti dilaksanakan sosialisasi dan simulasi bagaimana penanggulangan bencana sehingga masyarakat dapat memproteksi kemungkinan-kemungkinan yang akan membahayakan dirinya dan orang lain.

Dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah, pemerintah Kecamatan Jetis hanya berperan dalam sistem pelaporan dan tidak terlibat dalam pembangunan fisik, karena pelaksanaan pembangunan menjadi kewenangan pihak sekolah dan lembaga *donor* yang memberikan bantuan. Pemerintah kecamatan Jetis hanya membentuk satuan koordinasi lapangan jika terjadi kondisi darurat pada saat terjadi gempa.

Temuan-temuan dalam factor penghambat adalah **BOS** penyaluranya sering terlambat dan tidak sesuai dengan permintaan dengan kondisi yang sebenarnya, sedangkan dalam penyaluran bantuan tidak merata dan sekolah belum siap operasionalnya

Dari temuan diatas maka proposisinya adalah Model partisipasi masyarakat yang adaptif ditandai oleh variasi bentuk partisipasi

masyarakat sesuai karakteristik setempat, sinergitas dengan stakeholder pendidikan atas kesadaran masyarakat.

D. Model Partisipasi Dalam Pembangunan fisik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Jetis Bantul Yogyakarta.

Penyediaan prasarana pendidikan merupakan bagian terpenting dalam upaya pengembangan dan pembangunan suatu wilayah. Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat, dan dengan kondisi sosial ekonomi yang baik masyarakat akan lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di lingkungannya, termasuk penyediaan prasarana pendidikan melalui pembangunan fisik sekolah. Namun pada kenyataannya kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana terbatas, sedang partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, perlu terus-menerus didorong melalui suatu komunikasi pembangunan.

Demikian juga dengan strategi, kebijaksanaan atau cara menjangring partisipasi masyarakat untuk pembangunan/pengembangan fisik sekolah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui:

1. Rapat rutin antara kepala sekolah, guru dan dewan sekolah yang dilaksanakan sedikitnya dua kali dalam satu tahun pelajaran. Materi bahasan: pembangunan sekolah, program untuk mengembangkan mutu peserta didik dan mutu sekolah.
2. Rapat insidental/sesewaktu: pembahasan suatu program yang sifatnya mendesak. Sekolah mengundang dewan sekolah, tokoh masyarakat, masyarakat peduli pendidikan atau pihak lain yang terkait untuk membahas secara bersama-sama, kemudian dilanjutkan kepada orangtua/wali murid melalui surat pemberitahuan.

3. Musyawarah dengan orangtua/wali murid, biasanya pihak sekolah mengagendakan pada setiap pembagian laporan hasil belajar siswa (raport)

Tujuan utama peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan adalah untuk meningkatkan dedikasi/kontribusi dan tanggung jawab *stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa (pemikiran intelektualitas, keterampilan), moral, finansial, dan material/barang. Selain itu, juga untuk memberdayakan kemampuan masyarakat dan meningkatkan peran *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta menjamin bahwa apa yang dilakukan sekolah sesuai dan merupakan aspirasi masyarakat.

Satu kunci dalam hal ini adalah interaksi/komunikasi atau dalam bahasa para informan di Jetis mengatakan menginformasikan setiap perencanaan yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat atau orangtua/wali murid dengan memanfaatkan waktu di akhir tahun ajaran atau pembagian raport kenaikan kelas. Pada kesempatan tersebut didiskusikan dengan orangtua/wali murid dan dewan sekolah mengenai rencana pendidikan yang akan diselenggarakan pada tahun ajaran yang akan datang termasuk pembangunan fisik sekolah.

Memperhatikan cara pendekatan yang dilakukan SMP/MTs di Jetis Bantul dalam melibatkan masyarakat atau orang tua siswa, dikatakan bahwa cara untuk penyaluran partisipasi dapat diciptakan dengan berbagai variasi cara sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah atau komunitas tempat masyarakat dan lembaga pendidikan itu berada. Kondisi ini menuntut kesigapan para pemegang kebijakan dan manajer pendidikan untuk mendistribusi peran dan kekuasaannya agar bisa menampung sumbangan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, dari pihak masyarakat (termasuk orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat) juga harus belajar untuk kemudian bisa memiliki

kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan.

Ada tidaknya kemauan warga masyarakat dalam pengembangan pendidikan terkait dengan paradigma pembangunan di Indonesia. Hasil dari penelitian pengendalian mutu pendidikan menyatakan bahwa pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas. Memang secara kuantitas, kemajuan pendidikan di Indonesia cukup menggembirakan, namun secara kualitas perkembangannya masih belum merata (Sukmadinata dkk, 2006: 3). Hal ini menjadikan bangsa Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Singapura. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Karena dengan meningkatkan kualitas pendidikan, pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah tidak mungkin akan mampu membiayai sepenuhnya pembangunan fisik sekolah. Dalam arti peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan secara langsung semakin lama harus semakin dikurangi dan digantikan perannya sehingga dapat merangsang dan mengarahkan peran organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam partisipasi pembangunan fisik sekolah. Model pembangunan yang sebaiknya dikembangkan adalah melalui model pembangunan partisipatif yaitu dengan mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Model yang demikian itu menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan alternatif, sudah saatnya melihat pentingnya masyarakat tidak lagi sebagai obyek tapi subyek pembangunan. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat sudah sepenuhnya dianggap sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Karena selama ini keterlibatan masyarakat hanya dilihat dalam

konteks yang sempit, artinya masyarakat cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan sosial. Sehingga peran serta masyarakat "terbatas" pada implementasi atau penerapan program. Masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah di ambil pihak luar. Kondisi tersebut yang melatarbelakangi tentang konsep partisipasi karena partisipasi sama dengan sebuah proyek atau program dalam pembangunan yang bersifat *top down* yang pada akhirnya tidak sesuai dengan keinginan atau kebtuhan masyarakat dan ujung-ujungnya pembangunan tersebut mengalami kegagalan.

Berdasarkan pengalaman diatas, maka perlu mengubah model pembangunan yaitu dengan menggunakan strategi pembangunan masyarakat (*bottom up*) dengan memprioritaskan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena pada dasarnya rakyat itu memiliki suatu sumber daya yang apabila diberdayakan akan muncul karena digali berdasarkan kebutuhan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk mereka sendiri, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari sebuah program dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan harapan masyarakat. Model pembangunan tersebut, dapat dikemukakan bahwa suatu proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan partisipatif apabila program tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah.

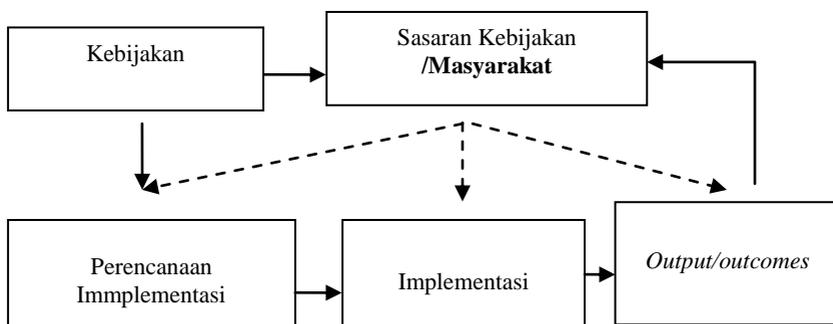
Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek/program pembangunan, tetapi juga untuk mengelola proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/program tersebut. Pada gilirannya keberdayaan masyarakat setempat menjadi baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat. Penguatan kelembagaan di sini tidak hanya berarti penguatan secara fisik saja, seperti bangunan, struktur, atau hanya

kelengkapan organisasi, tetapi lebih kepada penguatan fungsi dan perannya sebagai lembaga/organisasi yang disertai tugas dan wewenang melaksanakan, memantau, atau menjaga program pembangunan.

Dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber, pengamatan dan pengumpulan beberapa dokumentasi, penulis berhasil menyusun konsep partisipasi masyarakat yang menurut penulis paling sesuai dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang pendidikan. Model partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah model partisipasi yang adaptif yaitu mengembangkan partisipasi masyarakat yang menyesuaikan karakteristik dan kondisi sosial masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan suatu program yang melibatkan masyarakat akan dapat mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat dan masyarakat sendiri tidak merasa dirugikan.

Pengembangan model partisipasi masyarakat yang adaptif ini tentunya mengacu pada konsep-konsep partisipasi yang telah ada sebelumnya dan menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program atau pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah yang memiliki tipe masyarakat yang majemuk.

Model kebijakan oleh Diknas Bantul dalam partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam halaman berikutnya.

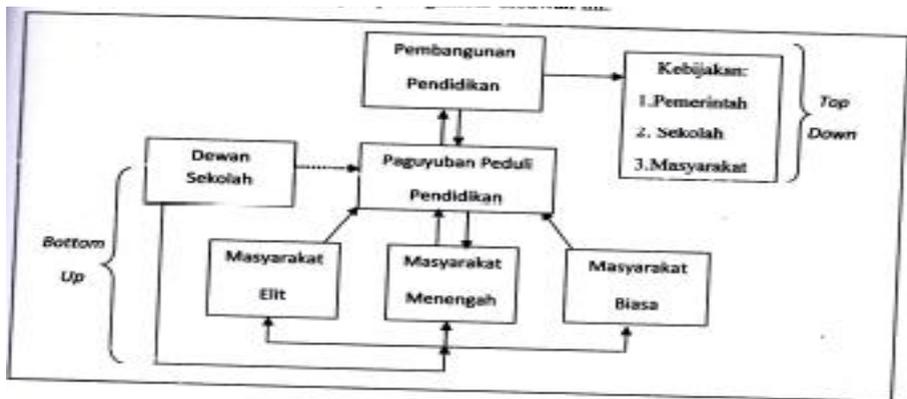


Gambar 5.1
 ➔ : Alur Kebijakan
 -➔ : Kontribusi yang diberikan
 Bagan Model Partisipasi Masyarakat
 (Sumber:Depdiknas Bantul)

Dari bagan model partisipasi di atas dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan kebijakan sampai dengan hasil atau manfaat yang diperoleh oleh sasaran kebijakan atau masyarakat, partisipasi yang diharapkan timbul dari masyarakat bersifat satu arah, yaitu masyarakat diharapkan memberikan kontribusi dalam setiap tahapan implementasi kebijakan.

Sehingga model partisipasi ini seringkali berhenti ketika masyarakat tidak terlibat atau memberikan kontribusi pada salah satu tahapan implementasi tersebut.

Selanjutnya dari bukti empiris yang diperoleh dari penelitian dilapangan penulis mencoba mengembangkan model partisipasi yang adaptif lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga diharapkan dengan model ini upaya untuk mengikut sertakan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya dari bukti empiris yang diperoleh dari temuan dilapangan penulis mengembangkan model partisipasi adaptif yang dianggap sesuai dengan kondisi social masyarakat. Model partisipasi adaptif lebih fleksibel dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.2

Bagan Model Partisipasi Masyarakat Yang Adaptif

(Sumber berbagai konsep partisipasi dan pemikiran penulis)

→ : Alur Kebijakan

---> : Kontribusi yang diberikan masyarakat

BAB IX

KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Model partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan dalam tulisan ini adalah Model Adaptif yaitu model adanya kerjasama yang sinergis antara pengelola sekolah , pemerintah dan masyarakat.

Dalam upaya pembangunan pendidikan merupakan hal yang penting kerana keterlibatan masyarakat merupakan sarana tanggung jawab keterlibatan untuk mencapai hasil. Dalam studi kasus pembangunan fisik Pendidikan Menengah Pertama di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, berusaha mengungkap fenomena dan menemukan persepsi serta respon masyarakat terhadap pembangunan fisik pendidikan, sangat baik dan mampu menemukan model partisipasi yang adaptif dalam upaya pembangunan fisik pendidikan dan memperoleh pemahaman serta pemaknaan masyarakat terhadap sosiologi pendidikan terkait upaya pembangunan pendidikan pasca bencana alam.

Mencermati berbagai data mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sekolah, maka kesimpulannya sebagai berikut.

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik pada Pendidikan Menengah Pertama di Kecamatan Jetis Bantul Yogyakarta
 - a. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan sarana fisik sekolah sudah cukup baik. Dibuktikan dengan kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam tahapan-tahapan pembangunan sesuai dengan keputusan dalam musyawarah bersama dewan sekolah, fihak sekolah dan orangtua/wali siswa yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan masyarakat.

- b. Masyarakat memiliki kesadaran berpartisipasi, baik orang tua siswa, lembaga sosial masyarakat dan masyarakat luar negeri, dalam bentuk perbaikan gedung Pendidikan Menengah Pertama Negeri dengan segala sarannya yang meliputi antara lain, ruang Kepala Sekolah , ruang kelas, ruang guru-guru, ruang tata usaha, ruang labotarium dan Mushola serta tempat parkir.
 - c. Realitas pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik sekolah melalui musyawarah dengan dewan sekolah dan orangtua/wali murid merupakan bentuk sosialisasi yang harus diikuti oleh orangtua/wali murid, dan dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah,
 - d. Kebijakan pembangunan fisik sekolah masing-masing berbeda merupakan otonomi sekolah dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan fisik sekolah, orang tua siswa tidak terlibat langsung.
2. Faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada Pendidikan Menengah Pertama di Kecamatan Jetis Bantul Yogyakarta
1. Faktor Pendukung :
 - a. Adanya kebijakan bantuan dari pemerintah biaya pendidikan disebut bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan incidental misalnya, sarana dan prasarana bantuan alat olah raga, alat kesenian computer dan untuk labotarium.
 - b. Otonomi Daerah yang diperkuat dengan UU 22 Tahun 1999 yang telah diamandemen menjadi UU 32 Tahun 2004, maka Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk pada sektor pendidikan diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengelola dana dan kebutuhan secara langsung termasuk mengali swadaya masyarakat.

2. Faktor Penghambat :
 - a. Kebijakan sekolah, birokrasi dan kurangnya koordinasi dan komunikasi sesamanya serta persepsi sekolah gratis, tapi tidak memadai, melengkapi sarana dan prasarana sekolah lebih sebagai kelengkapan akreditasi dan sertifikasi pendidikan.
 - b. Birokrasi yang kurang jelas implementasinya dan cenderung *top down*
3. Model partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada Pendidikan Menengah Pertama di Kecamatan Jetis Bantul Yogyakarta:
 1. Kebijakan pembangunan fisik sekolah yang partisipasif dirobah dengan menggunakan strategi pembangunan masyarakat (*bottom up*) yang memprioritaskan partisipasi adaptif
 2. Masyarakat Kecamatan Jetis masih kental dengan budaya patronase di mana seluruh kebijakan dan kehendak mereka digantungkan kepada pemimpin yang mereka percayai menjadi tokoh atau panutan bagi masyarakatnya.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritik :

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dimana stakeholders (warga sekolah dan masyarakat) terlibat secara aktif secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam mengambil keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ pengevaluasi pendidikan (Depdiknas,2007 :46). Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan pendidikan yang bertumpu pada tri pusat pendidikan yaitu pemerintah, masyarakat dan keluarga. Secara sinergitas atau perpaduan dalam kerja sama tersebut sejalan dengan teori tindakan sosial Parsons dan teori tindakan rasional Weber, bahwa tindakan

yang dilakukan masyarakat adalah cara-cara (*means*) yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tindakan sosial dan tindakan rasional berwujud partisipasi masyarakat akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat itu, karena nilai-nilai dan norma itu yang membentuk pola tindakan masyarakat. Teori tindakan sosial pada intinya menjelaskan bahwa elemen dasar untuk suatu tindakan sosial yang berdasarkan nilai-nilai sosial yang dianut bersama secara sukarela dan diterima atau diakui oleh anggota masyarakat (*voluntaristik*).

Selain itu, adanya komunikasi yang intensif dengan masyarakat yang dilakukan sekolah dapat menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab untuk berpartisipasi yang menjadi kebutuhan bersama mulai dengan membuat perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi serta pengawasan demi menjaga keseimbangan dan kualitas pembangunan. Keseluruhan proses tersebut merupakan rangkaian interaksi sosial yang pada hakekatnya adalah interaksi simbolik, Blumer (Poloma, 2000), bahwa individu dalam komunitas dilihat berkembang secara sosial sebagai akibat partisipasinya dalam berinteraksi dengan kehidupan masyarakat dengan kata lain manusia berinteraksi dengan yang lain dengan cara menyampaikan simbol, kemudian yang lain memberi makna atas simbol tersebut sebagaimana dikatakan oleh Herber Mead maupun Cooley bahwa individu-individu berinteraksi dengan kelompok menggunakan simbol-simbol (peran dan fungsi) yang didalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan keterlibatannya. .

Ditinjau dari teori pendidikan, hasil penelitian ini mengarah pada perlunya dikembangkan paradigma pendidikan demokratis dan pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran. Paradigma intergratif sangat diperlukan mengingat: 1) tingkat kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan membutuhkan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat-Daerah; 2) Bentuk /wujud

partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan dewan sekolah dipengaruhi oleh pemahaman ide-ide dasar partisipasi baik oleh birokrasi pendidikan, pelaku pendidikan maupun masyarakat melalui dewan sekolah; 3) Kerja sama dan interaksi antara birokrasi pendidikan, pelaku pendidikan, dan pengurus dewan sekolah dapat bermakna bila ada ruang kebebasan yang cukup lebar, *political will* (kemauan politik) dari birokrasi, dan otonomi yang cukup pada sekolah (pelaku pendidikan) dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pembangunan pendidikan.

2. Implikasi Praktis :

Prinsip-prinsip otonomi dan partisipasi pendidikan perlu dipahami oleh birokrasi pendidikan, pelaku pendidikan, dan pengurus dewan pendidikan dan dewan sekolah tentang penyelenggaraan pendidikan dan peran fungsi dewan sekolah, termasuk partisipasi orang tua. Hal ini penting untuk menentukan derajat partisipasi, kualitas kebijakan, dan peningkatan mutu pendidikan. Karena itu diperlukan reformasi pengelolaan pendidikan yang menekankan pada keterlibatan dan kerja sama komponen pendidikan yaitu pemerintah, sekolah dan masyarakat khususnya orang tua/wali murid.

Masyarakat diarahkan pada bentuk partisipasi yang sesuai dengan karakteristik warga dan tingkat pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, pihak sekolah hendaknya mampu memberikan motivasi kepada orangtua/wali murid, untuk mengkoordinir dan berkomunikasi lebih membuka peluang atau kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya bagi anak-anaknya yang sedang menempuh pendidikan, terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sekaligus

melakukan kontrol terhadap program atau kebijakan pembangunan yang telah disusun dan dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya, serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraannya. Namun diperlukan kemampuan pemerintah untuk menetapkan sektor-sektor yang dapat diserahkan pembangunan dan pengelolaannya kepada masyarakat, serta bantuan perangsang yang harus diberikan oleh pemerintah.

C. Saran

Dari hasil diatas, secara teoritis dapat disarankan, antara lain:

1. Temuan tentang fenomena partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat digali dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, atau kedua-duanya. Disadari bahwa hasil kajian ini belum mampu menyentuh seluruh aspek dan dimensi kehidupan sosial ekonomi dari masyarakat di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, sehingga masih terbuka lebar untuk meneliti masalah perubahan sosial di bidang pendidikan pada lingkungan pemerintahan Kecamatan Jetis Bantul.
2. Temuan ini diharapkan mampu menjadi rujukan teoritis bagi para peneliti selanjutnya, para mahasiswa, dan para praktisi dalam memahami fenomena sosiologi pendidikan dalam masyarakat.

Sedangkan secara praktis, dapat disarankan sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat dan Dewan Sekolah untuk menangani pembangunan fisik sekolah, sedangkan penyelenggara pendidikan yang meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, lebih fokus kepada

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan fisik sekolah melalui pendekatan partisipasi adaptif dan mengembangkan strategi baru yang melibatkan masyarakat/orang tua murid tidak saja dengan membayar iuran berupa uang saja tetapi dengan keterlibatan tenaga , pikiran. barang yang digunakan, serta tanggung jawab terhadap peningkatan mutu.
- 3) Perlu melakukan sosialisasi, dan pemberdayaan secara intensif kepada *stakeholders* pendidikan, terutama yang berkaitan dengan perubahan *mindset*/paradigma pengelolaan pendidikan dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi yang secara operasional di tingkat satuan pendidikan (sekolah) melalui rembug bersama secara berkala (tidak hanya pada saat pembagian hasil belajar siswa saja), komunikasi efektif dan interaksi bermakna sehingga diperoleh keputusan berkualitas, keputusan dari dua arah dan saling menghargai.
- 4) Diperlukan pola interaksi, koordinasi, dan komunikasi yang institusional antara birokrasi pendidikan, pelaku pendidikan dan dewan sekolah.
- 5) Memperkuat kelembagaan masyarakat setempat terutama berkaitan dengan fungsi dan peran sebagai lembaga masyarakat yang diterima dan dipercaya oleh warga masyarakatnya, Dengan kata lain, perlu mengubah model
- 6) pembangunan pendidikan yaitu dengan menggunakan model pembangunan partisipasi yang adaptif (*bottom up*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwikarta, Sudardja, 1988. *Sosiologi Pendidikan, Isyu dan Hipotesis tentang hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*, Jakart: Depdikbud, Ditjen Dikti, Proyek Pengembangan PLTK.
- Agus Salim, Norman K.Denzin, 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. P.T Tiara Wacana Yogyakarta.
- Agus Salim, 2002. *Perubahan Sosial*.PT Tiara Wacana Yogyakarta
- Arief Subyantoro, 2006. *Metode Dan Teknik Penelitian Sosial*, CV Andi Offset, Yogyakarta
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2002. *Selintas Pendidikan Indonesia Awal 2003: Tujuh Isu Pendidikan*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi.
- Baker,E.T.(1994). *A Meta Analysis Evidence for Non-Inclusive Educational Practices*. Disertasi, Temple University
- Bantul Bangkit Sosong Peradaban Baru*, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 2008.
- Chatroks. 2010.Tujuan dan Standar Kopetensi, (online) (<http://chatroks.blogspot.co.id/2010/11/tujuan-dan-standar-kopetensi.html>), Diakses Tanggal 1 Desember 2016
- Depdiknas, 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Buku Panduan, Jakarta: Direktorat SLTP Ditjen Dikdasmen, Depdiknas.
- Djohar, 2003. *Pendidikan Strategik Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*, LESFI Yogyakarta.

Dean G. Pruitt, 1986. *Social Conflict Escalation*, Statement, Mc Graw. State University Of New York at Buffalo.

Florida State University Center for Prevention & Early Intervention Policy. 2002. *What is Inclusion?*, (Online), (<http://www.pdfgeni.com/ref/What-is-Inclusion-pdf.html>), diakses 06 Nopember 2016.

Freeman, S. & Alkin, M. 2000. Academic and Social Attainments of Children with Mental Retardation in General Education and Special Education Settings. *Remedial and Special Education*, 2 (1): 3-18

Hallahan, D. & Kauffman, J. 1978. *Exceptional Children. Introduction Special Education*. New Jersey: Prentice Hall. Inc.

Hadiyanto, D. 2009. *Anak Berkebutuhan Khusus*, (Online) (<http://afikpoenya.cerita.blogspot.com/2009/06/anak-berkebutuhan-khusus-abk-children.html>), diakses 05 Nopember 2016.

Puspita, S. 2012. standar proses pendidikandan gurudalam-pencapaian standar-proses-pendidikan(Online) (<https://suryapuspita.wordpress.com/2012/03/19/standar-proses-pendidikan-dan-guru-dalam-pencapaian-standar-proses-pendidikan/>), Akses Tanggal 1 Desember 2016

Olsen, G. & Fuller, M. 2003. *Home School Relation. Working Sucessfully with Parents and Families*. Boston: Allyn and Bacon.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

- Rich, John Martin (compiler), 1988. *Innovation in Education Reformers and Their Critics*. Massachusetts: Allyn dan Bacon, Inc.
- Rijono, Nanang, 2003. “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan, Kajian Fenomenologis Makna Partisipasi Bagi Masyarakat Etnis Kutai di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara*”, Malang: Unmer.
- Rencana *Strategis Depdiknas 2010-2014*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sjafri Sairin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Skjorten, M. 2003. *Menuju Inklusi dan Pengayaan*, (Online), (<http://www.idp-europe.org/indonesia/buku-inklusi-14k>, diakses 06 Nopember 2016.
- Sukartdi, Prof. Phd. 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi Dan Prokteknya*, PT. Bumi Angkasa, Jakarta.
- Sihombing, Umberto. 2004, *Isu-Isu Pendidikan Di Indonesia. Enam Isu Pendidikan* . Jakarta. Bandung.
- Tom Campbell. 1994, *Tujuh Teori Sosial*. Kanisius. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- UNESCO. 1994. *Penyataan Salamanca dan Kerangka Aksi Mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus*, (Online), (http://www.idp-europe.org/indonesia/docs/SALAMANCA_indo.pdf, diakses 06 Nopember 2016.

- Lue Sudiyono. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan*, UNMER Malang
- Lasiyo, 1984, *Pengantar Ilmu Filsafat*. Keramat Jaya. Jakarta Pusat
- Laporan Data Base Profil Daerah Kabupaten Bantul 2007*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
- Louis O.Kattsoff, 1987, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Maksum, Ali dkk. 2004, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern Dan Post- Modern; Mencari "Visi Baru" Dan "Realitas Baru" Pendidikan Kita*. Yogyakarta , IRCiSoD
- Jalaluddin. 2007, *Filsafat Pendidikan*, Ar-Ruzz Media Group, Yogyakarta.
- Wina Sanjaya. 2014. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Kencana Prenada Media Group. Rawamangun Jakarta
- Winardi A. Dkk, 2006. *Gempa Yogya, Indonesia Dan Dunia*, PT Gramedia Majalah, Jakarta Agustus 2006.
- Watterdal, T. 2002. *Inclusive Education in Indonesia*. Jakarta: Braillo Norway.

BIODATA PENULIS



Dr.Lue Sudiyono,MM, dilahirkan di Batu Niyuh, 16 Februari 1956, tahun 1975 Lulus Sekolah Pendidikan Guru Negeri (SPGN), tahun 1985 Lulus S1 Sarjana Pendidikan, tahun 1999 Lulus S2 Manajemen Sumber Daya Manusia, bulan Februari 2012 Lulus S3 Ilmu Sosial konsentrasi Sosiologi Pendidikan, dan tahun 1975 sebagai PNS Guru SD Inpres, tahun 1986 diangkat sebagai Dosen Negeri di Universitas Negeri Palangkaraya (UNPAR), sejak 1990 pindah ke Kopertis Wilayah V Yogyakarta, dan sejak Januari 2010 sampai sekarang sebagai Dosen Negeri di perbantukan pada IKIP PGRI Wates Yogyakarta. Jabatan Akademik Lektor Kepala/Pangkat Pembina Tingkat I/IVB. Sudah sertifikasi, mengajar di beberapa perguruan tinggi dan masih aktif menulis artikel dimuat di jurnal-jurnal ilmiah menulis buku.